Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

SKRIPSI

Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam

Oleh:

Bintang Yusuf Wijaya 14321144

Mutia Dewi S.Sos.,M.I.Kom.

NIDN 0520028302

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SKRIPSI

Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Disusun Oleh :

Bintang Yusuf WIjaya

NIM : 14321144

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Telah Disetujui :

Tanggal : 03 JAN 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Mutia Dewi S.Sos.,M.I.Kom.

NIDN : 0520028302

Scanned by CamScanner

SKRIPSI

Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Disusun Oleh :

Bintang Yusuf Wijaya

NIM : 14321144

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 03 JAN 2019

Dewan Penguji

1. **Ketua** : **Mutia Dewi S.Sos.,M.I.Kom** (.....)

   NIDN : **0520028302**

2. **Anggota** : **Nadia Wasta Utami, S.I.Kom.,M.A** (.....)

   NIDN : **0505068902**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0529098201

Scanned by CamScanner

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nomor Mahasiswa : 14321144

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ... September 2018

Yang Menyatakan,

Bintang Yusuf Wijaya

Nim. 14321144

iii

MOTTO

Nyalakan Lampu Ditempat Yang Gelap, Memberisihkan Sesuatu Ditempat Yang Kotor, semua dilakukan atas dasar ibadah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr, Wb.,

Alhamdulillahirobbil 'alaimiin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-nya yang diberikan, sehigga dalam penulisan skripsi dengan judul "Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringi Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021", dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para tabi'in yang selalu berjuang dijalan Allah SWT untuk menegakkan islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarakat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Banyak pihak telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ibu Puji Harianti selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Mutia Dewi S.sos., M.I.Kom., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, konsultasi, kritik dan saran pdalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen pengajar dan staf Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua dan kakak yang tercinta, yang telah memberikan dukungan material moral serta kasih sayang yang telah diberikan selama

ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Budi Santoso, AP., selaku Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu, serta memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Para sahabat dan teman teman yang berjuang bersama di Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2014, terima kasih atas support serta kebersamaan selama ini. Semoga kita dapat selalu kompak dan akan tetap menjalin silaturrahmi dengan baik.
7. Sertaseluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, sertadapatmenjadiperbandinganbagi penelitian selanjutnya. Penulis berharap Allah SWT, berkenan untuk membalas segala kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.,

Yogyakarta,....September 2018

Penulis

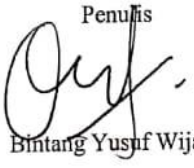

Bintang Yusuf Wijaya

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK iii

HALAMAN MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR xi

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
   1) Manfaat Teoritis 8
   2) Manfaat Praktis 8
E. Tinjauan Pustaka 9
   1) Penelitian Terdahulu 9
F. Kerangka Pemikiran 13
   1) Kebijakan E-Government Oleh Pemerintah RI 13
   2) Perencanaan Komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara 19
   3) Sistem Komunikasi Dalam Mendukung Realisasi Program 23
   4) Strategi Komunikasi Dalam Implementasi Program 26
G. Metode Penelitian 27
   1) Pendekatan Penelitian 27
   2) Waktu Penelitian 27

3) Narasumber.....28
4) Pengumpulan Data.....28
5) Analisis Data.....31

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....33

A. Sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara.....33
B. Tugas Pokok Serta Fungsi Kabupaten Penajam Paser Utara 34
1) Tugas Pokok Serta Fungsi Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika 35
2) Tugas Pokok Sekertaris Dinas Komunikasi Dan Informatika 36
3) Tugas Pokok Serta Fungsi Aplikasi Informasi Dan Persediaan Dinas Komunikasi Dan Informatika.....36
4) Tugas Pokok Serta Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik Dan Kehumasan Dinas Komunikasi Dan Informatika.....37
5) Tugas Pokok Serta Fungsi Bidang Sumberdaya TIK Dan Statistikdinas Komunikasi Dan Informatika.....37
C. Visi Dan Misi.....38
D. Struktur Organisasi 39

BAB III TEMUAN PENELITIAN 40

A. Kebijakan Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara.....41
B. Strategi Komunikasi E-Government.....49
1) Komunikator Dan Implementasinya.....49
2) Implentasi Pesan Dimasyarakat. 50
3) Media Dalam Memaksimalkan Pesan 53
4) Pemilihan dan sasaran komunikan.....56
5) Pengelolaan feedback terhadap pesan yang dipublikasikan. 56

C. Perencanaan Komunikasi E-Governement.....58

1) Perencanaan Komunikator Dalam Program E-Government 58
2) Pesan Dalam Perencanaan Komunikasi 59
3) Saluran Komunikasi Dalam Perencanaan 60
4) Target Sasaran Atau Komunikan 61
5) Efek Pesan dan Feedback Komunikan 61

D. Penerapan Sistem Komunikasi 62

BAB IV PEMBAHASAN.....70

A. Analisis Kebijakan Komunikasi 67
1) Konsep Dan Tujuan Kebijakan Komunikasi 67
2) Analisis Sumber Daya Manusia Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Komunikasi 73
3) Analisis Sosialisasi Kebijakan Komunikasi 74
4) Analisis SOP Yang Melandasasi Lahirnya Kebijakan Komunikasi 75
5) Riset Dan Evaluasi Dalam Pencanangan Kebijakan Komunikasi E-Government 77
B. Analisis Perencanaan Komunikasi 79
1) Komunikator Dalam Perencanaan Komunikasi Terhadap Program Sosialisasi E-Government.....79
2) Perencanaan Pesan Dalam Program E-Government 81
3) Perencanaan Saluran Atau Media Yang Akan Digunakan Dalam Aktifitas Komunikasi E-Government.....83
4) Perencanaan Komunikan Sebagai Sebuah Target Program E-Government 84
5) Perencanaan Sebuah Feedback Dimasyrakat Oleh Program E-Government 85
C. Analisis System Komunikasi E-Government Kabupaten Penajam Paser Utara.....87
1) Analisis Bentuk System Komunikasi E-Government

Kabupaten Penajam Paser Utara.....87
2) Mejerial Sumber Daya Manusia Dalam System E-Government.....90
3) Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara.....94
4) Standarisasi System Komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Progam Kerja E-Government 97
5) Kerjasama Dengan Pihak Luar Dalam Memenejerial System Komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.....98
D. Implementasi Strategi Komunikasi E-Government.....100
1) Penerapan Komunikator Bersama Program E-Government.....100
2) Penulisan Pesan Serta Kualifikasi Pesan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 102
3) Pemilihan Media Dalam Implementasi E-Government.....104
4) Komunikan Dan Implementasinya 105
5) Implementasi Pengelolan Feedback Masyarakat Terhadap Program E-Government.....107

BAB V PENUTUP.....110

A. Kesimpulan.....110
1) Kebijakan Komunikasi 110
2) Perencanaan Komunikasi.....111
3) Sistem Komunikasi.....112
4) Implementasi Sttrategi Komunikasi 112
B. Keterbatasan Penelitian 113
C. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN.....121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data E-Government Di Asia Tenggara 2

Gambar 1.2 Data Pengguna Internet Di Indonesia.....4

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Penajam Paser Utara 34

Gambar 2.2 Susunan Keanggotaan 39

Gambar 3.1 PERBUP Nomor 65 Tahun 2017 41

Gambar 3.2 Pemberian Materi Dari Kepala Dinas

Komunikasi Dan Informatika.....44

Gambar 3.3 SOP Yang Diberlakukan 45

Gambar 3.4 Riset Yang Pernah Dilakukan 47

Gambar 3.5 Kepala DISKOMINFO Menajadi Komunikator Dalam Berita

Pelayaan Silayan Adu 50

Gambar 3.6 Pesan Persuasif Anti Hoak 51

Gambar 3.7 Pesan Informatif 52

Gambar 3.8 Kegiatan sosialisasi 53

Gambar 3.9 Website Pemerintah Daerah 54

Gambaar 3.10 Akun Media Sosial 55

Gambar: 3.11 Vidiotron 55

Gambar 3.12 Instagram Penajam_Terkini 57

Gambar 3.13 Agenda Sosialisasi 59

Gambar 3.14 Pola Penyebaran Pesan.....63

Gambar 3.15 Web Pemerintah Daerah.....64

Gambar 3.16 Pelatihan SKPD.....66

Gambar: 4.1 Kepala DISKOMINFO Menajadi Komunikator Dalam Berita Pelayaan Silayan Adu 101

Gambar: 4.2 Contoh Pesan Ajakan Terhadap Berita Hoax.....103

Gambar: 4.3 Feedback Terhadap Pesan Diinstagram 107

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi sudah menyentuh ke dalam Pemerintahan Daerah yakni dengan membentuk program E-Government. Dalam regulasi Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) dengan menyatakan bahwa, Pemerintah diharuskan untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung pada terciptanya good government. Tak terkecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih bisa dibilang dengan Kabupaten Baru. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah Pemekaran Kabupaten Paser. Pegawai yang bekerja masih sangat kurang mengenal dan menegerti tentang pesan dikarenakan pendidikan atau tingkat keilmuan yang tidak sejalan dengan yang mereka peroleh. Selain itu juga penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan program E-Government

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mencoba mendeskripsikan serta mengamati objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan. Data dan informasi yang didapat menggunakan informan sebagai narasumber. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini adalah empat jenis strategi yang dilakukan. *Pertama,* Kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh kabupaten Penajam Paser Utara telah merumuskan Peraturan Bupati No 65 Tahun 2017 ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2017 yang membahas tentang keterbukaan informasi. *Kedua,* perencanaan komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti pemilihan komunikator, media, pesan, khalayak, dan juga *feedback*. *Ketiga,* Sistem Komunikasi yang dilakukan beberapa point masih belum maksimal seperti infrastruktur yang masih terbilang belum berkembang dikarenakan program masalah finansial. *Keempat,* implementasi komunikasi dalam implementasinya sudah baik dalam penerapanya seperti pemilihan komunikator yang memiliki kekuatan dan kredibilitas, lalu sifat pesan yang juga memiliki sifat persuasive, pemilihan media elektronik khususnya internet dan jejaring sosial yang dijaman sekarang banya diminati, pemilihan khalayak sesuai dengan pesan yang disampaikan, serta pemberian *feedback* yang dirasa cukup tanggap.

Keywords: E-Government, Komunikasi Strategi, Perencanaan, Instansi, social media.

ABSTRACT

The development of information technology has touched the Regional Government by establishing an E-Government program. In the Presidential Instruction Regulation No. 6 of 2001 concerning Telematics (Telecommunications, Media and Information) by stating that, the Government is required to use telematics technology to support the creation of good government. The Penajam Paser Utara District is no exception, which can still be considered as the New Regency. Penajam Paser Utara Regency is an expansion area of Paser Regency. Employees who work are still very unfamiliar with and understand the message because education or scientific level is not in line with what they get. In addition, this research will explain how the Penajam Paser Utara District Government is conducting an E-Government program

The method used is descriptive with a qualitative approach. The researcher tries to describe and observe the object under study based on the facts found in the field. Data and information obtained using informants as resource persons. This study also uses data collection techniques by conducting interviews, observation, and documentation.

The results of this study are four types of strategies carried out. First, the communication policy carried out by Penajam Paser Utara District has formulated this Regent Regulation No. 65 of 2017 stipulated on December 14, 2017 which discusses information disclosure. Second, communication planning is carried out in accordance with procedures such as selecting communicators, media, messages, audiences, and also feedback. Third, the Communication System carried out by several points is still not maximized as infrastructure is still relatively underdeveloped due to financial problems. Fourth, the implementation of communication in its implementation has been good in its implementation, such as the selection of communicators who have the strength and credibility, then the nature of the message that also has persuasive nature, the selection of electronic media, especially the internet and the popular network, the selection of audiences in accordance with the message, and giving feedback that was felt quite responsive.

Keywords: *E-Government, Strategy Communication, Planning, Institutions, social media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah menggunakan internet untuk menyampaikan pesan dan informasi serta pelayanan dari pemerintah pusat kepada masyarakat luas. Salah satu pemanfaatannya adalah percepatan informasi di Indonesia sendiri, tidak hanya itu pola yang dahulu masih tradisional dan irasional lama kelamaan akan berubah.

Dimana dahulu sistem penyebaran informasi masih sangat manual dan memerlukan waktu yang sangat lama, dan juga tidak bisa menutup mata dengan proses yang rumit untuk seukuran masyarakat yang hanya menempuh pendidikan sedolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Dan sekarang zaman dengan kecepatan informasi yang sangat cepat

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi semakin tahun semakin canggih, banyak perubahan yang di alami dalam memberikan informasi, di karenakan masyarakat masa kini mulai sadar dengan kemajuan teknologi tersebut. Internet merupakan jaringan dalam mendapatkan suatu informasi yang terbaru tanpa memerlukan keringat lagi masyarakat dapat mendapatkan informasi yang luas dengan hanya menunjungi website yang di inginkan.

Dari sinilah perubahan dalam bidang komunikasi terjadi, audiens dapat memberikan pendapat yang tidak bisa dikontrol dalam postingan dari akun media sosial.

E-Government atau bisa kita panggil juga dengan elektronik teknologi yang dikelola oleh pemerintah telah dijalankan oleh negara – negara maju lain seperti Korea Selatan, Denmark, Francis, Amerika Serikat, Swedia dan lain sebagainya. Pentingnya perngembangan dibidang komunikasi memunculkan idea

bagi para praktisi humas untuk juga mengembangkan teknologi elektronik yang dimana nanti di kelola oleh pemerintah.

Salah satu tujuannya adalah untuk menjangkau dan memfasilitasi masyarakatnya untuk mengemukakan pendapat pribadi atau juga untuk memberi informasi bagi mereka yang membutuhkan (masyarakat). Tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat dunia kini hampir lebih dari separuhnya memiliki apa itu yang di namakan dengan Gadget yang memudahkan mereka dalam mencari informasi.

Data yang penulis peroleh dari Bereksa.com, Indonesia menempati posisi ke-29 dari 63 negara yang diteliti. Padahal, di tahun 2014 Indonesia berada di peringkat ke-32. Posisi Indonesia di tahun 2015 mengalahkan India dan China yang berada di urutan lebih bawah, masing-masing di nomor 35 dan 49.

Dalam data statistik lain index e-government yang penulis dapat dari web-site kominfo adalah sebagai bagaimana kita lihat indonesia pada tahun 2012 menempati peringkat 7 dalam kawasan asia tengara di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunai Darusalam. Dalam artian pemanfaatan e-Gov di Indonesia masih kurang dalam mengembangkan dan memanfaatkan e-Gov di daerah – daerah .

Tabel 1.1 Data e-Government di asiatenggara

Sumber : *Statistikkominfo.go.id diakses pada tanggal 12 september 2017*

Dari data di atas kita dapat menganalisis beberapa kecendrungan dalam index e-Govvernment Singapura menempati peringkat pertama dengan nilai peringkat pada tahun 2010 berada di tempat ke 11 dan 2012 berada di peringkat 10 di ikuti oleh Malaysia dengan nilai peringkat pada tahun 2010 berada di peringkat 32 dan tahun 2012 di peringkat 40 lalu di susul oleh Brunei Darusalam 2010 berada di 68 dan 2012 berada pada 54 di ikuti Thailand dengan nilai 76 dan 92 lalu Vietnam berada pada 90 dan 83 lalu Indonesia berada pada 109 dan 2012 berada di 97 di ikuti Kamboja 140 dan 155 pada tahun 2010-2012 disususl Myanmar berada di 141 dan 160 dan yang terakir adalah Laos dengan 151 dan 153. Ini lah hasil dari negara negra asia tenggara pada tahun 2010 dan 2012 di dunia.

Berkaca dari keberhasilan dari beberapa negara maju lain seperti Francis, Jerman, Amerika dan lainnya membuat pemerintah Indonesia mereapkan konsep e-Government serupa dengan kemajuan TIK yang dimana kita tau Indonesia masih tertinggal dalam perencanaan dan implementasi di kawasan asia tenggara.

Pembenahan dalam bidang infrastruktur teknologi komunikasi yang semakin hari – semakin maju terlebih dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar sudah mengenal dengan apa itu internet. Digitalisasi ini membuat dan mengharuskan semua orang mampu untuk bertahan. Hampir di setiap sudut pekerjaan menganjurkan dan memaksa untuk memiliki keahlian dalam mengunakan internet seperti mengunakan internet sebagai media untuk mencari informasi melalui apliksai atau hanya sekadar untuk mencari hiburan.

Penyebaran internet di kalangan petinggi pemerintah pun tidak luput terkena dampak, karyawan negeri atau karyawan honor diwajibkan untuk memiliki kemampuan mengunakan aplikasi dan mampu mengakses internet hal ini yang sedang diterapkan di Indonesia dengan program kerja Pemerintah Kota untuk menerapkan e-Government. Presiden Indonesia pun menganjurkan untuk

semua kota besar yang sudah memiliki atau yang belum memiliki akses internet untuk menerapkan e-Government dalam membantu kerja pemerintah daerah.

Tabel 2.1 data pengguna internet di Indonesia

Sumber : *Statistikkominfo.go.id diakses pada tanggal 12 september 2017*

Bisa dilihat bagaimana perkembangan dan penggunaan internet di daerah indonesia yang merujuk pada tabel diatas, bersumber dari data statistik kementrian komunikasi dan teknologi indonesia sangat terlihat kesenjangan antara kota besar seperti jakarta pada tahun 2013 sangat unggul jauh dengan nilai 3,5 juta pengguna dibandingkan kota lain seperti Yogyakarta yang sebesar 164.000 ribu pengguna, Surabaya dengan 956.000 , dan Balikpapan dengan 112.000 penguna.

Akibat dari kesenjangan ini membuat Pemerintah Kota daerah sangat susah dalam menerapkan e-gov yang dimana dalam suatu daerah internet harusnya menyebar kepenjuru desa dengan jaringan yang baik. Hal ini yang nampaknya membuat kota – kota di daerah lain sangat tertinggal dalam bidang jaringan internet. Kurangnya jaringan internet yang tidak menyeluruh di Indonesia membuat dogma yang beredar semakin kuat, bahwa dalam menerapkan e-gov sangat susah terlebih lagi yang berada di daerah Kabupaten atau Kota kecil.

Akhirnya presiden pun mengeluarkan kebijakan agar setiap Kota dan Kabupaten untuk dapat mempunyai e-Government tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secara cepat dan lugas untuk menghindari isu – isu yang beredar di masyarakat. Dengan kata lain dalam menepakan sebuah strategi transformasi yang baik dan efektif, pembentukan struktur serta penyimpanan dana juga harus diperhatikan Karena alam implementasi dari e-Government adalah tujuan utamanya.

Seketika surat keputuasan berlangsung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara langsung membuat rencana program kerja. Tidak lama kemudian program kerja dalam memaksimalkan publikasi data dari SKPD di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai di terapkan dengan salah satu dari program kerja humas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah memaksimalkan e-Gov yang sudah ada. Perencanaan e-Gov di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diras oleh sebagian SKPD belum mengerti dan faham terhadap perencanaan dan penggunaannya. Humas pemerintah kota agaknya memiliki strategi dalam mensosialisasikan program kerja pemerintah yang baru tersebut agar terciptanya kemakmuran dan pengertian yang sama pemerintah dan masyarakatnya. Penulis ingin mengkaji bagaimana strategi komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Perencanaannya di kalangan SKPD dan masyarakat. Tentunya dalam pelakasaan program ini pemerintah memiliki tujuan yang ingin di capai dari program kerja humas Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimana memiliki program kerja salah satunya yaitu e-Gov sebagai program kerja.

Bagaimana Perencanaan e-Gov yang di bangun oleh humas harus di mengerti masyarakat baik itu individu yang bekerja di pemerintahan atau individu yang bekerja di luar pemerintah. Dalam program e-Gov ini pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengembangkan komunikasi publik dalam bentuk website serta akun - akun media sosial yang berbasis dengan internet. Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa dikatakan sebagai Kabupaten yang masih baru terbentuk dan memang perlu adanya pembenahan dalam bidang – bidang pembangunan dan elektronik. Di zaman yang sangat berkembang sekarang

pemanfaatan teknologi yang dapat dijumpai diberbagai tempat saakan – akan membuat masyarakat harus bertahan dan menyesuaikan diri pada teknologi tersebut.

Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Penajam Paser utara dalam hal ini peningkatan birokrasi dengan menggunakan program e-Government. Kabupaten penajam paser utara merupakan kabupaten yang masih tergolong kabupaten baru. Hal yang paling mendasar pada program tersebut yakni adalah aparatur pemerintah yang membuat dan juga melaksanakan program tersebut sehingga akhirnya program dapat berjalan dengan sebaik – baiknya. Dalam permasalahan kali ini peneliti ingin melihat bagaimana cara Pemeritah Kabupaten Penajam menjalankan program tersebut. Pasalnya dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dalam menjalankan program tersebut dalam mensuksekannya.

Peneliti mengamati bahwa kabupaten penajam paser utara masih kekurangan sumber daya manusia yang mengerti dan mengelola masalah pesan, terutama menejemen pesan yang disajikan melalui media elektronik. Beberapa dari pegawai mereka belum memiliki pengetahuan tentang dunia komunikasi hanya sebatas sekedarnya saja. Sumber daya manusia yang berstatus sarjana komunikasi yang memang mereka dalam implementasinya kedapan mengerti tentang penglolan pesan, baik pesan yang melalui media cetak ataupun melalui media elektronik dan internet.

B. RUMUSAN MASALAH

Teknologi informsai dan komunikasi pada saat ini memang benar-benar memanfaatkan apa yang dinamakan internet, perkembangan itu mualai masuk dalam ranah komunikasi, seperti perkembangan alat dalam menjangkau semua manusia. Menurut (Warsita, 2008 : 32). IK adalah tempat dimana satu system dan metode dalam memperoleh, mendapat, mengambil, mengolah, menyimpan, mengorganisasikan, dan nantinya akan dimaknai. menurut (Lantip dan Rianto, 2011: 18). Teknologi informasi dianggap mempunyai mobilitas yang tinggi serta perkembangan yang sanat cepat sebagi ilmu pengetahuan teknologi informasi

sangat membantu. Kemajuan ini yang bisa kita sebut sebagai era digitalisasi dengan kata lain semua pemanfaatan komunikasi sekarang hanya dengan modal internet kita semua bisa saling terhubung. Namun kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi ini menimbulkan beberapa masalah di karenakan luasnya jaringan informasi yang masyarakat dapat akan menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda beda.

Dan masyarakat bebas dalam mengemukakan pendapat mereka entah di media sosial seperti facebook, instagram, WA dan lain sebagainya. Memang tidak ada batasan dalam hal ini m, namun masyarakat masih berfikir tradisional dalam bijak mengunakan sosial media yang nanti menimbulkan beberapa isu. Peran Public Relations sangat penting terutama dalam penyebaran informasi (Wilcox dan Cameron, 2006 : 62). Dalam hal ini dibutuhkan PR yang mengerti kondisi di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya humas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan program kerja yang bernama smart city di dalam program tersebut pemerintah akan mengembangkan apa yang sudah negara lain kembangkan seperti E-government yang dimana fungsi dari e-Gov sendiri adalah sebagai fasilitas masyarakat dalam mendapat informasi dan juga menyampaikan pendapat. Perubahan sangat berpengaruh dengan struktur organisasi, manusia dan budaya (Indrajit, 2006 : 13).

Namun dalam implentasinya pemerintah kota dan humas kota masih di nilai kurang dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang adanya e-Gov tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan maslah yang penulis dapat adalah :

"Bagaimana strategi komunkasi pemerintah Kabupaten Penjam Paser Utara dalam menerapkan e-Gov di masyarakat?"

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan dari sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang pasti yang mana nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai, dengan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan e-Gov di masyarakat.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peluang dan hambatan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam menajalankan program kerja e-Government.

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis :
    1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi penelitian-penelitian yang lain yang mempunyai kesamaan dalam membahas topik dan tema E-Government.
    2. Untuk masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar bisa memahami dan selalu mengkroscek kembali informasi yang sedang hangat.
    3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi program studi Ilmu Komunikasi agar dapat digunakan sebagai referensi.
    4. Memberikan pembelajaran secara teoritis dalam membahas pengelolaan strategi pemerintah kota di Indonesia.
    5. Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah Kota dalam mengatasi dan menganalisa strategi komunikasi dalam bidang E-government.
2) Manfaat Praktis :

1. Untuk pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar bisa memberikan pengertian lebih dalam implementasi di masyarakat pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Memberikan alasan bagaimana cara penerapan dan strategi dalam membangun dan menerapkan E-Government

E. TINJAUAN PUSTAKA

1) Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan tahap pengamatan terhadap penelitian, ada beberapa penelitian yang serupa dan sudah dilakukan oleh individu lain dan dengan peneletian yang berada ditempat berbeda dengan masalah serupa tentang E-Government. Dalam satu hal penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian mengenai. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah KAB. Bogor sangat sadar bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah tidak akan maju jika tidak di imbangi dari kesejahtraan pelaksaan dan keberhasilan dalam penerapan e-Gov harus di dukung dari sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu kemampuan dari sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi informasi komunikasi khususnya E-Government yang berada di pemerintahan kabupaten bogor bisa lebih baik dan mensukseskan pemerataan jaringan E-Government di daeerah terpencil.

Penelitian ini memiliki tujuan bahwa manfaat dari TIK sendiri yaitu bagaimana TIK bias menjadi salah satu factor yang dapat mengurai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan bahwa manfaat dari TIK sendiri. Yakni bagaimana TIK bias menjadi salah satu factor yang dapat mengurai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan artian nantinya mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi. Adapun metode penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah metode deskriptif dan observasi.

Penelitian yang kedua yang penulis temukan adalah penelitian mengenai "EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB

PEMERINTA KOTA SURABAYA, MEDAN, BANJARMASIN, MAKASSAR, DAN JAYAPURA". Ditulis oleh Melkior N. N. Sitokdana (2015). Mahasiswa Pascasarjana Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada, yogyakarta

Penelitian ini membahas dan mendesskripsikan mengenai beberapa pemanfatan *web* Pemerintah Provinsi yang menyangkut dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang e-Government. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa terdapat data yang menunjukan angka kurang adanya interaksi kepada masyarakat, terlebih diperparah dengan ditemukannya data bahwa beberapa daerah yang mendapati kekurangan itu adalah provinsi yang ada dipulau Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penelitian ini juga menyimpulkan pembahasan dalam hal ini merupakan aspek transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update dan tahapan pencapaian. Dari Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Jayapura. Menyimpulkan pada urutan teratas Kota Surabaya memiliki tingkat kualitas e-Government yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kota-kota lain.

Penelitian berikutnya merupakan penelitian yang di lakukan oleh Ayu Aditya Oktavya (2015). Penelitian ini berjudul PENERAPAN (ELECTRONIC GOVERNMENT) e-GOVERNMENT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN DI KOTA BONTANG. Jurnal Ilmu Pemeritahan, 2015 : 3 (3) : 1433 -1447. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ayu Aditya Oktavya melatar belakangi tentang kebijakan Inpres No.3 tahun 2003 yang membahas tentang bagaimana kebijakan serta startegi nasional dalam melakukan pengembangan e-Governmnet dalam lingkup Indonesia. Selain itu terdapat kegelisahan yang ditemukan oleh sang peneliti yakni dimana masyarakat Kota Bontang masih belum mengerti ataupun mengenal elektronik government. Yang memiliki subjek penelitina yakni Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang. Kekurangan itu di karenakan partisipasi masyarakat yang masih di katakan kurang dalam pemanfaatan e-Gov sendiri hal ini menyebabkan masyarakat bersifat apatis terhadap perubahan teknologi dengan salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi khusus oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam memperkenalkan e-

Gov. Peryataan kedua yang di dapat oleh peneliti adalah pada pemetaan sumber daya manusianya.

Di Kantor Pelayanan Pajak kota bontang khususnya pada seksi pengeolahan data dan informasi yang menjabat sebagai pelaksana tugas bukan dari jurusan yang mengerti dan menguasai, hanya saja dalam bidang komputer mereka mengusai dan mengerti. Terdapat ketimpangan tugas yang di alami oleh Operator Console itu sendiri, oprator merangkap tugas tidak hanya melayani masyarakat kota Bontang namun juga melayani masyarakat Kutai Timur. Bisa di lihat bahwa dari hal ini menuunjukan kurangnya persiapan sumberdaya manusia dalam menerapkan e-Gov. Kesimpulan ketiga pada bidang infrastruktur. Dalam hal ini (KPP) sudah baik dalam membangun infrastruktur di dalam kantor yang dapat menunjang kerja para staf dan departemen namun belum cukup baik bagi masyarakat perbandingan yang terbalik ini melibatkan computer yang bisa di akses oleh masyarakat untuk membuka website pajak.go.id. pada kesimpulan yang keempat yaitu tahap dukungan pemerintah.

Pada umumnya sudah cukup baik dengan di adakannya anggaran yang di keluarkan pemerintah kota dalam mendukung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang. Namun dalam dukungan ini pemerintah pusat tidak mengutamakan atau memprioritaskan dalam mengembangkan elektronik government tersebut. Hal yang terakir yang di simpulkan adalah dalam pelaksanaan elektronik government di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bontang masih di nilai kurang dalam hal sosialisasi yang menyebabkan masyarakat berfikir apatis dan kurang terbuka terhadap keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini memiliki manfaat yakni memperbaiki kualitas pelayanan pada stakeholder, meningkatkan transparansi control dan akuntabilitas, mengurangi biaya atas control administrasi, meningkatkan lingkungan masyarakat baru, dan memperbedayakan masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian yang lain juga masih tentang e-Government di daerah Indonesia, jurnal penelitian dari teknologi informasi yang berjudul ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DESA BERBASIS WEB yang di tulis oleh Hartono, Dwiarno Utomo, dan Edy Mulyanto. Pascasarjana Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro. Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999. Penelitian ini memiliki perumusan masalah. Pertama, perlunya system informasi yang dapat menyampaikan data-data serta peluang dari investasi yang di harapkan masalah yang lain adalah potensi desa untuk mengupdate data-data dalam mengambil kebijakan pembangunan oleh SKPD. Manfaat dari penelitian ini adalah mampu untuk memberikan manfaat dalam pengembangan wacana.

Adapun metode penelitian yang di dapat oleh sang penulis jurnal tersebut adalah jenis penelitian ini sendiri memiliki data primer dan data sekunder, yang berarti data yang langsung di ambil dari sumbernya yakni melakukan wawancara dalam kata lain penelitian ini juga bisa disebut penelitian kualitatif sumber yang telah diwawancarai adalah perangkat desa setempat. Data sekunder yang dapatkan oleh penulis ini juga berupa data dari buku-buku dan literature lain. Dengan pengumpulan data adalah metode kepustakaan, metode observasi, dan wawancara. Penelitian yang di lakukan di seragen dapat menyimpulkan bahwa dengan terbangunnya aplikasi e-gov untuk pemberdayaan pemerintah dan potensi desa berbasis wab salah satunya dengan data-data yang baik dan cepat dalam penginformasiaannya, yang kedua aplikasi e-gov untuk pemberdayaan pemerintah dapat diakses setiap saat secara online oleh pihak desa sendiri dengan penyidian data yang di tunjukan selalu mutakhir.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang ditulus oleh Emilsyah Nur yang merupakan penelitian e-government terletak di daerah kota Palu. Penelitian yang berjudul PENERAPAN E-GOVERNMENT PUBLIK PADA SETIAP SKPD BERBASIS PELAYANAN DI KOTA PALU. Balai Besar dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar, 2014. Mengambil keresahan dari SKPD daerah Kota Palu karena pemrintah kota palu

dalam menyampaikan pesan atau informasi selalu bersifat pemberian langsung dari pusat akibatnya dari beberapa informasi yang beredar tidak sesuai dengan kebutuahan masyarakat dalam mengambil atau untuk dapat mengabil informasi yang diinginkan. Adapun penelitian yang dilakukan dengan mengunakan metode penelitian kualitatif.

Namun dalam meberikan informasi pemerintah Kota Palu tidak memfiltrasi informasi namun pemrintah Palu telah melakukan implementasi dari yang dihartap oleh instruksi presiden tentang e-Government. Kurangnya keseriusan dalam mendukung pelaksanaan e-government menghambat SDM dalam yang masih rendah dalam bidang pengembangannya. Serta masyarakat yang masih belum tersentuh sama sekali khususnya kualitas pelayanan di setiap SKPD Kota Palu.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

1. **Kebijakan E-Government Oleh Pemerintah RI**.

E-Government adalah sebuah bentuk dimana pelayanan public sudah terganti dengan teknologi internet dengan media dan informasi yang lebih cepat dan mudah. Dalam pola ini pemerintah serta juga kelompok masyarakat ataupun stakeholder membentuk sebuah komunikasi yang interaktif, bahkan hingga dengan sesama lembaga pemerintahan. Implementasi program e-Government dimulai dari beberapa layanan yang sederhana yakni bagaimana pemerintah menyediakan informasi dan sebuah data – data dengan computer sebagai basis yang kuat untuk menjadi sebuah alat bantu pemerintah dalam membantu pemerintah itu sendiri untuk mewujudkan sebuah keterbuakan (transparansi).

Tak hanya dari kalangan masyarakat yang biasa namun juga kalangan perangkat Daerah atau (SKPD). Mereka bisa mengakses informasi melalui berbagai macam media seperti e-mail, facebook, twiter, Instagram dan WEB resmi dari pemerintah itu sendiri. Mustopadidjaja dalam (Tahir, 2014 : 21) Menjelaskan bahwa kebijakan biasanya dijadikan kata ganti dari sebuah kegiatan

Pemerintah dan juga menjadikan suatu symbol prilaku dari lembaga negara yang nantinya kebijakan tersebut akan ditulis dalam berbagai bentuk perturan. Carl J Federick dalam (Agustino, 2008 : 7) mendefinisikan bahwa kebijakan Pemerintah merupakan kegiatan yang memang direncanakan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang dimana mereka menyadari bahwa terdapat hambatan - hambatan yang terjadi serta menyadari adanya kesempatan terhadap pembuatan kebijakan tersebut serta memiliki pencapaian tertentu.

Sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) dengan menyatakan bahwa

> "Pemerintah diharuskan untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung pada terciptanya good government. Inisiasi dari adanya e-Gov sendiri bukan tanpa alasan, alasannya terletak pada sebuah instruksi presiden No. 3 Tahun 2003"

(www.Hukumonline.com di akses pada tanggal 12 juni 2018, pukul 21.10 wib).

Dalam sebuah kebijakan presiden pada tahun 2003 ini membahas tentang strategi pengembangan E-government di kantor – kantor pemerintah daerah. Pemerintahan provinsi Kalimantan timur atau di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan teknologi informasi pemerintah dengan berbasis internet atau yang kita kenal sebagai e-Government pada tahun 2001. Pada tahun 2001 pengembangan e-Gov di Kalimantan timur dengan pengoprasian situs web (website). Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten yang berkembang dalam menjalankan program pemerintah no 3 tahun 2003 yakni e-Government. Situs www.kemendagri.go.id, dalam Jurnal Buana Informatika menyatakan,

> "Dari 530 pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten se-Indonesia terdapat 485 (92%) situs web pemerintah daerah yang aktif, 25 (5%) tidak ada situs resmi, 20 (4%) situs web offline" (Sitokdana, Jurnal Buana Informatika, Nomor 4, Oktober 2015: 290).

Bisa dilihat bahwa menace pada kuantitas dari perkembangan Web di Indonesia sudah terlihat percepatan yang pesat namun jika di kaji dengan melihat kulitas masih dianggap belum terlalu baik. Definisi e-Government yang dikatakan (The World Bank Group, 2001 : 2) Mendefinisikan e-Government sebagai berikut

> "e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan".

E-Gov menjadikan program yang bertujuan agar sebuah pemerintahan daerah nantinya memiliki transparansi dana yang baik selain itu program ini juga bermanfaat untuk memangkas birokrasi di dinas daerah yang mengharuskan setiap warga untuk datang dan mengantri. Dasar hukum yang mengatur dengan jelas adalah Dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 terdapat tujuan strategis e-Government yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. Poin tersebut diantaranya, Pertama, menciptakan serta mengembngkan sebuah system peayanan masyarakat yang terpercaya, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas dengan harga yag terjangkau. Kedua membangun sebuah sistem dalam memenejemen proses kerja Pemerintah didaerah otonom dengan cara pendekatan terhadap suatu masalah dengan memandang suatu masalah tersebut secara utuh. Ketiga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika yang optimal. Keempat berperan serta ikut dalam sebauh proses usaha dalam industry telekomunikasi serta teknologi informasi. Kelima membangun sumber daya manusia didaerah pemerintahan otonom dan disertai dengan pengembangan masyarakat yang mengerti tentang *e-literacy.* Keenam merealisasikan sebuah pengembangan secara terstruktur dan memalui tahapan yang realistic dan terukur.

(https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4e8dadf24d0c9/node/17187 di akses pada tanggal 24 juli 2018, pukul 19.00 Wib)

Di dalam poin – poin tersebut terdapat bahwa Presiden mengingkan sebuah system pelayanan menyatakan system pelayanan handal dan terpercaya dan juga terjangkau dengan masyarakat luas. Poin tersebut secara tidak langsun ingin membawa daerah – daerah yang terpencil juga dapat merasakan kemudahan yang di dapatkan oleh masyarakat yang hidup di kota – kota besar seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Makasar dan juga Medan yang notabenenya memiliki akses internet yang cepat. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengacu pada landasan hukum atau instruksi mengenai UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut (Cangara, 2014 : 83) dalam sebuah kebijakan memiliki tujuan sebagai

a) Memaksimalkan semua sumber daya komunikasi secara terencana dan tersusun.
b) Nantinya informasi yang didapat akan dikemas dan disebarluaskan sesuai dengan kehidupan sehari – hari.
c) Kebijakan dapat menjadi sebuah motivasi dimasyarakat dalam melakukan sebuah betuk perubahan social.
d) Mempermudah komunikasi dan kerjasama antara sebuah organisasi antar lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta.

Dikutip dari (Cangara, 2013: 33) menyatakan bahwa peranan lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah tinggi ilmu komunikasi, nantinya dapat diharapkan untuk menyiapkan tenaga – tenaga yang profesional untuk mengisi lapangan kerja di sector komunikasi.

Sumber daya manusia juga meruakan hal yang dibahas dalam merumuskan sebuah kebijakan komunikasi. Sumber daya manusia juga hal yang paling mendasar dari suatu sistem yang nantinya akan saling terkait dengan kebijakan yang dirumuskan. Sumber daya manusia yang berpengaruh dalam hal keilmuan serta mengerti benar dengan sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah setempat.

Dalam pelaksanaanya kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah kepada masayarakat dapat memeberikan sebuah hasil yang maksimal dikehidupan sosial masyarakat. Namun sebaik – baiknya rumusan tetap saja terdapat hal yang belum dapat dimengerti oleh sumber daya manusia Pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh (Subarsono, 2011: 92) menyatakan bahwa kebijakan sendiri juga memiliki isi yang jelas dari sebuah rumusan yang dibuat oleh pemerintah serta telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait namun tetap saja terdapat hal yang kurang dari pelaksanaanya.

Adapun sosisalisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah juga memiliki landasan konsep yang dikembangakan oleh akademisi serta peneliti. Sosialisasi kebijakan merupakan rangkaian bagaimana kebijkan tersebut dapat fimengerti oleh para khalayak dalam penelitian ini akan bertuju pada SKPD yang dimana mereka merupakan pelopor sistem yang akan dilakukan oleh Pemerintahan.

> "sosialisasi adalah suatu proses penanaman atau transafer kebiasaan, nilai, aturan, norma dari satu generasi ke generasi lainya yang meliputi semua komponen masyarakat" (sari, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, No.04, November 2009 : 92).

Dari sosialisasi kita beralih kepada bagaimana SOP atau standar oprasinal prosedur dijalankan. Kebijakan dan SOP menjadikan suatu bagian yang harus diperhatikan, ketika kebijakan tidak mempertimbangkan SOP maka yang terjadi kebijakan tersebut akan pincang nantinya saat diimplementasikannya suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Menurut (Tanjung dan Subagjo, 2012: 18) dalam menyatakan kemudahan dan kejelasan efektifitas dan efesiensi serta kelarasan, keterukuran, dinamis, nantinya berpengaruh kepada pengunaan pelayanan terhadap hukum, dan kepastian hukum.

Dengan adanya efektifitas serta SOP yang dimiliki oleh Pemerintah dalam membangun kebijakan, maka hal yang paling mendasar selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan dalam menganalisa suatu kebijakan tersebut. Suatu

perumusan kebijkan pasti terdapat adanya penelitian terlebih dahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nantinya kebijakan yang akan dirumuskan tepat dengan sasaran serta efektif. Dalam literature Paul Leedy mentakan bahwa riset memiliki 8 karakteristik yakni, riset berasal dari sebuah pertanyaan atau suatu masalah, riset dibutuhkan tujuan yang jelas, riset membutuhkan rencana spesifik, riste memiliki masalah prinsip menjadi beberapa sub-masalah, riset dilakukan berdasarkan masalah atau pertanyaan atau hipotesis yang spesifik, riset memberikan asumsi – asumsi, riset membutuhkan data yang interpretasinya menyelsaikan masalah, riset juga bersifat siklus. (www.lecturer.ukdw.ac.id di akses pada tanggal 14 juni 2018 pukul 22.01 Wita)

Adanya penelitiaan juga akan membangun berbagai macam sudut pandang yang akan didiskusikan dalam kebijakan tersebut serta akan menambah literature pembahasan dengan berbagai macam masalah serta solusi yang ditawarkan dalam membuat dan merumuskan suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan adalah kegiatan bagaimana nantinya kebijakan yang telah dirumuskan dan dijalankan akan mendapat evaluasi dari Pemerintah apakan kebijkan tersebut sudah tepat dan benar atau kebijakan tersbut belum dirasa tepat dan juga kurang membantu masyarakat dalam menyelsaikan persoalannya. (Parsons, 2008 : 35) menyatakan evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pemerikassan yang objektif, sistimatis, serta empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap target suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang ingin dicapai.

2. Perencanaan Komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Perencanaan komunikasi merupakan sebuah konsep komunikasi yang berasal dari kata perencanaan dan komunikasi. Dengan demikian sebuah konsep ini merujuk pada dua konsep dasar, dan keduanya mimiliki arti lain namun saling berkaitan satu denga yang lainya. Dari kata perencanaan, berarti dapat di artikan sebaga menejerial, sedangakan arti kata komunikasi merujuk pada sebuah proses

penyebaran informasi. Jadi dari perencanaan haruslah berpatokan dengan adanya kebijakan yang telah diberikan.

Hal ini dilakukan karena mencegah kemungkinan sebuah perencanaan yang melenceng dari apa yang sudah disampaikan. Karna itu mengapa perencanaan komunikasi harus melihat sebuah aspek dari kebijakan komunikasi atau aturan – aturan yang memang dibuat untuk menjalankan sebuah program dari lembaga yang berkaitaan.

Maka tidak begitu heran ketika perencanaan merupakan sebuah kajian dalam bidang disiplin ilmu komunikasi dengan alasan mejemen yang terdapat didalam sebuah perencanaan tersebut. Menurut para ahli seperti yang dikatakan menurut Koontz dan Weirich dalam (Solihin, 2012 : 6) perencanaan merupakan seuatu proses yang mengutamakan tujuan – tujuan perusahaan dengan cakupan terperinci, dan kemungkinan mengenai sebuah lingkungan dimana berkaitan dengan sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana suatu perusahaan merumuskan berbagai rencana atau agenda yang diperlukan merupakan sebuah tahapan pengoreksian dan mengetahui kekurangan.

Dari beberapa penjelasan diatas perencanaan merupakan sebuah prediksi kegiatan yang akan di lakukan. Jadi tidak mengherankan berbagai kota – kota besar mempunyai sebuah perencanaan, perencanaan dibuat agar mengefesiensikan waktu banyak perencanaan yang memiliki jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Jika kita melihat bagaimana waktu perencanaan yang berlangsung di kota – kota dengan dasar hukung atau kebijakan oleh pemerintah biasanya dilakukan dengan jangka waktu yang menengah.

Dalam (Cangara, 2013: 45) Dikatakan menengah karena perencanaan dilakukan untuk penyelesaian program-program dengan durasi waktu antara 4 sampai 10 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan jika dilakukan dengan jangka waktu yang panjang atau bahkan jangka waktu yang pendek, hal ini menyesuaikan suatu organisai atau lembaga. Dikutip dari

Walaupun sebuah prencanaan telah di susun dengan sangat tepat dan efesien namun tidak menutup kemungkinan factor kegagalan sangat dekat dan bisa menimpa perencanaan tersebut. Para ahli berpendapat seperti halnya Dadang Solihin (dalam Cangara, 2013: 49) dibuku teresebut terdapat 4 fator yang dapat membuat perencanaan bisa menjadi gagal, seperti:

a) Pertama, kegagalan dalam penyusunan perencanaan yang meliputi, pengumpulan informasi yang kurang, metodologi yang tidak dipahami, tidak realistis, dan implementasi yang tidak sesuai.
b) Kedua, kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan yang meliputi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana, pelaku pelaksana perencanaan yang tidak kompeten, serta tidak adanya dukungan dari stakeholder.
c) Ketiga, kegagalan karena konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangannya.
d) Keempat, kegagalan karena paradigma yang menganggap jika sesuatu telah direncanakan, maka semuanya akan berhasil sehingga mengabaikan pengembangan kapasitas maupun potensi yang ada.

Jadi beberapa penjelasan di atas merupakan sebuah aktifitas yang memandu semua pihak terkait. Perencanaan dibentuk dengan adanya sumber daya untuk tujuan memlanjutkan atau menjalankan tugasnya agar nanti tidak diinginkannya sebuah kegagalan. Komunikasi mengambil peran dimana, komunikasi menjadikan dirinya sebagai sebuah penyampa pesan dan menentukan saluran serta media yang akan digunakan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Menurut (Cangara, 2013: 41)

Peerencanaan komunikasi juga memiliki sebuah rintangan atau juga hambatan dalam mencapai efektifitas komunikasi. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh perencanaan komunikasi yakni memiliki fungsi dalam implementasi dari kegiatan kampaye, pencitraan, pemasaran sosial dan juga komersial.

Beberapa uraian diatas menunjukan bahwa suatu program yang dilakukan oleh sebuah institusi atau kelompok organisasi, menggunakan yang namanya perencanaan yang bertujuan untuk menjadwal, membuat agenda, membuat suatu cara yang dilakukan dengan memadukan unsur komunikasi dalam mencapai sebuah tujuan yang inginkan.

Komunikasi dalam sebuah perencanaan dapat mensepsifikasi kepada siapa dalam jagka waktu berapa, menggunakan saluran apa, apa pesan yang iningin di sampaikan dana pa hasil output dari semua yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi nantinya. Seperi yang disampaikan oleh ferguson dalam jurnal komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN:2548-7647 Volume 10, Nomor 2, (Dewi, mutia dan Hadiwijaya, 2016: 120) menyatakan bahwa ada tiga tahapan atau langkah dalam melakakukan sebuah perencanaan komunikasi yakni:

a) Dalam sebuah proses perencanaan harus meliputi who, how dan when. Secara terperinci fergusson mengatakan who sebagai kelompok yang akan memilih atau siapa dari mereka yang akan menjadi komunikator atau penyampai informasi. Komunikator haruslah mereka yang memang memiliki sebuah pengaruh besar dalam sebuah lingkungan internal dan eksternal
b) Prinsip penyesuaian. Dari unsur ini menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus menyesuaikan dari kebutuhan internal dan eksternal yang sedang berlangsung dalam sebuah organisasi atau lembaga. Harapanya perencanaan dapat beradaptasi dari segala hal yang muncul.
c) Tahapan terakhir merupakan sebuah alanisis dari situasi yang memahami baik dari lingkungan internal juga eksternal, tujuan, isi pesan, saluran pesan hingga media pesan samapi juga dengan anggaran biaya dari perusahan butuhkan.

Dari tiga unsur diatas masih banyak konsep yang bisa digunakan dalam membangun sebuah perencanaan komunikasi. Kondisi terkini dan situasi yang terdapat pada sebuah organisasi atau lembaga tersebut.

Selain dari teori yang mengatakan bahwa perencanaan komunikasi secara definisi dan juga perencanaan komunikasi memiliki factor kegagalan, perecanaan komunikasi juga memiliki beberapa point yang juga sangat penting. Dari teori yang ada konsep komunikator merupakan perencanaan dalam perencanaan komunikasi seprti yang di katakana oleh (Cangara, 2013 : 22) menyakatan bahwa sebagai sebuah komunikator atau orang yang menjadi sumber isi pesan tersebut, seseorang atau kelompok haruslah memiliki 3 syarat utama dalam kualifikasi sebagai seorang komunikator, yang pertama seseorang atau kelompok harus memiliki kepercayaan diri atau (Kredibilitas), yang kedua seseorang atau kelompok harus memiliki daya tarik kuat (Attractive) dan yang ketiga seseorang atau kelompok harus memilki (power) atau kekuatan

Selain dari itu perencanaan yang lain yang memang harus ada dalam perencanaan komunikasi yakni adanya pesan dang pengelolaanya. Menurut (Onong Uchjana, 2007 : 22) yang mengatakan pesan dapat berupa symbol – symbol dalam hal ini penulis ingin menggaris bawahi pesan non verbal yakni “non verbal bisa juga dalam bentuk gerak, lukisan dan isyarat. Pesan yang diharapkan memang harus memiliki makna yang dapat dimengerti oleh masyarakat atau public.

Perencanaan yang lain yakni perencanaan komuikasi dalam bidang atau unsur dari media yang dimana media sendiri memiliki fungsi sebagai perantara pesan oleh komunikator kepada komunikan yang memang memerlukan pesan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh seperti yang dikatakan oleh Bittner dalam (Imran, 2012 : 32) menyatakan komunikasi massa dilakukan dengan media massa yang sangat besar. Hal ini dimaksudkan bahwa basis media massa merupakan media yang harus menggunakan saluran yang dapat dilihat atau di dengar oleh masyarakat atau khalayak luas.

Tidak lupa dari sebuah perencanaan komunikasi yang harus dapat diperhatikan juga yakni adanya sebuah target sasaran dimana target sasaran tersebut nantinya akan mendapatkan sebuah pesan yang tertuju langsung dengan pesan oleh komunikator terdapat kreteria komunikan yang harus diperhatikan yakni komunikan yang aktif atau komunikan yang pasif Komunikan pasif adalah komunikan yang memang hanya menerima atau merespond sebuah pesan dari satu arah dan tidak memberikan tanggapan atau feedback kepada seorang komunikator. Sedangakan komunikan aktif merupakan komunikan yang menerima pesan dan merespond pesan serta memberikan sebuah feedback terhadap suatu pesan yang disajikan oleh komunikator.

Dan yang terkhir didalam sebuah perencanaan komunikasi dalam unsur feedbeck dimana dalam unsur ini sebuah pesan dapat diketahui secara umum. Feedbeck sendiri merupakan tanggapan atau balasan pesan dari seorang komunikan kepada komunikator. Feedback juga dapat dibedakan dengan kreteria, feedbeck memiliki kreteria diamana Dalam feedbeck sendiri memuat berbagai macam pesan balik oleh komunikan atau khalayak, pesan tersebut dapat berupa tanggapan negative ataupun tanggapan yang positive. Seperti yang dikatakan oleh Harold Laswell dalam (Mulyana, 2007 : 69-71) menyatakan bahwa komunikasi dari sebuh pesan yang disalmpaikan oleh komunikator nantinya diharapkan memberikan sebuah efek atau feedbeck dari seorang komunikan

3. Sistem Komunikasi Dalam Mendukung Realisasi Program.

Sistem adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang nantinya menjadi berhubungan antara satu dengan yang lainnya tujunnya antara lain tidak lain adalah memudahkan informasi, materi dan energi. Pendapat lain juga di tuangkan dalam Menurut (Jogiyanto, 2009: 34)

> “Sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen “.

Sitem juga merupakan satu kesatuan yang ada keterkaitannya dengan wilayah serta item pengerak, sebagai contoh dimana Yogyakarta merupakan sebuah provinsi, namun Yogyakarta adalah gabungan antara berbagai kabupaten seperti Sleman, Bantul, Gunung kidul, Kulonprogo, dan juga Yogyakarta. Beberapa elemen dari Kabupanten tersebut merupakan elemen - elemen yang menjadi satu.

Kata sitem juga tidak hanya untuk satu arti namun banyak hal yang bisa mengambarkan dengan kata sitem sendiri. Semantara itu komunikasi adalah suatu pertukaran pesan atau informasi atau materi yang di lakukan oleh komunikator atau yang berbicara dengan komunikan atau yang mendengarkan atau menerima pesan.

Dalam mensukseskan program e-Gov ini salalu ada hal yang penting dalam menjadikan kegiatan itu ter-realisasi. Bagaimana sumber daya manusia menjadi salah satu factor yang berperan penting dalam mensukseskan program kerja pemerintah. Untuk itu perlunya upaya dalam meningkatkan kapasistas dan juga penataan untuk menunjang pemngembangan e-Government.

Secara keseluruhan SDM dan juga fasilitas merupakan bagian terpenting dari jalannya sebuah program kerja pemerintah. Sebab itu mengapa kota – kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya berhasil melaksanakan program e-Government. Bagaimana kota Bandung mengingkan masyarakat serta SKPD untuk lebih maju dalam mengandalkan keampuan dan kekuatan sendiri atau pelayanan public berbasis e-Government. Infrastruktur merupakan dua dari beberapa factor yang sangat berpengaruh. Di Kota Bandung infrastruktur adalah hal yang pertam yang dibangun, langkah awal terbentuknya e-Government. Efektifitas dari lancarnya program e-Government yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Dalam sebuah litelatur lain seperti yang dikatakan oleh Katz dan Khan dalam (Mulyana, 2013 : 174) mengartikan Dalam pola komunikasi merupakan sebuah keadan atau hal yang mengatur tentang komunikasi yang dibangun oleh anggota – anggota sistem didalamnya.

Menejemen sumber daya manusia salaah satu unsur dimana sebuah sistem komunikasi bisa berjalan dengan sebaik – baiknya dalam suatu organisasi baik itu orgaisasi didalam sebuah Pemerintahan atau organisasi didalam sebuah lembaga swasta. Schuler, Dowling, Smart dan Huber dalam (Priyono dan Marnis, 2008: 112) mengatakan menejemen sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan MSDM merupakan sebuah pengakuan tentang bagaimana pentingnya tenaga kerja dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memberikan adanya kontribusi dalam mencapai sebuah tujuan.

Selain dari sebuah menejemen sumber daya manusia unsur lain dari sebuah sistem komunikasi yakni perlunya infrastruktur yang juga dapat menunjang sebuah program yang dilaksanakan. Infrastruktur berpengaruh hal ini dinyatakan oleh Setiadi, 2006 dalam jurnal (Warsilan dan Noor, 2015 : 359) menyatakan

> "infrastruktur merupakan pra-syarat bagi sector – sector lain untuk berkembang dan juga sarana serta merupakan cara untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya".

Berkaitan dengan sebuah infrastruktur dan juga sistem komuikasi yang dilakukan perlunya diperhatikan adanya sebuah standarisasi dari sebuah sistem dan juga infrastruktur tersebut. Standarisasi ini bertujuan agar jaringan atau juga sistem komunikasi dapat dipergunakan secara aman dan nyaman saat bertukar sebuah informasi. Hal ini disampaikan oleh (Richardus, Eko dan Indrajit, 2011 : 45) menyatakan

> "perangkat atau alat telekomunikasi yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk bertukar informasi harus mendapati jaminan kemanan dan tidak ada celah dalam kebocoran data informasi yang dapat dimanfaatkan secara tidak baik oleh sebagian pihak yang lain".

Unsur terakhir dari sebuah sistem komunikasi yakni adanya stakeholder atau mitra kerja dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Stakeholder sendiri berdampak bagi sebuah sistem demi memenejerial sebuah sistem yang digunakan oleh lembaga tersebut. Hertifah, 2003 dalam jurnal administrasi public berjudul

Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

> "stakeholder merupakan suatu individu atau kelompok baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat ataupun dipengaruhi dengan hal positif dan negatif oleh suatu kegiatan pembangunan"(Mahfud, Haryono & Anggreani, No. 12, 2010, hal. 2071).

4. Strategi komunikasi dalam implementasi program.

Strategi komunikasi merupakan sebuah cara dalam melaksanakan kegiatan secara efektif untuk dapat menentukan keberhasilan komunikasi tersebut. Menurut Smith dalam (Pratiwi, 2012 : 12) mengatakan

> "Strategic Planning For Public Relation"

Merupakan sebuah kampanye komunikasi dengan sifat informal dan juga persuasive dalam membangun sebuah pemahaman dan dukungan terhadap sebuah ide, gagasan atauu produk yang terencana yang dilakukan dengan berorientasi laba atau nirlaba dengan tujuan, rencana dan berbagai alternative berdasarkan sebuah riset dan evaluasi. Dalam menilai suatu proses komunikasi dapat dengan mengunakan model – model komunikasi. Nantinya dalam sebuah keberhasilan komunikasi terutama melihat dari segi efek dan proses komunikasi tersebut dan ditelaah dengan model komuikasi. Menurrut effendi dalam (Patiwi, 2012) mengatakan :

> "strategi komunikasi merupakan sebuah pedoman dari perencanaan komunikasi dan manejemen untuk mencapai sebuah tujuan".

Dalam pembahasan ini merujuk pada bagimana pemerintah pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan implementasi program berbasis e-

Government dengan tujuan hasil dari kegiatan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat luas dengan bentuk pendampingan untuk mengawal kesuksesan implementasi e-Government. Terutama pada implementasi :

a) Komunikator sebagai sumber informasi
b) Pesan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat
c) Media dalam menunjang penyampaian pesan
d) Komunikan yang mengkonsumsi pesan dan informasi
e) Feedback yang didapat dari pesan

Dengan kata lain stretegi komunikasi merupakan sebuah implementasi dari adanya perencanaan komunikasi yang telah dibangun diawal program yang telah dicetuskan.

G. METODE PENELITIAN

1. **Pendekatan Penelitian**.

Metode penelitian merupan salah satu dari unsur penting dalm menjaga sebuah validitas dari sebuah hasil penemuan dari penelitian. Selain itu, (Sugiono, 2012 : 9) Penelitian kualitatif merupakan metode peneletian yang berlandaskan kondisi suatu objek yang alamiah dengan seorang peneliti sebagai sebuah instrument penting. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, tujuna penelitian merupakan sebuah cara yang dipergunakan untuk memecah sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dan sebagi langkah awal yang ditempuh dalam sebuah penelitian mewajibkan relevansi dari masalah dan juga rumusan masalah.

Dalam sebuah penelitian, pendekatan yang peneliti gunakan adalah sebuah cara dari penelitian tersbut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan deskrisi yang menjadi cara penulis untuk menjelaskan kepada sang pembaca. Metodelogi ini yang digunakan oleh penulis untuk memecah

permasalahan yang ada dipelaksanaan program kerja humas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai penulis, penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang mendorong bagaimana situasi yang sedang berlangsung. Dalam pendekatan tersebut terdapat upaya dalam mendsekripsikan, menganalisis, mencatat, dan menginterpretasikan sebuah pendapat dan kejadian yang sedang berlangsung.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari sebuah penelitian ini, maka objek yang akan diteliti merupakan Kabupaten Penjam Paser Utara. Untuk mendalami dan mendapatkan sebuah hasil data yang menyesuaikan dengan kebutuhan maka nantinya aka nada pengerucutan lagi terhadap sebuah objek. Objek dalam penelitian yang penulis buat adalah kepala bidang hubungan masyarakat pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan Objek penelitian membahas tentang strategi komunikasi e-government pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Lokasi yang peneliti akan kunjungi adalah kantor dinas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan waktu kunjungan pada September 2017.

3. Narasumber

Narasumber yang menjadi objek dari bagian penelitian ini adalah staff dan kepala bidang Dinas Komunikasi Dan Informatiaka Kabupaten Penajm Paser Utara yang melaksanakan program e-Government kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang akan dibahas oleh sang peneliti dimana aktivitas dan kegitan yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika akan dikaji lebih mendalam apakah sudah sesuai implementasi dari Peraturan President No. 3 Tahun 2003 membahas tentang penerapan E-government yang diterapakan di seluruh instansi Pemerintah. Dalam pemelihan sumber ini peneliti mengunakan metode asa representative, yakni pemilihan dilakukan, dianggap

sebgai perwakilan dari seluruh kelompok pemerintahan yang telah bersentuhan langsung dengan tema yang akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang saat ini penulis gunakan merupakan terusan dari pendekatan penelitian. Jenis dari penelitian mengunakan data – data dilapangan, adapun teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini akan didapat melalui wawancara mendalam terhadap pihak yang nantinya akan diwawancarai, dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utarayang nanti kemudian akan ditambah seebuah hasil Observasi langsung dilapangan selama beberapa hari atau beberapa waktu.

b. Data Sekunder

Data sekunder nantinya akan diperoleh dengan sebuah cara kajian dokumen atau data file yang dapat memperkaya sebuah informasi dalam penelitian ini. Data sekunder seperti data dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. Tenik Pengupulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengembangan dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam eksekusinya nanti penulis ingin melakukan wawancara mendalam tidak terstruktur. Secara lebih jelas dalam memperoleh data yang dimau dan sumber sendiri akan merasa nyaman dalam mengungkapkan pendapat dan ide-idenya.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara ini merupakan cara dalam mendalami sebuah informasi yang dapat

memuaskan dan pastinya berkaitan denagan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Meoleong dalam (Putri, 2016 : 32), pertama temukan siapa yang nantinya akan diwawancarai. Kedua temukan cara untuk bagaimana sebaiknya untuk dapat menghubungi responden. Ketiga, memperisapkan segala sesuatu hal dengan matang untuk melakukan pelaksanaan wawancara. Hal ini menandakan bahwa wawancara harus diperlukan latihan dan persiapan terlebih dahulu. Kemudian, perlunya membawa alat perekam dalam pelaksanaan wawancara juga merupakan cara yang lebih efektif dalam melakukan wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah dari peneliti yang akan digunakan dalam praktek dilapangan nanti. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam pelaksanaanya penulis terlebih dulu sudah melakukan negosiasi dalam memberitahu akan adanya pelaksanaan riset kepada sumber.

Seperti yang diungkapkan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong dalam (Putri, 2016 : 31) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang mendasari untuk melakukan observasi. Pertama, Teknik pengamatan yang nantinya akan dilakukan secara langsung oleh peneliti. Kedua, Teknik pengamatan ini harus dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat prilaku dan kejadian sebagimana yang terjadi dengan mendasari kejadian hal yang sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan akan peneliti dalam mencatat sebuah peristiwa dalam situasi yang sebenarnya. Keempat, sering terjadinya kekeliruan atau bias dalam menjaring data dikarenakan adanya keraguann dapa peneliti. Kelima, Teknik pengamatan dapat memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Keenam, dalam kasus tertentu ketika Teknik komunikasi lain tidak memungkinkan, Teknik pengamatan memungkinkan dapat menjadi alat yang sangant bermanfaat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memperlihatkan sumber-sumber yang memiliki data dengan alasan data yang dimiliki dapat digunakan dalam memperluas data –data yang telah ditemukan. Adapun sebuah dokumen yang peneliti gunakan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan arsip institusi yang berhubungan langsung dengan focus penelitian.

6. Analisis Data

Menganalisis data menggunakan sebuah metode kualitatif yakni metode yang memiliki sifat induktif, menganalisis sebuah data yang didapat untuk dijadikan atu dikembangakan menjadi hipotesis. Berdasarkan dari sebuah hipotesis yang sudah dapat dirumuskan dari data tersebut, hingga mencari sebuah data kembali secara terus menerus hingga nanti mendapatkan sebuah kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau bahkan sebaliknya (Sugiyono, 2009 : 9)

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilahan data yang diperoleh dari responden, dalam tahapan ini data akan dipilah dengan mempertimbangkan data mana saja yang sudah sesuai dan data mana saja yang tidak diperlukan. Nantinya data akan dikelompokan dan lebih difocuskan agar tidak melebar dari pembahasan yang akan diteliti. Dalam tahapan ini juga akan terdapat identifikasi satuan unit yang akan diteliti.

b. Penyajian Data

Pengolahan data selanjutnya merupakan bentuk penyajian data setelah melakukan reduksi data. Penyajian data merupakan langkah dimana data disajikan dengan cara mengururaikan secara singkat hunbungan antar katagori. Untuk menyajikan data dengan didasari oleh penelitian kualitatif yang bersifat naratif atau teks. Cara ini agaknya mempermudah dan memahami apa yang telah terjadi dan dapat merencanakan sebuah metode selanjutnya yang akan dikerjakan atau digunakan (Sugiyono, 2009 : 11).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan metode yang bersifat sementara, nantinya kesimpulan dapat berubah bila terdapat sebuah bukti – bukti yang kuat, dalam sebuah tahapan pengumpulan sebuah data selanjutnya. Namunjika pearikan kesimpulan terjadi diawal, lalu didukung oleh sebuh data – data atau bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian dilapangan maka penarikan kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel (Sugiyono, 2009 : 15)

BAB II

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Komunikasi dan Informatika dimana tempat tersebut merupakan objek dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan topik penelitian yang membahas tentang strategi komunikasi pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara dalam penerapan E- government. Dalam pembahasan kali ini akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara, visi dan misi organisasi, fungsi, , serta tugas dan aktivitas, dengan hasil yang diperoleh dari data wawancara serta data skunder yang dapat dilihat pada website pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara.

3 Sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara

Perjalanan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa dipungkiri memiliki wilayah yang sangat luas, berkisar 2111.681,5 Km2 yang telah menunjukan kemajuan daam penyeengaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dahulu Kabupaten Penajam Paser Utara masih tergabung dalam sebuah wilayah Kabupaten Pasir sampai sekarang. Dalam rangka mensukseskan kinerja pemerintah dalam tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, maka diperlukannya pemekaran wilayah di kabupaten pasir. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pecahan wilayah dari kanupaten Pasir. Sekarang kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wialayah 3.333,06 Km2 dan memiliki empat kecamatan yakni kecamatan Penajam, kecamatan Sepaku, kecamatan Waru, dan kecamatan Babulu. Secara geografis kecematan – kecematan dikabupaten penajam miliki pandangan yang begitu strategis.

Pada tahun 1996 Kabupaten Penajam Paser Utara masih dipanggil dengan nama wilayah pembantu, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 102.135 jiwa dan setiap tahun jumlah pneduduk terus bertambah hingga pada tahun 2010 memiliki penduduk sebesar 109.998 jiwa. Dengan keadaan ini pada tahun 2000 Kabupaten Penajam Paser Utara memisahkan diri dari Kabupaten sebelumnya yakni Kabupaten Paser (http://kesultanan_pasir.tripod.com diakses pada tanggal 21 juli 2018).

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Penajam Paser Utara

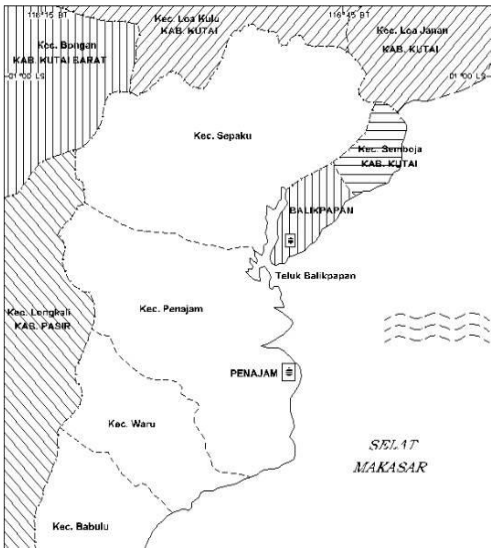

Sumber : Kesultanan pasir.tripod.com diakses pada tanggal 21 juli 2018

4 Tugas Pokok Serta Fungsi Kabupaten Penajam Paser Utara

Dinas kmonikasi dan informatika Kabutaen Penajam Paser Utara yang beralamat di jalan provinsi Km 9 kel. Nipah – nipah, kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan Lembaga organisasi yang berperan aktif dalam menjalankan program – program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasre Utara, serta membantu bupati dan wakil bupati dalam penyelengaraan pemerintah dan khususnya membantu dalam bidang hubugan masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah UU Nomor 3 tahun 2016 pasal 3 huruf d angka 15 dan pasal 4, mengenai pembentukan dan susunan perangakat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara berdiri sebagai sebuah organisasi yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah Kabupaten. Dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam terdapat bagian bagaian atau sub divisi yang memiliki tugas untuk memaksimalkan kinerja mereka. Bagian bagian dari divisi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut adalah bagian Kepala Dinas, Sekertaris, Bidang Aplikasi Informatika dan Persandiaan, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan kehumasan, bagian Sumberdaya TIK dan Statistik. Semua bidang memiliki porsi dan fungsinya sendiri – sendiri

3 **Tugas Pokok Serta fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informataka Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara**.

Mengacu pada sebuah Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 dimana membahas tentang struktur organisasi dan juga tata kerja, fungsi dan juga tugas pokok seorang Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa, Kepala Dinas Memiliki tugas, *Pertama* merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan sebuah kegiatan dalam bidang komunikasi dan informatika. *Kedua* mempersiapkan rancangan kebijakan umum dan juga kebijakan daerah. *Ketiga* menyelengrakan pelayanan dimasyarakat dalam bidang komunikasi dan juga informatika. *Keempat* melakukan koordinasi dan juga kerjasama kepada lembaga terkait dalam bidang komunikasi dan informatika. *Kelima* melaksanakan sebuah penawasan, pengadilan, pembinaan dalam bidang komunikasi dan informatika. *Keenam* menjalakan tugas dinas yang diberikan oleh pimpinan yakni Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

4 Tugas Pokok Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informataka Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sekertaris Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas serta tnaggung jawab yang diberikan. Dalam melakukan tugasnya sekertaris memiliki fungsi sebagai berikut. *Pertama* mengkordinasi sebuah perencanaan dan penyelengaraan sebuah program kerja. *Kedua* membuat susunan program kerja berserta kegiatannya. *Ketiga* mengkoordinir pelaksanaan tanggung jawab dari setiap unit-unit dalam organisasi dalam lingkungan dinas. *Keempat* mengelola administrasi umum. *Kelima* merancang sebauh standar oprasinal prosedur (SOP). *Keenam* melakukan pemberdayaan hubungan kerja, internal maupun external. *Ketujuh* melakuka pengelolan admistrasi dinas. *Kedelapan* pengkorninasian jabatan, analisis beban kerja dan juga informasi kerja. *Kesembilan* melakukan monitoring. *Kesepuluh* melakukan tugas dinas yang telah diberikan oleh Kepala Dinas (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

5 Tugas Pokok Serta fungsi Aplikasi Informasi dan Persediaan Dinas Komunikasi dan Informataka Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kepala Bidang Aplikasi Dan Persandian yang dipimpin langsung dibawah dan juga tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala Bidang Aplikasi Dan Persandian memiliki tugas dan tanggung jawab seperti, *Pertama* mengkaji suatu kebijakan teknis bidang aplikasi dan juga persandian. *Kedua* mengkaji dalam bidang fasilitas bidang aplikasi informatika dan persandian. *Ketiga* meninjau fasilitas aplikasi dan persandian. *Keempat* mengkaji program yang telah atau yang akan dilaksanakan. *Kelima* mengkaji fasilitas penerapan aplikasi dan persandian. *Keenam* mengkaji bahan fasilitas aplikasi dan persandian. *Ketujuh* mengkaji bahan fasilitas dan juga memonitoring serta standarisasi bidang aplikasi dan persandian. *Kedelapan* melaporkan dan melakukan evaluasi kegiatan bidang aplikasi dan persandian.

Kesembilan mengkoordinasi unit kerja. *Kesepuluh* melakukan tugas dinas (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

6 Tugas Pokok Serta fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan kehumasan Dinas Komunikasi dan Informataka Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang informasi memiliki fungsi dan tugas seperti, *Pertama* menkaji sebuah kebijakan teknis informasi. *Kedua* mengkaji bahan fasilitas. *Ketiga* memfasilitasi bidang informasi. *Keempat* bahan kebijakan informasi penyusunan adanya pedoman. *Kelima* mengkaji bahan fasilitas komunikasi. *Keenam* mengkaji bahan penyiaran. *Ketujuh* membuat dan memantau staf sebagai bahan pertimbangan. *Kedelapan* melaporkan dan melakukan evaluasi bidang informasi. *Kesembilan* mengkoordinasi dengan unit kerja. *Kesepuluh* melakukan tugas kedinasan (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

7 Tugas Pokok Serta fungsi Bidang Sumberdaya TIK dan StatistikDinas Komunikasi dan Informataka Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bidang Sumberdaya TIK dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sumberdaya TIK memiliki tuga pokok dan fungsi seperti, Pertama mengkaji kebijakan teknis bidnag sumberdaya TIK. Kedua melakukan sebuah perencanaan dan penyusunan unit program lingkup TIK. Ketiga melaksanakan pengolalan dan pembangunan data elektornik. Keempat melakukan tindakan pengkajian terhadap kebijakan penyimpanan kelembagaan media komunikasi. Kelima melaporkan dan mengevaluasi kegiatan bidang sumberdaya TIK. Keenam melakukan koordinasi dengan unit kerja. Ketujuh melakukan tugas kedianasan (www.jdih.penajamkab.go.id diakses pada tanggal 22 juli 2018).

C. VISI DAN MISI

Visi dari sebuah organisasi adalah sebuah rumusan dari sebuah pemikiran yang memandang jauh kedepan mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan suatu pelayanan administrasi dan regulasi pemerintahan daerah dan juga pembangunan yang melibatkan masyarakat luas dengan memahami suatu gambar pelayanan yang dilakukan dan dicermati melalui analisis isu dan juga strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekertariat daerah. Oleh karna itu, maka rumusan dari visi yang menjadi pedoman Bersama, pedoman atau suatu rumusan itu memiliki atas dua komponen berbentuk, Visi merupakan bentuk pertama, keinginan untuk merealisasikan fungsi koordinasi dan evaluasi serta merupakan pelayanan administrative yang baik. Komponen ini merupakan keadaan dimana yang diharapkan demi tercapainya sebuah proses. Kedua, penyusunan regulasi yang semakin baik dan berkualitas. Komponen – komponen itu merupakan arahan untuk mendorong dan merupakan pondasi dari gerakan moral dan etos kerja dari seluruh komponen masyarakat. Visi dari dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara adalah

> *"Terwujudnya kabupaten penajam paser utara yang komunikatif, informatif dan inovatif".*

Misi adalah deskriptif tugas – tugas pokok yang bersifat umum dalam mengimplementasikan visi yang telah dirumuskan. Misi merupkan suatu hal yang harus di miliki dan dilaksanakan oleh seluruh Lembaga, instansi, dan organisasi. Dengan Misi yang telah ditetapkan, agaknya seluruh pegawai atau pihak yang memiliki keterkaitan dapat menetahui dan memahami Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan cara dari merelaisasikan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti, Pertama melakukan melakukan pembenahan menejemen. Kedua memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang didalamnya termasuk pada aparatur pegawai dalam melayani masyarakat akan bidang komunikasi dan informasi.

Ketiga menciptakan sebauh infrastruktur komunikasi dan informasi pada masyarakat. Keempat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaian terhadap suatu perusahaan, dan peyelenggara jasa telekomunikasi.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.2

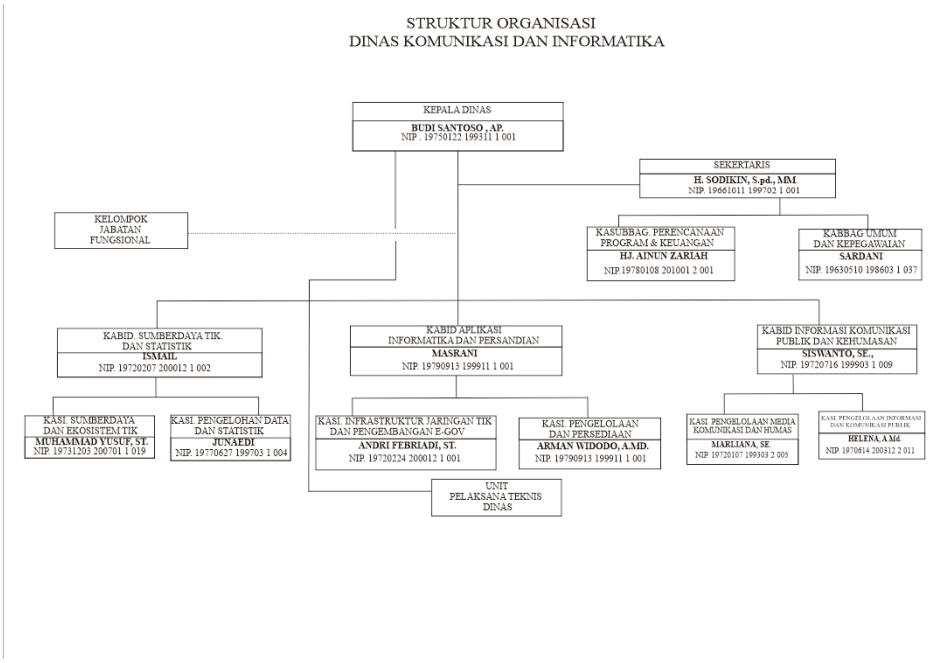

Sumber : JDIH Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan sebuh hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh sebuah bentuk dari Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Program Kerja E-Government yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Data - data yang penulis lakukan sudah dipilah dan disesuaikan dengan hasil yang penulis peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan menjabarkan bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan memberikan penjelasan focus dalam melakukan penelitian. E-government merupakan sistem penyajian pelayanan masyaarakat terhadap sebuah pesan atau informasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. E-government juga merupakan alat informasi berbasis elektronik yang didalamnya terdapat berbagai sistem yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi. e-Government juga terdiri dari beberapa jenis dan fungsi. Menurut Indrajit dalam artikel (noviana, sulandari, lituhayu) Government-tocitizen, government-to-business, government-to-employee, dan government-to-government.

https://media.neliti.com/media/publications/135616-ID-manajemen-e-government-berbasis-web-mode.pdf di akses pada pukul 21.23, tanggal 09-01-2019

Dalam hal ini peneliti akan meneliti dalam ruang lingkup bagaimana government untuk masyarakat yang kaitanya dengan pengelolaan pesan yang akan disampaikan. Indrajit dalam artikel (noviana, sulandari, lituhayu) menyatakan bahwa government untuk masyarakat akan mengacu pada informasi masyarakat seperti contoh layanan informasi berita, layanan aduan masyarakat, layanan pembeharuan akta kelahiran dan lain – lain. Peneliti akan berfokus pada

pelayanan informasi public yang sudah tercantum dalam dibeberapa peraturan pusat ataupun peraturan daerah.

https://media.neliti.com/media/publications/135616-ID-manajemen-e-government-berbasis-web-mode.pdf di akses pada pukul 21.23, tanggal 09-01-2019

E-Government yang diteleti terkait e-Gov dalam bidang G-To-C atau government to citezien, yang didalamnya memuat portal portal berita informasi dimasyarakat. Beberapa contohnya yakni Web Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, media sosial yang digunakan dalam menjangkau masyarakat, dan juga pemanfaatan media videotron.

1. KEBIJAKAN INFORMASI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Setelah dicetuskannya undang undang yang mengatur tentang diselengarakannya informasi pemerintah dalam bentuk elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-Government yang disusun dalam kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) dengan menyatakan bahwa pemerintah diharuskan untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung pada terciptanya good government serta instruksi Presiden tahun 2003 No 3 ini membahas tentang strategi pengembangan e-Government di kantor – kantor pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai melakukan dan merumuskan apa saja yang dapat menunjang kinerja serta mewujudkan kebijakan Presiden tahun 2001 dan instruksi Presiden tahun 2003 No 3 tertulis dalam sumber (www.hukumonline.com diakses pada tanggal 24 juni 2018 Pukul 10.03). Persiapan untuk menuju arah yang lebih baik terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam dengan mengadakannya sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Penajam pun langsung menggelar sosialisasi

tentang adanya instruksi Presiden mengenai adnya pembangunan E-Government di kantor – kantor Pemerintahan.

Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur selama dua sampai tiga tahun terakhir untuk menyelengarakan instruksi Presiden No 3 tahun 2003 yang mengatur untuk setiap instansi menggunakan basis Elektronik Government. Penerapan kebijakan pemerintah pusat juga diamini oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam demi memaksimalkan pelayanan dan juga kualitas. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan nantinya dalam penerapan di masyarakat Pemerintah Kabupaten Penajam bisa dan baik dalam melakuka pelayanan informasi publik, dan publik dapat emenikmati sendiri hasil dari kebijakan tersebut.

> *"Allhamdulillah dalam urusan kebijakan, kami telah melakukan atau dengan kata lain sudah dan sedang berjalan, sampai kebijakan ini ditetapkan dari pemerintah pusat maka kami akan terus melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan tersebut, harapannya masyarakat nanti bisa berpartisipasi dan terkusus oleh pegawai Pemerintah Kabupaten bisa memahami dan memanfatkanya dengan baik sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2003 No 3 dan Peraturan Gubernur Kaltim No 10 tahun 2014 tersebut" (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)*

Gambar 3.1

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Sumber : JDIH Kab Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati No 65 Tahun 2017 ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2017. Disini menatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai dasar yang bersifat tegas dalam adanya peraturan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang membahas tentang informasi publik. Sebelum munculnya sebuah kebijakan yang menjadi pelindung keterbukaan informasi publik, yakni Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003. Dengan adanya Instruksi Presiden tersbut, sekaligus menandakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk siap memberikan sebuah pelayanan informasi publik di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah acuan atau pedoman bagi badan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam penyelengaraan pelayanan komunikasi dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat atau SKPD yang diamana mereka adalah bagian dari pengguna informasi. Hal ini sesuai dengan pasal 3 BAB I dalam Peraturan Bupati No 65 Tahun 2017 (www.jdih.penajamkab.go.id Diakses pada tanggal 24 juli 2018 Pukul 15.14).

Penerapan kebijakan dari e-Government juga tidak hanya sebatas penerapan kebijakan saja pasalnya tujuan dari kebijakan E-government sendiri miliki banyak memberikan kemudahan birokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudahn yang lain juga terletak dari transparansi, satu manfat yang di timbulkan dari tujuan kebijakan tersebut adalah keterbukaan informasi yang nanti imbasnya pada meminimalisir tindakan korupsi yangsedang marak. Tujuan tersbuat membuat para pegawai SKPD dan masyarakat memiliki lebih banyak informasi yang mereka inginkan. Serta layanan yang murah dan dapat diakses oleh siapa saja juga kapan saja merupakan manfaat dari tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.

> *"Banyak sekali tujuan yang diberikan oleh adanya kebijakan tersebut dari segi kebijakan E-Gov sendiri jelas tujuannya dalah mempermudah birokrasi yang sudah lama dengancara yang lebih baru dari situlah cara lain dari mencegah*

tindak kasus korupsi yang sedang marak dikalangan lembaga pemerintah. Kedua membantu keterbuakan informasi yang sedang berjalan dikalangan masyarakat dan juga SKPD, dari situlah kepercayaan masyarakat akan kerja kami dapat dilihat, yang ketiga pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat" (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

Penerapan E-government di kalangan pemerintahan saat ini belum berjalan mulus kalau dibandingakan dengan lembaga atau pihak swasta. Di beberapa tempat lembaga ataupun organisasi pemrintahan baik yang terletak di daerah atau juga lembaga pemrintah daerah pusat belum memiliki kerjasama yang sinergis. Penerapan E-Government di Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Salah satu tantangan diantara lain adalah masalah sumberdaya aparatur yang belum maksimal. Penerapan E-Government harusnya perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai sisi teknologi. Sumber daya manusia menjadikan satu factor yang memilki keterkaitan tinggi dalam mensukseskan perumusan kebijakan. Hal yang lain juga yang perlu diperhatikan adalah perhatian terhadap pegawai atau aparatur yang mau belajar dan mampu menanggapi sebuah perubahan.

"Apakah semua faham tentang kebijakan, kalo di bilang begitu belom bisa mas karena mereka yang bekerja di pemerintahan atau SKPD 80 % masih belum mengerti benar, dan masih banyak pegawai yang kurang memhami teknologi yang disajikan oleh program E-gov, dengan demikian artinya mereka hanya mengerti secara umum tentang apa itu E-gov, kalo yang mengerti benar mungkin sedikit mas , yah itu tadi yang saya katakana keterbatasan SDM" *(Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)*

Sebuah kebutuhan akan informasi pelayanan bagi publik merupakan satu unsur yang diperlukan masyarakat. Sebuah kebijakan akan berhasil jika sebuah kebijakan tersebut dapat dimengerti dan difami dengan sangat baik dikeseluruhan aparatur organisasi atau lembaga daerah. Permasalahan sumber daya manusia biasanya terjadi jika didalam sebuah

bentuk pesan yang diberikan tidak dapat diterima dengan maksimal. Masyarakat atau SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah mendapatkan sosialisasi akan adanya program E-Government dapat melihat, mengakses dan mengunakan sebagian aplikasi yang telah disodorkan oleh Pemerintah untuk mempermudah keperluan masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

> *"Sosialisasi kami sudah lakukan, kami juga mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat untuk dapat diterima secara baik dan tidak terkesan sangat mendadak, sering juga kami melakukan kajian kajian terhadap program yang berlangsung, untuk sosialisasi di masyrakat kami sudah pernah melakukannya. seperti sosialisasi terhadap kesehatan melalui web yang pernah kami lakukan, kalo untuk SKPD sendiri kami telah melakukan sosialisasi tentang cara menggunakan web untuk mengecek, melihat anggaran, dan juga cara mengecek atau membayar pajak. Selain itu juga kami juga sampaikan kepada semua SKPD untuk membiasakan diri dalam menggunakan e-Gov. (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)*

Gambar 3.2 Pemberian materi dari Kepala Dinas

Komunikasi Dan Informatika

Sumber : Dokumen pribadi

Penerapan kebijakan E-Government di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tertata dan juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan oleh Kementrian Komunikasi Dan Informatika. Standar oprasional prosedur merupakan acuan yang dipedomani oleh lembaga dan juga organisasi. Standar oprasional prosedur (SOP) dalam pelaksannan telah tersedia dan dapat dipahami oleh semua apatarur daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam dengan ini sudah melakukan sesuai dengan standar oprasinal Prosedur yang di terapkan dalam kebijakan E-governement, dan masih berjalan dengan ketentuan SOP tersebut.

> *"SOP adalah standar oprasonal prosedur yang dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini proses dimualinya pembuatan kebijakan sampai dengan penerapanya. SOP yang dimaksud adalah pelaksanaan penerapan kebijakan E-Government dipemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tentu dalam hal ini kami telah melakukan kegiatan dalam menyusun sebuah kebijakan sesuai dengan SOP tersebut dikarnakan dari SOP itulah kami memiliki panduan dalam melakukan pekerjaan kami". (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)*

Gambar 3.3 SOP yang diberlakukan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran

Sumber : JDIH Kemterian Komunikasi Dan Informatika

SOP yang telah diterapkan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan tentunya memiliki sebuah aturan – aturan yang harus dijalani dan dipahami oleh seluruh aparatur yang akan membuat sebuah

kebijakan. SOP merupakan sebuah petunjuk bagi lembaga, organisasi dan perusahaan dalam mernerapkan sesuatu hal yang ingin diberikan dan dilaksanakan. Kabupaten Penajam Paser Utara telah mematuhi aturan SOP yang telah diberikan. Didalam SOP tersebut terdapat sebuah tatacara atau tahapan dalam melakukan atau merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya berimbas pada semua elemen. Dalam peraturan Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No 8 tahun 2010 telah djelaskan pada bab V pasal 14 ayat 3.

> *"Kami telah melakukan langkah – langkah yang diberikan atau bisa juga dibilang dengan menaati SOP yang terdapat pada Peratuaran Mentri Komunikasi Dan Informatika No 8 tahun 2010 pada bab V pasal 14 ayat 3 tersebut, didalam SOP tersebut terdapat beberapa langkah – langkah yang harus ditaati tahapan tersebut adalah bimbingan teknis, pengembangan model, penyelengaraan jaringan komunikasi, sarana dan prasarana, workshop, sarasehan, forum, penyedian bahan – bahan informasi, simulasi aktivitas, kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala, dan juga studi banding". (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)*

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam menerapkan kebijakan atau program selalu melakukan riset terhadap suatu fenomena dimasyarakat. Perlunya riset tersebut dikarnakan, hasil rist tersebut dapat menjadikan sebuah data yang nanti dapat dikaji dalam sebuah rapat kerja atau rapat program yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Didalam riset yang dilakukan terdapat sebuah fenomena – fenomena yang tidak terlihat secara sekali waktu, dan fungsi dari riset adalah memberikan sebuah solusi atau jawaban yang tepat dalam memberikan suatu jawaban dimasyarakat atau SKPD. Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset yang dimiliki oleh pemerintahan.

> *"Apakah ada riset, tentu dari semua kebijakan semuanya memiliki riset kami juga melakukan riset bersama praktisi serta badan riset daerah yang ada di pemerintahan ini untuk membantu program kerja, riset tersebut dapat menunjukan hasil data yang*

*diinginkan oleh pemerintahan tentang fenomena apa yang sedang terjadi dimasyarakat dan SKPD serta menjawab dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara" (*Budi santoso, wawancara, *29 juli 2018)*

Gambar 3.4 Riset yang pernah dilakukan

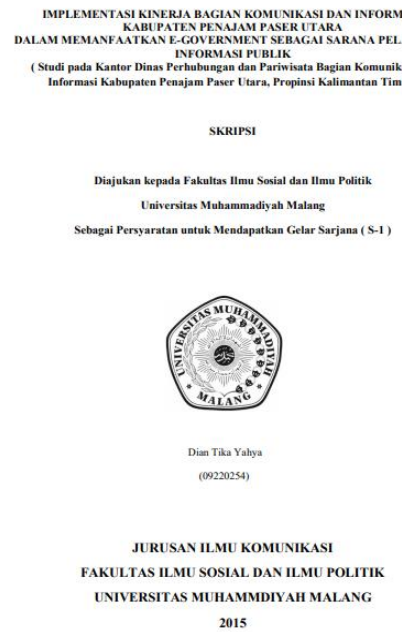

IMPLEMENTASI KINERJA BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DALAM MEMANFAATKAN E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
(Studi pada Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Bagian Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

Dian Tika Yahya
(09220254)

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG
2015

Sumber : eprints.umm.ac.id Diakses Pada tanggal 1 agustus 2018

Pemerintah Kabupaten Penjam Paser Utara juga melakukan tahan evaluasi terhadap suatu kebijakan utnuk menilai seberapa jauh suatu program dari hasil kebijakan tersebut dilakukan dan dapat membuahkan hasil. Evaluasi kebijakan E-Governmant di Kabupaten Penajam Paser Utara biasanya membandingkan suatu hasil yang diperoleh dari kebijakan tersbut dan melihat atau membandingkan dengan tujuan dan target yang telah disepakati. Didalam evaluasi tersebut juga membahas tentang bagaimana program disuatu daerah dapat berjalan dengan baik dengan meninjau keadaan yang berada disuatu wilayah desa, kelurahan dan kecamatan.

“Tentunya disetiap kebijakan yang kami buat akan selalu ada evaluasi untuk mengetahuai apakah sudah baik berjalan atau belum, sebagai contoh ketika disuatu fenomena A terjadi maka konsep dari kebijakan di kota B tidak bisa di gunakan karena berbeda pendekatan serta pola fikirnya, kalo pun bisa hasil yang di dapat akan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran, setelah itu akan dikaji ulang untuk mendapatkan program yang baik di suatu wilayah” (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

2. STRATEGI KOMUNIKASI E-GOVERNMENT

1. Komunikator dalam implementasinya

Dalam menerapkan strategi komunikasi pentingnya komunikator terhadap suatu pesan juga berdampak pada tingkat kepercayaan informasi yang berada di kalangan masyarakat. Komunikator menjadi sangat penting dikarenakan komunikator memiliki peran terhadap suatu sumber informasi yang beredar yang bisa dipercaya di masyarakat. Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa komunikator memiliki peranan penting dalam bagian informasi, yang menjadi komunikator di dalam pemerintahan kabupaten Penajam Paser Utara adalah pegawai dinas komunikasi dan Informatika, baik secara langsung maupun dapat bekerja sama dengan skpd lain atau pihak lainnya.

"dalam menerapkan strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Penajam menyadari bahwa pentingnya komunikator terhadap suatu pesan yang diberikan kepada lembaga yang nantinya akan diterima di masyarakat atau yang diterima oleh pegawai dinas dan lain sebagainya, di sini yang menjadi komunikator adalah pegawai dinas komunikasi dan Informatika baik secara langsung maupun dapat bekerjasama dengan SKPD lain atau pihak lainnya seperti stakeholder yang terkait. Kami juga memilih komunikator sesuai dengan kriteria serta pesan apa yang akan disampaikan".

“contoh dalam hal yang sebenarnya ketika kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan program baru dari program kerja Pemrintah yakni adanya Pelayanan Silayan Adu, beliau memberikan bagaiamana

pelayanan itu akan dilaksanakan dan bagaimana teknis dalam penggunaanya" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

Gambar: 3.5 Kepala Dinas menjadi Komunikator

Sumber: http://beritapenajam.net Diakses pada tanggal 17 januari 2019

Dalam menyampaikan pesan komunikator juga harus memiliki kriteria kredibilitas tinggi. kredibilitas merupakan suatu tingkat dalam menimbulkan kepercayaan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menggaris bawahi tentang adanya kriteria komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi.

"Kami juga menyadari bahwa komunikator harus memiliki kredibilitas yang tinggi walaupun begitu tentu saja komunikator

juga memiliki keterbatasan" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

2. Implementasi pesan dimasyarakat

Penerapan pesan merupakan sebuah cara bagaimana pesan itu akan disampaikan dengan media apa saja yang dapat atau yang bisa mempengaruhi masyarakat dan pegawai secara baik. Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengelolaan isi pesan meliputi dua hal pengelolaan. Pengelolaan pesan informatif bagaimana pesan ini lebih banyak ditujukan kepada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak prosesnya lebih sederhana dan jelas serta tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit. Proses pengelolaan pesan yang kedua yakni bersifat persuasif model ini bertujuan untuk merubah pendapat persepsi dan sikap kalian dalam bersifat persuasif dan yang diinginkan dalam model ini adalah yang disampaikan akan terjadi perubahan pendapat, ataupun sikap.

"kalau di Penajam sendiri penerapan pesan tersebut ada melakukan dua cara, cara pertama itu pesan informatif pesan informatif merupakan pesan yang banyak ditujukan kepada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat sederhana, jelas dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit. Contohnya merupakan masih kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan pemda, nantinya secara singkat pesan akan ditulis dengan cara penyampaian di masyarakat yang modern seperti sekarang. Model yang kedua adalah pengelolaan pesan bersifat persuasif model ini bertujuan untuk merubah pendapat, persepsi dan sikap khalayak. Prosesnya bersifat persuasif dan yang diinginkan dalam model ini adalah setelah pesan disampaikan maka akan terjadi perubahan pendapat persepsi ataupun sikap, sebagai contoh informasi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta sangsinya. Adanya informasi ini diharapkan terjadi perubahan perilaku ketidakpedulian masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih peduli dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pesan yang edukatif bertujuan untuk masyarakat mimiliki tingakat keilmuan. Contoh pesan yang mengandung akibat dari penggunaan narkoba" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

Gambar: 3.6 Pesan Persuasif Anti Hoak

Sumber: http://penajamkab.go.id/ppu-deklarasi-anti-hoax/ Diakses pada tanggal 17 januari 2019

Gambar: 3.7 Pesan Informatif

Sumber: http://penajamkab.go.id/55/ Diakses pada tanggal 17 januari 2019

Pesan merupakan sebuah informasi yang menyajikan simbol-simbol di dalamnya, pesan juga merupakan sebuah alat dalam berkomunikasi biasanya pesan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Adanya pesan sangat penting dalam melakukan sebuah strategi komunikasi instansi pemerintahan. Kabupaten Penajam sendiri juga mengelola Pesan yang disampaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dinas komunikasi dan Informatika maka bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta menuangkan hasil yang didapat oleh sebuah kegiatan tersebut.

> *"kalau isi Pesan yang disampaikan oleh pemerintah penajam Paser Utara penyampaian pesan itu ditugaskan dan melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika biasanya isi pesan itu sebuah kebijakan pemerintah atau hasil kebijakan pemerintah dan kegiatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta menyajikan sebuah hasil yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)*

Gambar: 3.8 Aktifitas sosialisasi

Sumber: http://beritapenajam.net Diakses pada tanggal 17 januari 2019

3. Media dalam memaksimalkan pesan

Perlunya strategi dalam melakukan penyampaian pesan dapat memaksimalkan media informasi pesan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan strategi dalam menyampaikan pesan terhadap aparatur pegawai daerah serta masyarakat luas. Selama ini strategi yang

dilakukan dalam menyampaikan pesan yaitu dengan menyampaikan pesan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan serta menggunakan teknologi informasi komunikasi seperti internet atau media luar ruang seperti baliho spanduk maupun kerjasama dengan media massa. Cara mengemas pesan juga menjadi strategi kami dalam menarik simpati Pegawai dan masyarakat.

> *"Kabupaten Penajam Paser Utara selama ini menggunakan strategi yang sedang atau yang telah dilakukan dengan menyampaikan pesan yaitu dengan menyampaikan pesan secara langsung, melalui pertemuan-pertemuan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet atau media sosial, menggunakan media luar ruang seperti videotron, atau melakukan kerjasama dengan media massa strategi ini telah dilakukan secara dinamis dari tahun ke tahun media apa saja yang dapat digunakan. Adapun strategi lain yang dilakukan dengan menyampaikan pesan tersebut adalah dengan mengemas pesan secara secara baik dan menarik" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)*

Saluran komunikasi menduduki peranan penting dalam sebuah sosialisasi dan pengembangan program kerja E-Gov terutama kinerja E-Gov Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Saluran komunikasi non personal memiliki peranan yang penting dimasyarakat. Kabupaten Penajam Paser Utara memilih saluran tersebut karna saluran tersbut dianggap sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada sebuah khalak masyarakat.

> *"*Kenapa kami memilih saluran komunikasi dan juga bentuk dari saluran tersebut. Karna saluran tersebut di anggap sangat efektif dalam menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak luas. Serta dalam jaman yang modern seperti sekarang peran saluran non personal sangatlah penting*" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)*

1.6 Website yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Website ini digunakan sebagai media utama dalam rujukan setiap pesan yang ingin masyarakat ketahui. Beberapa dari konten yang ada dalam website tersebut,

terdapat konten tentang e-Planning, e-Budgeting, JDIH, SIM-PBB dan lain-lain.

Gambar ; 3.9 Website Kab. Penajam Paser Utara

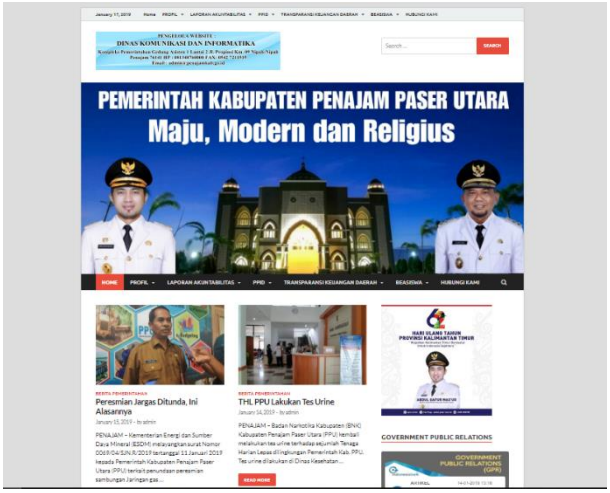

Sumber ; http://penajamkab.go.id/ Diakses pada tanggal 17 januari 2019

1.7 Medsos yang digunakan dibeberapa media sosial seperti Instagram, dan facebook yang digunakan sebagai media penyampaian pesan yang digunakan untuk khalayak luas terlebih lagi masyarakat Penajam Paser Utara. Pesan yang disampaikan terbilang sangat luas beberapa koten dari media tersebut berupa informasi ajakan, pesan yang informative, dan pesan pendidikan.

Gambar ; 3.10 Akun Instagram Penajam Paser Utara

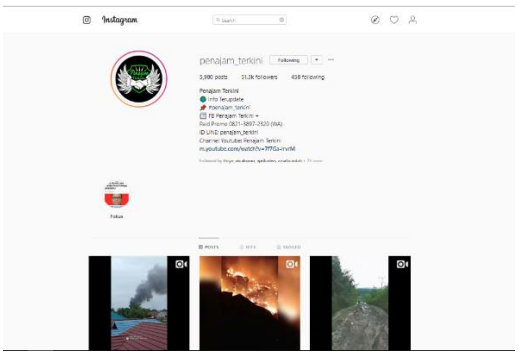

Sumber ; @Penajam_terkini Diakses pada tanggal 17 januari 2019

1.8 Videotron yang digunakan sebagai media elektronik diluar ruang juga merupakan media yang digunakan. Media vidiotron ini menyampaikan beberapa konten yang ditampilkan yakni konten – konten yang mengambarkan profile Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar ; 3.11 Vidiotron

Sumber ; http://kaltim.prokal.com Diakses pada tanggal 17 januari 2019

4. Pemilihan dan sasaran komunikan

Pemelihan Komunikan juga merupakan hal yang mendasari tercapainya sebuah keberhasilan suatu pesan yang dipublikasi. Pesan yang memang diperuntukan oleh individu atau kelompok seusianya akan menjadi pesan yang sangat tepat jika dikemas dengan sepesifikasi komunikan tersebut. Pemahaman komunikan terhadap pesan menjadikan kunci sukses dari sebuah proses program kerja. Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan bahwa pemerintah memiliki konsep pemilihan komunikan.

> *"konsep yang diterapkan dalam menetapkan sasaran di Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan strategi komunikasi yang pertama menentukan sasaran konsep yang diterapkan itu adalah tujuan dari komunikasi itu sendiri, misal*

komunikasi yang dibangun sebagai informasi bagi seluruh masyarakat, maka sasarannya adalah untuk rakyat tersebut, akan tetapi bila informasi hanya untuk kalangan atau kelompok tertentu maka kelompok tersebut merupakan sasaran dari itu sendiri" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

5. Pengelolaan feedback terhadap pesan yang dipublikasikan

Respon audiens apa yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sedang melakukan program kerja penerapan elektronik government di kalangan masyarakat dan juga aparatur pegawai banyak mendapatkan sorotan bagi khalayak. Pasalnya audiens yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara sangatlah aktif atau bisa dikatakan masyarakat ataupun juga aparatur pegawai aktif dalam memantau setiap program kerja yang dilakukan oleh jajaran pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara. Respon khalayak namun pada intinya respon yang kami dapat adalah respon yang positif. Hal ini disampaikan oleh bapak Andri febriadi, Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK Dan Pengembangan e-Government.

"Ya kalau di Penajam sendiri untuk audiens sangat baik dalam melakukan pemantauan terhadap apapun program kerja yang dilakukan oleh jajaran jajaran pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara hal ini juga dilakukan oleh audiens yang banyaknya merespon dan memberikan pesan yang cukup beragam namun pada intinya respon yang kami peroleh merupakan respon positif dari audiens" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

Gambar: 3.12 Instagram Penajam_terkini

Sumber: Instagram @penajam_terkini Diakses pada tanggal 17 januari 2019

Perlunya pengelolaan feedback terhadap apa yang telah didapat dari masyarakat atau apa aparatur pegawai. Pengelolaan feedback di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki cara tersendiri untuk mengelola feedback yang masuk dari masyarakat atau pegawai aparatur. Setiap feedback dipilah berdasarkan kategorinya, lalu bila feedback merupakan wewenang dinas komunikasi dan Informatika dan dapat direspon langsung maka akan segera direspon langsung oleh dinas komunikasi dan informatika.

> *"Pengelolaan feedback kami memiliki beberapa cara untuk mengelolanya yang jelas setiap feedback akan dipilih berdasarkan kategorinya, apabila feedback merupakan wewenang dinas komunikasi dan Informatika dan dapat direspon maka akan direspon langsung oleh dinas komunikasi dan Informatika, apabila feedback berkaitan dengan wewenang dari SKPD lain maka akan disampaikan kepada SKPD yang berwenang. Begitu pula feedback berkaitan dengan kebijakan daerah akan disampaikan kepada atasan seperti bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)*

C. PERENCANAAN KOMUNIKASI E-GOVERNEMENT

1. Perencanaan Komunikator Dalam Program E-government

Pesan dalam sebuah komunikasi terdapat komunikator atau mereka yang menjadi sumber pesan. Komunikator merupakan pihak yang

melakukan komunikasi atau sebagai sumber informasi dan juga pelaku utama dari proses komunikasi. Pentingnya komunikator dalam perencanaan. Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki komunikator dalam menyampaikan pesan dalam melakukan perencanaan komunikasi. Kantor atau Dinas Pemerintahan yang memiliki organisasi khisis yang mengelola TIK. Serta memiliki wewenang yang cukup atau berada dilevel eselon II.

> *"Sebenarnya di Kabupaten Penajam untuk menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat bisa dilakukan oleh semua kalangan namun lebih baik jika dalam penyampaian pesan tersebut di lakukan oleh kantor atau Dinas Pemerintahan yang memiliki organisasi khusus yang mengelola TIK. Serta memiliki wewenang yang cukup atau berada dilevel eselon II". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

Komunikator memiliki peranan penting dan fungsi yang sangat berpengaruh pada sebuah informasi yang akan disampaikan kepada publik masyarakat atau pegawai pemerintahan. Kabupaten Penajam Paser Utara tugas komunikator dalam hal mengidentifikasi sasaran yang ingin ditujuu, menentukan tujuan komunikasi merancang dan menyusun pesan, menentukan metode, memilih saluran komunikasi dan mengukur hasil penyampaian pesan tersebut.

> *"Ya kalau di Penajam sendiri komunikator itu bertugas untuk mengidentifikasi sasaran yang dituju terus menentukan tujuan komunikasi lalu merancang dan menyusun pesan, menentukan metode, memilih saluran komunikasi dan mengukur hasil penyampaian pesan tersebut hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan Dalam strategi komunikasi". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

Gambar 3.13 Agenda sosialisasi

Sumber : Website penajamkab.go.id Diaskses pada tanggal 1 agustus 2018

2. Pesan dalam perencanaan komunikasi.

Dalam melakukan perencanaan komunikasi seperti halnya pesan juga terdapat disebuah perencanaan. Pesan merupakan suatu symbol, informasi, dan makna yang dikomunikasikan oleh seseorang bernama komunikator kepada seseorang lainnya atau kelompok lainnya atau yang bernama komunikan melalui media apasaja. Pemerintah Kabupaten Penajam paser utara juga memiliki sebuah misi pesan dalam melakukan perencanaan komunikasi. Pesan tersbut dimaksudkan kepada semua pihak agar pada perencanaan dan pelaksanaan e-Government dikabupaten penajam paser utara dapat berjalan dengan semestinya dan baik.

> *"Dalam Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, kami menyampaikan dalam perencanaan tersebut ingin berpesan untuk membentuk perencanaan pelaksanaan dan pengembangan e-Government dibutuhkan dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan agar tata kelola e-Government dapat berjalan dengan baik dan semestinya dengan kata lain kami akan memberikan informasi – informasi dengan menggunakan berbagai media dan jaringan". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

Komunikasi atau pesan dalam menyebarkan sebuah informasi, dapat dilakukan dengan berbagi bentuk kegiatan komunikasi. Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyampaikan sebuah informasi kepada Aparatur daerah dan masyarakat tentunya dengan menggunakan dua model komunikasi. Model komunikasi langsung atau verbal dan bisa disebut juga dengan komunikasi tatap muka dilakukan biasanya ketika adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Komunikasi tifak langsung atau non verbal, komunikasi yang memanfaatkan media massa atau media luar ruang biasanya dilakukan saat informasi berupa layanan aduan masyarakat, aplikai khusus aparatur pegawai, serta web site yang menyajikan sebuah informasi tentang daerah.

> *"Kabupaten Penajam sendiri menggunakan model pesan atau komunikasi dengan menggunkan komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi verbal biasanya dilakukan ketika adanya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti sosialisasi e-Gov, komunikasi yang kami gunakan dengan menggunkan komunikasi verbal. Komunikasi non verbal biasnya dilakukan dengan memanfatkan media massa atau media luar ruang seperti koran, website, serta jejaring social yang dapat digunakan oleh Apratur daerah dan masyarakat, kami juga menggunakan penyampaian pesan secara informative, edukatif, dan persuasive untuk menjangkau pesan sampai dimasyarakat" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

> *"contoh dari pesan edukatif yang kiranya nanti kami akan sampaikan yakni mengenai siswa dan siswi atau putra putri daerah yang membanggakan Kabupaten Penajam, pesan informative biasanya kami akan memberikan pesan semisal kegiatan pemerintah yang teah dilaksanakan, lalu pesan persuasive biasanya kami menyampaikan semisal gerakan anti narkoba, pemilu dan semacamnya" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

3. Saluran komunikasi dalam perencanaan

Saluran komunikasi merupakan alat atau media yang di dalam menginformasikan sebuah pesan. Jenis dan bentuk saluran yang digunakan

dalam strategi komunikasi oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni menggunakan saluran personal yaitu menyampaikan pesan secara langsung melalui tatap muka atau dengan kontak langsung, bentuk saluran tersebut seperti telepon chatting surat. Saluran yang digunakan berikutnya yakni saluran non personal adalah penyampaian pesan tanpa melakukan kontak langsung atau tidak bertatap muka bentuk dari saluran ini adalah media massa, website, jejaring sosial, video Tron, spanduk, baliho.

> *"Jenis saluran dan bentuk saluran yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam memaksimalkan cara sendiri yakni saluran-saluran yang sudah ada kami gunakan. seperti saluran personal, saluran ini menyampaikan pesan dengan kontak secara langsung melalui tatap muka, bentuk dari saluran tersebut adalah seperti telepon, chatting, surat, pos, fax, email dan lain-lain. Saluran berikutnya merupakan saluran non personal yaitu menyampaikan pesan tanpa kontak langsung. Saluran ini biasanya berbentuk media massa, media sosial, media luar ruang, baliho, sepanduk, video Tron, website dan lain-lain" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

4. Target sasaran atau komunikan

Dalam melakukan perencanaan tentunya terdapat sebuah target perencanaan. Target sasaran yang dimaksud adalah objek yang nantinya akan mendapatkan atau yang melakukan kegiatan dalam perencanaan Elektronik Goverment tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menetapkan target dari perencanaan tersebut, karyawan dari pemerintah daerah serta kantor atau lembaga yang ada di bawahnya yang akan langsung mengimplementasikan kepada masyarakat.

> *"Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan target perencanaan yakni pemerintah daerah berserta kantor dan lembaga yang ada di bawahnya yang akan diimplementasikan kepada masyarakat umum tidak terkecuali SKPD atau aparatur pemerintah" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

5. Efek pesan dan Feedback komunikan.

Melaukan sebuah aktifitas komunikasi atau tindakan memberi dan menerima sebuah informasi memastikan adanya sebuah perubahan suatu pesan yang dimaknasi secara berbeda beda dari pesan yang satu keseluruh pesan yang ada. Pesan yang mengalir di masyarakat pasti akan dimaknai secara berbeda beda satu dengan yang lainya, hal inlah yang membuat suatu pesan menimbulkan sebuah efek dan feedback. Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa suatu pesan yang mereka sampaikan akan berpengaru pada masyarakat atau dengan kata lain menmbulkan efek dari pesan tersebut. Serta efek dari masyarakat itu lah yang melatarbelakangai sebuah feedback baik atau buruknya suatu pesan. Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempertimbangkan efek pada pesan, efek yang terjadi akan dimenejemn secara baik, untuk feed back sendiri Pemerintah kabupaten Penajam akan merespond dengan cara yang baik dan efesien.

> *"kami tau dan sadar efek dan feedback dari suatu pesan, makanya dari setiap pesan yang akan dipublikasikan akan melalui tahap pengecekan. Lalu dalam mengelola efek kami akan memberikan pesan yang kiranya memajukan suatu daerah itu sendiri. Kalo dalam feedback kami akan berusaha memberikan pelayanan yang baik dan cepat serta dalam segi pelayanan kami akan siap membalas merespond komentar atau hal yang akan dilakukan oleh masyarakat, seperti contoh kami akan membalas komen masyarakat melalui media massa Instagram, Facebook, kolom komen Web dan lainnya" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)*

D. PENERAPAN SISTEM KOMUNIKASI.

Sistem komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki dua bentuk cara yakni dengan mengunakan sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup merupakan cara yang dilakukan dalam memperoleh sebuah informasi atau berita yang dikomunikasikan lebih besar.

"Komunikasi terbuka pada sistem komunikasi ini (tidak rahasisa), peluang pihak lawan untuk memperoleh berita/informasi yang dikomunikasikan lebih besar , dan pendengar yang berhasil memperoleh informasi tersebut dapat langsung memahami. Contoh dari komunikasi terbuka , misalkan seseorang A mengirim berita atau informasi kepada B dalam bentuk teks terang. Apabila ada penyadapan dari luar penyadap langsung memperoleh informasi tersebut. Komunikasi tertutup berita atau informasi sebagai objek transmisi harus ada perlindungan, contoh individua A akan mengirimkan berita rahasia kepada B , maka dalam memnjamin kerahasisan tersbut diperlukanya Teknik enkripsi sedemikian rupa agar pihak lain tidak bisa membaca informasi tersebut" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

Gambar 3.14 Pola penyebaran pesan

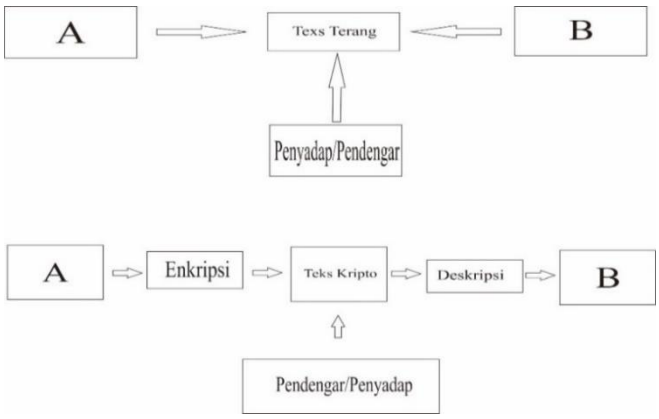

Sumber : Dokumen Dinas Komunikasi dan informatika

Menejerial dalam sistem komunikasi merupakan hal yang penting, pengelolaan sistem tersebut merupakan cara bagaimana instansi pemerintah bisa bertahan dan memberikan informasi atau berita yang berkelanjutan. Kabupaten Penajam Paser Utara juga melakukan pengelolaan sistem, seluruh aparatur pemerintah di wajibkan untuk menjaga dan mengelola sistem komunikasi yang terbuka sedangkan aparatur pemerintah yang memiliki skill atau kualifikasi tersendiri diwajibkan mengelola sitem komunikasi tertutup.

"Seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara baik itu Aparatur Sipil Negara

(ASN) maupun non Aparatur Sipil Negara untuk mengurus bentuk komunikasi terbuka salah satu bentuk keterbukaan itu adalah adanya Web, dan situs jejaring social yang di kelola oleh Pemerintah Penajam , sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi tersendiri dalam mengatur sandi diberikan kepercayaan untuk mengatur komunikasi tertutup" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

Gambar 3.15 Web Pemerintah

Sumber : www.Beritapenajam.net Diakses pada tanggal 28 agustus 2018

Tahapan dalam melakukan sebuah rencana dari sistem – sistem yang bersifat formal dalam sebuah organisasi dalam menetapkan setiap individu dalam penempatan yang tepat disebuah organisasi dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dari orgnisasi atau perusahaan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan menejerial sumber daya manusia (MSDM). Pemerintah Penajam melakukan langkah – langkah identifikasi aktifitas yang akan diadakan lalu mengelompokan aktifitas sesuai dengan sumber daya manusia dan kondisi yang ada untuk menyesuaikan kegitan tersebut lalu ada penugasan terhadap pegawai dalam melaksanakan komunikasi tersebut dam ada koordinasi antar pegawai dilingkunagn Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

> *“langkah – langkah kami dalam melakukan menejerial sumber daya manusia itu di antaranya ada identifikasi aktifitas yang akan diadakan hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nantinya aktifitas yang dilakukan dan bagimana cara melakukanya lalu ada pengelompokan aktifitas sesuai sumber daya manusia dan kondisi yang ada lalu ada penugasan terhadap pegawai dalam melaksanakan komunikasi tersebut dan yang terakhir ada koordinasi antar pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara” (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Pembinaan sebuah sistem komunikasi dari pihak Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan dalam memberikan instruksi dan penjelasan terhadap bagaimana sebuah sistem komunikasi tersebut digunakan dan diaplikasikan. Perintah kabupaten penajam memberikan pendampingan tenaga ahli dalam menjelaskan sistem komunikasi elektronik government guna pengembangan sistem komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten penajam paser utara.

> *"Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara juga memberikan pendampingan tenaga ahli dalam alasan sistem komunikasi elektronik government guna pembangunan sistem komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Keahlian atau kopetensi sumber daya manusia diperlukan dalam menunjang suatu aktifitas, keahlian ini mencakup pengetahuan, persepsi, peran, lingkungan, emosi, dan kondisi fisik. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan pemaparan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang individua atau sumber daya manusia. Mereka menyebutkan bahwa SDM perlu memiliki pengetahaun merupakan faktor utama dalam komunikasi lalu ada persepsi hal ini adalah cara seseorang dalam menfsirkan materi, lalu ada peran dan hubungan adalah proses yang memiliki pengaruh terhadap materi atau permasalahan, lalu ada faktor lingkungan yang memiliki pengaruh dalam kondisi komunikasi, lalu adanya emosi atau reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian dan adanya kondisi fisik yang mempengaruhi kelangsungan komunikasi.

"Pengetahuan, tingkat pengetahuan seorang pegawai menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seorang pegawai dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, akan lebih muda memiliki kata - kata (diksi) untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non verbal kepada penyadap/pendengar. Hal ini berlaku juga untuk seorang penyadap/pendengar. Kurang pendengaran dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan pegawai dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan lalu ada faktor persepsi yang merupakan suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang di olah menjadi sebuah pandangan. Nah pembentukan persepsi ini terjadi pengalaman, harapan, dan perhatian.

"Proses pemahaman manusia dapat menjadi suatu stimulus dan dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pendapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk berkomunikasi. Adanya peran dan hubungan merupakan dan memiliki pengaruh dari sebuah proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan mimpi carakan termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Seorang pegawai yang belum menjalin hubungan dekat dengan pendengar maka akan terjadi komunikasi secara formal. Unsur lingkungan atau faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap interaksi dalam berkomunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Faktor emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. faktor emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri bahkan emosi dapat menjadi hambatan. Yang terakhir adanya faktor kondisi fisik yang mempunyai peran penting berkomunikasi. semua indra memiliki fungsi - fungsi yang digunakan dalam kelangsungan berkomunikasi" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

Gambar 3.16 Kominfo gelar pelatihan

Sumber: http://beritapenajam.net Diakses pada tanggal 28 agustus 2018

Perkembangan sumber daya manusia yang memiliki edukasi yang luas dan pengalaman yang baik serta dapat malakukan dan menggunakan sistem komunikasi berbasis Elektronik Government memberikan suatu kinerja yang positif bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara sumber daya manusia memiliki faktor melandasi suksesnya sistem tersebut. Pemahaman tentang sistem komunikasi dan keilmuan sumber daya manusia dengan didukung penuh dari para pemimpin atau atasan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam kebutuhan penyelenggaraan sistem komunikasi berbasis electronic government.

> *"Pemahaman sumber daya manusia tentang sistem komunikasi serta teknologi yang berkembang dan yang digunakan saat ini serta kualifikasi keilmuan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem komunikasi tersebut dan didukung penuh dari pemimpin atau atasan dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan sistem komunikasi tersebut nantinya selaras dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dengan kebutuhan dalam sistem komunikasi tersebut serta kesadaran sumber daya manusia untuk menggunakan sistem komunikasi berbasis Elektronik Government" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Selain sumber daya manusia unsur lain seperti infrastruktur merupakan unsur yang pentig juga berkenaan dengan bagaimana

pembangunan sebuah layanan masyrakat terlebih lagi pelayanan ini berupa alat elektronik yang tersembung langsung dengan instansi daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam paser Utara sendiri telah membangun jaringan FO atau fiber optic jaringan ini berfungsi sebagai penyambung computer dari satu ke semua jaringan diarea tertentu. Namun dalam pemakaianya pegawai dan instansi Pemerintah Kabu paten Penajam Paser Utara masih belum maksimal.

> *"pembanguanan infrastuktur kami sudah lakukan yakni membangun jaringan FO atau fiber optic untuk menyambungkan semua perangkat computer menjadi sati jarigan di Pemerintahan, namun pemakaian jaringan FO tersebut belum dilaukan secara makasimal oleh pegawai, salah satu foktor tidak maksimalnya tersebut yakni keterbatasan anggaran belanja dalam membangun infrastruktur tersebut" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Selain pembangunan infrastruktur yang ada didalam ligkungan Pemerintah, Kabupaten Penajam juga membangun sebuah infrastruktur bagi masyarakat yakni pembangunan Wi-fi Cornner yang berada dikecamatan Penajam itu sendiri pembangunan ini ditujukan untuk masyrakat terutama anak – anak, remaja, dan dewasa yang sedang mencari tugas atau hal – hal positif lainnya.

> *"pembangunan infrastruktur dimasrakat juga kami telah lakukan yakni pembangunan Wi-fi Cornner yang ada didpan kantor camat penajam, infrastruktur ini bertujuan untuk membantu para adik – adik yang sedang sekolah dalam mencari tugas sekolah mereka namun hal ini belum juga maksimal" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Standarisasi dalam bidang telekomunikasi merupakan hal yang sangat penting. Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan suatu sistem jaringan komonukasi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Standar yang dimiliki oleh sistem komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, masih belum memenuhi standar iso atau standar internasional yang mengatur tentang kelayakan suatu sistem yang digunakan.

> *"Di Kabupaten Penajam Paser Utara sistem komunikasi yang digunakan masih belum memenuhi standar iso dikarenakan tergolong baru dalam penerapan sistem komunikasi berbasis elektronik government mungkin kedepanya Pemerintah Kabupaten Penajam akan menstandarisasi sistem tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

Didalam manajerial sistem komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga melibatkan stakeholder yang terkait didalam pengembangan sebuah sistem komunikasi berbasis Elektronik Government. Stakeholder adalah organisasi atau individual memberikan atau mempengaruhi keputusan, aktivitas dan contoh hasil dari suatu proyek. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan stakeholder secara vertikal dan horizontal, vertikal yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni dengan lembaga pusat Kementrian. Dan secara horizontal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan organisasi perangkat yang berada di lingkungan kabupaten penajam paser utara.

> *"Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sistem ini memiliki keterkaitan antar instansi baik itu instansi vertikal maupun horizontal maksud dari instansi vertikal adalah instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan instansi pusat seperti Kementerian/Lembaga. Yang dimaksud dengan instansi horizontal adalah kantor organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)*

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memeparkan dan menjelaskan analisis penelitian yang telah didapat dari data wawancara, observasi, dan data dokumentasi untuk menjawab sebuah hasil dari implementasi strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Penerapan Program Kerja E-Government yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. ANALISIS KEBIJAKAN KOMUNIKASI

1. Konsep dan tujuan kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi mengharuskan sebuah organisasi untuk tetep taat pada sebuah aturan yang dijalankan, karena sejatinya kebijakan komunikasi dibuat untuk dapat menjadi sebuah pedoman dan fondasi bagi sebuah oraganisasi swasta ataupun organisasi negara. Kebijakan komunikasi juga merupakan awal dari sebuah aktivitas komunikasi sebelum adanya perencanaan komunikasi dan strategi atau implementasi yang akan ditentukan. Kebijakan komunikasi yang tertulis dalam sebuah undang – undang maupun

Peraturan pemerintah provinsi dan diteruskan oleh pemerintah daerah. Kebijakan komunikasi juga dapat bersifat tersirat atau tidak tertulis dalam sebuah undang – undang yang nanti menjadi sebuah norma, nilai ataupun sebuah prinsip. Carl J Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai kebijakan Pemerintah merupakan kegiatan yang memang direncanakan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang dimana mereka menyadari bahwa terdapat hambatan - hambatan yang terjadi serta menyadari adanya kesempatan terhadap pembuatan kebijakan tersebut serta memiliki pencapaian tertentu.

Tujan dari kebijakan yang terbentuk dalam sebuah undang – undang menurut (Cangara, 2014: 83) adalah :

e) Memaksimalkan semua sumber daya komunikasi secara terencana dan tersusun.
f) Nantinya informasi yang didapat akan dikemas dan disebarluaskan sesuai dengan kehidupan sehari – hari.
g) Kebijakan dapat menjadi sebuah motivasi dimasyarakat dalam melakukan sebuah betuk perubahan social.
h) Mempermudah komunikasi dan kerjasama antara sebuah organisasi antar lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta.

Dalam sebuah kebijakan juga memiliki sebuah pola persoalan dalam memformalisasikan kebijakan komunikasi. Pola pertama dalam persoalaan yakni sebuah system komunikasi. System komunikasi adalah suatu keadaan dimana dalam sebuah komukasi antar elemen salaing terhubung atau terintegrasi. Yang kedua adalah sebuah pelayanan dan sumberdaya manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan sebuah kemampuan yang mengendalikan alur komunikasi. Maka dari situlah diperlukanya peningkatan intelektual seperti pengetauan umum dan keterampilan atau skill dari sumber daya manusia yang nantinya akan menunjang sebuah proses peningkatan pelayanan komunikasi. Yang ketiga adalah sebuah riset komunikasi. Riset komunikasi ini bertujauan untuk memberikan sebuah data, fakta dan analisis serta informasi dalam proses pembuatan kebijakan. Riset komunikasi harus diperlukan dengan mengaitkan sebuah pola dari system komunikasi, tujan, kebutuhan masyarakat, dan pengaruh yang didapat oleh masyarakat dalam perubahan yang lebih baik.

Dalam data yang peneliti temukan, kebijakan komunikasi untuk menjalankan program aktivitas komunikasi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada sebuah program E-government tertuang pada sebuah peraturan yang berbentuk isntruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) dan diikuti oleh instruksi Presiden tahun 2003 No 3 dengan tujuan dalam sebuah point nomer 6 yang berisi tentang

pengembangan e-Government yang merupakan daya upaya untuk mengembangkan penyelengaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan sebuah mutu pelayanan public secara efektif dan efisien

(https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4e8dadf24d0c9/node/17187 diakses pada tanggal 21 September 2018)

Selain adanya instruksi Presiden tersebut yang melandasi sebuah program e-Government untuk dijalankan, ada juga perbup atau Peratuaran Bupati nomer 65 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelengaraan komunikasi dan informasi public di Kabupaten Penajam Paser Utara. Ayat 9 Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-Government. Ayat 10 Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. Dan ayat 12 E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

(http://jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan%20Bupati%20No.%2065%20Thn%202016%20-%2 diakses pada tanggal 21 september 2018

Selain peraturan daerah juga terdapat Peratuaran Gubernur No 10 Tahun 2014 yang mengatur tentang system informasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 bab I menyatakan Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Ayat 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian disebut SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ayat 3 Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan ayat 4 e-Government adalah semua hal yang terkait dengan upaya lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi telematika, sehingga mereka dapat menyediakan jasa

layanan elektronik dan informasi yang akurat baik kepada individu maupun lingkungan usaha.

(https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5612fbcdeae14/node/lt49c9c5b72a909/peraturan-gubernur-kalimantan-timur-no-10-tahun-2014-kebijakan-interoperabilitas-sistem-informasi-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-timur diakses pada tanggal 21 september 2018)

Dalam kebijakan yang telah dibentuk dan dirumuskan tersebut dari masing – masing peraturan yang sudah diresmikan dan dijalankan untuk nantinya menjadi pedoman dalam praktek. Praktek yang telah di jalankan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada sumber kebijakan Pemerintah, misalnya dalam pelayaan informasi yang ingin didapat oleh seseorang, Diskominfo selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan terus berusaha mengikuti prosedur dalam pelaksanaanya dan tidak membuat pelayanan menunggu lama dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan yang ingin di dapat oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memang memberikan kemudahan birokrasi.

2. Analisis sumber daya manusia dalam proses pembentukan kebijakan komunikasi

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting yang terdapat dalam kebijakan komunikasi terlebih lagi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat fital dalam keberlangsungan kebijakan tersebut. Permasalahan yang dapat di akibatkan dalam kurangnya sumber daya manusia yakni kebijakan dalam mendayagunakan suatu infrastruktur komunikasi yang berbentuk seperti komunikasi massa ataupun komunikasi antarpribadi yang semuanya tergantung pada sumber daya manusia yang mengoptimalkannya. Pasalnya sumber daya manusia erat kaitanya denga keahlian dari pengelolaan komunikasi itu sendiri. Dikutip dari (Cangara, 2013: 33) menyatakan bahwa peranan lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah tinggi ilmu komunikasi, nantinya dapat diharapkan untuk menyiapkan tenaga – tenaga yang profesionaluntuk mengisi lapangan kerja

di sector komunikasi. Masalah atau persoalan – persoalan pokok dalam memformalisaikan kebijakan komunikasi terdapat suatu elemen yakni sumber daya manusia.

Dalam penemuan dari hasil wawancara dan juga observasi yang didapat dari Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat sebuah kesenjangan keilmuan dan pengetahuan dalam elemen sumber daya manusia. Terlebih lagi aparatur daerah atau SKPD merupakan garda terdepan dalam mensukseskan kebijakan komunikasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam masalah ini SKPD Kabupaten Penajam masih terbilang kurang karena lebih dari 75% SKPD masih belum mengerti dan memahami kebijakan yang buat. Keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti tentang kebijakan E-gov berimbas kepada pendayagunaan dalam aktifitasnya sehai hari. Hal ini bertolak belakang dengan peryataan Edward III yang dikutip oleh (Subarsono : 2011: 92) menyatakan bahwa kebijakan sendiri juga memiliki isi yang jelas dari sebuah rumusan yang dibuat oleh pemerintah serta telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait namun tetap saja terdapat hal yang kurang dari pelaksanaanya.

3. Analisis sosialisasi kebijakan komunikasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang bersifat memplajari suatu kebiasan – kebiasaan dengan meliputi cara – cara hidup. Dikutip dari (Sari, 2009 : 92) menyatakan sosialisasi adalah suatu proses penanaman atau transafer kebiasaan, nilai, aturan, norma dari satu generasi ke generasi lainya yang meliputi semua komponen masyarakat. Sosialisasi dimulai dari sebuah interaksi social secara langsuang ataupun interaksi secara tidak langsung. Dalam prosesnya sosialisasi dapat berlangsung dengan melalui kelompok social, seperti keluarga, sekolah, lingkungan kerja, lingkungan bergaul ataupun media massa.

Pada sosialisasi ini bertujuan untuk membangun sebuah kerja sama antara komunikator dan juga komunikan. Kemudian, melalui sebuah kerja sama yang suda terjalin dengan baik diharapkan komunikan dapat memiliki rasa yang sama dengan komunikator sehingga komunikan tidak hanya mendapatkan hasilnya saja.

Dalam temuan dilapangan peneliti mendapatkan data pada persoalan sosialisasi yang mengharuskan setiap orgaisasi pemerintah atau swasta agar dapat menunjang semua program yang ingin dijalankan. Pada data yang peneliti temui dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam paser Utara sudah didapati adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam sosialisasinya Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku penyelengara serta menjadi komunikator dalam sosialisasi tersebut menekankan dalam penggunaan Web atau situs yang berkaitan dengan kinerja SKPD yang bertujuan untuk memudahkan kinerja pegawai serta membantu dalam kendala waktu. SKPD juga diberikan pengetahuan tentang kebijakan yang berlaku dalam program E-Governement tersebut. Tidak hanya untuk SKPD Pemeritah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang kebijakan tersebut.

4. Analisis SOP yang melandasasi lahirnya kebijakan komunikasi

SOP atau standar oprasinonal prosedur merupakan salah satu landasan atau bila diartikan dengan mudah yakni tatacara dalam membuat suatu kegiatan seperti membuat kebijakan, kegiatan, infrastruktur dan lain – lain. Didalam SOP dapat digambarkan dengan jelas bagaimana langkah – langkah dalam dalam mengelola suatu kegiatan sekaligus memberikan gambaran perananan atau personil pejabat yang melakukannya pada tiap tugas – tugas yang disebut. SOP juga dapat mengurangi proses kerja yang pada akhirnya bermuara pada birokrasi yang panjang dan berbelit – belit agar segera bisa di sederhanakan. SOP sendiri bukanlah hal yang baru dalam tatanan masyarakat di Indonesia. SOP adalah suatu langkah yang sangat berperan penting dengan peningkatan kualitas publik. Standar oprsional prosedur sendiri seperti yang dikatakan oleh (Tanjung dan Subagjo, 2012 : 18) menyatakan kemudahan dan kejelasan efektifitas dan efesiensi serta kelarasan, keterukuran, dinamis, nantinya berpengaruh kepada pengunaan pelayanan terhadap hukum, dan kepastian hukum.

Dalam temuan data yang peneliti peroleh dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Penerapan standar oprasinal prosedur dalam kasus ini merupakan SOP yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi didapti bahwa standar oprasinal prosedur telah digunakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam. Standar oprasinal tersebut mengacu pada peraturan Mentri Komunikasi Dan Informatika pada nomor: 08/per/M.KOMINFO/6/2010.
(https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/254/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+08permkominfo062010+tanggal+01+juni+2010 diakses pada tanggal 13 juli 2018 pukul 09.14 Wita)

Dalam peraturan pemerintah Kabupaten telah melakukan kegiatan dan pelaksanaan dalam pembuatan kebijakan berdasarkan Perpres dan juga SOP yang mengacu pada Peraturan Mentri itu sendiri. Didalam SOP tersebut. Pada bab II pasal 3 menyebutkan bahwa pengembangan lembaga komunikasi sosisal harus menjadikan peraturan ini pedoman. Selain itu pada pasal 4 masih pada bab II menyatakan arahan dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi social agar diarahkan ke- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah; c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan d. membangun masyarakat informasi.

(https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/254/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+08permkominfo062010+tanggal+01+juni+2010 diakses pada tanggal 13 juli 2018 pukul 09.14 Wita)

Dalam pasal yang lain juga menyebutkan tentang perumusan kebijkan seperti pada pasal 7 ayat 1. Selain juga SOP didalam peratutan tersebut terdapat juga pula langkah – langkah dalam melakukan tahapan perumusan kebijakan. Seperti pada bab V pasal 14 ayat 3 menyatkan bimbingan teknis, pengembangan model, penyelengaraan jaringan komunikasi, sarana dan prasarana, workshop,

sarasehan, forum, penyedian bahan – bahan informasi, simulasi aktivitas, kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala, dan studi banding.

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh, Dinas Komunikasi Dan Informatika serta Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku penyelengara. Pemerintah telah melakukan dan sedang menjalankan program sesuai dengan SOP yang berlaku dan merujuk pada Peraturan Mentri Komunikasi Dan Informatika. Hal ini didasari oleh fakta pada pembuatan atau perumusan kebijakan yang menggunakan pedoman atau SOP dari Mentri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Dalam hal lain seperti langkah – langkah atau cara mensukseskan program perumusan kebijakan ini juga berlandaskan dengan SOP yang berlaku hingga saat ini. Dalam contoh langkah – langkah yang sedang dilakukan ada beberapa tahapan atau cara dalam mensukseskan program berdasarkan SOP antara lain. Adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh dinas terhadap SKPD yang menjalankan atau mendapatkan jatah pengoprasionalan kerja. Selanjutnya adanya pengembangan model, lalu adanya penyelengaraan komunikasi dalam pemerintah penajam sendiri pengembangan model komunikasi dilakukan dengan banyak cara salah satunya memanfaatkan internet. Lalu adanya sarana dan prasarana, workshop, sarahsahan forum, penyedian bahan informasi, simulasi aktivitas, kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala, dan studi banding semua langkah tersebut terdapat pada SOP yang dianut oleh DInas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Riset dan evaluasi dalam pencanangan kebijakan komunikasi E-government

Tahapan dalam membangun kebijkan yang tepat selanjutnya adalah evaluasi dan riset. Kemajuan zaman seolah – oleh membuat kita tidak pernah terbebas dari pola yang sangat konsumtif. Kemajauan teknologi tidak bisa kita permasalahakan karena memang hakikatnya setiap tahun pasti terdapat perubahan teknologi serta kemajuannya. Karna kemajuan teknologi itulah teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dari sanalah peran ilmu

pengetahuan dibutuhkan sebagai hasil dari rumus – rumus dan juga teori yang dapat menjadi instrument paling penting di zaman yang modern ini. Maka jangan ragu jika ilmu pengetahuan akan berjalan seiring perkembangan teknologi.

Dalam upaya untuk menyempurnakan kebijakan yag telah berjalan dan berlaku, maka perlunya ada sebuah riset ulang terhadap apa yang sudah diberlakukan dalam kebijakan tujuannya agar dapat mengurangi permasalahan yang telah ada. Dalam literature Paul Leedy dalam (www.lecturer.ukdw.ac.id di akses pada tanggal 14 juni 2018 pukul 22.01 Wita).

Mentakan bahwa riset memiliki 8 karakteristik yakni, riset berasal dari sebuah pertanyaan atau suatu masalah, riset dibutuhkan tujuan yang jelas, riset membutuhkan rencana spesifik, riste memiliki masalah prinsip menjadi beberapa sub-masalah, riset dilakukan berdasarkan masalah atau pertanyaan atau hipotesis yang spesifik, riset memberikan asumsi – asumsi, riset membutuhkan data yang interpretasinya menyelsaikan masalah, riset juga bersifat siklus.

Berdasarkan hasil data yang ditemukan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penejama Paser Utara telah melakukan riset terhadap bagaiamana kebijakan yang sudah terlebih dahulu diteliti. Hasil penelitian tersebut dapat berpengaruh pada rumusan kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan. Dinas Komunikasi Dan Informatika bekerjasama dengan Badan Riset daerah dalam melakukan riset yang diperlukan dalam konteks membantu program kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Evaluasi kebijakan bertujuan agar mencari suatu nilai dari persoalan dan menemukan sebuah solusi yang dapat disempurnakan. Evaluasi juga merupakan sebuah proses analisis yang menekankan pada sebuah penciptaan nilai dari penilaian terhadap rumusan kebijkan atau program kebijakan. Seperti yang di katakana oleh Dye dalam (Parsons, 2008 : 35) menyatakan evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pemerikassan yang objektif, sistimatis, serta empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap target suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang ingin dicapai. Kebijakan public yang

didalamnya terdapat sebuah tujuan yang mengalami hambatan, maka salah satu hal yang menjadi masalah, mengapa suatu kebijakan nantinya perlu adanya evaluasi, apa yang menjadi penyebab, dan bagaimana nanti solusi dari persoalan itu dapat diambil, apakah mungkin kebijakan tersebut dapat dicabut, nantinya akan dilakukan sebuah refurmulasi untuk menjawab persoalan kebijakan lama menjadi kebijakan yang baru. (Parsons, 2008 : 35) melihat realitas dan menyatakan bahwa, evaluasi memiliki dua aspek yang terkandung dan saling berkaitan. Kesatu, evaluasi kebijakan dan kandungan program. Kedua, evaluasi terhadap sumber daya mausia yang terdapat pada organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. ANALISIS PERENCANAAN KOMUNIKASI

6. Komunikator dalam perencanaan komunikasi terhadap program sosialisasi E-government

Dalam merancang sebuah perencanaan komunikasi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan setelah adanya kebijakan komunikasi yang telah dibuat. Beberapa hal yang penting saat merancang sebuah perencanaan komunikasi yakni pentingnya komunikator sebagai pengantar atau penyambung pesan kepada komunikan, yang dimaksud komunikan sendiri yakni sesorang atau kelompok yang mengkomsumsi pesan dari komunikator. Komunikator juga merupakan pelaku utama dalam keberlangsunganya komunikasi. Komunikator juga harus bisa memahami suatu isi pesan atau maksud pesan yang ingin disampaikan agar nantinya pesan tersebut dapat diserap oleh komunikan sebagai sumber da nisi yang sebenarnya.

Sesuai dengan analisa penelitian, ditemukan adanya persamaan antara konsep sebuah teori dan juga realisasi dilapangan dalam menetukan komunikator. Dalam hal ini dan dengan yang sudah dijelaskan pada konsep awal, dimana komunikator agaknya dapat ditentukan dengan menaruh setandar pada kereteria tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terutama Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam menetukan komunikator. Seperti tertuang dalam konsep buku (Cangara, 2013 : 22) menyakatan bahwa

sebagai sebuah komunikator atau orang yang menjadi sumber isi pesan tersebut, seseorang atau kelompok haruslah memiliki 3 syarat utama dalam kualifikasi sebagai seorang komunikator, yang pertama seseorang atau kelompok harus memiliki kepercayaan diri atau (Kredibilitas), yang kedua seseorang atau kelompok harus memiliki daya tarik kuat (Attractive) dan yang ketiga seseorang atau kelompok harus memilki (power) atau kekuatan. Dalam hasil penelitian, pelaku utama dalam komunikator yakni Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang nantinya mereka akan menunjuk seseorang atau kelompok untuk dijadikan komunikator dalam penyamapaian pesan kepada masyarakat melaluai media atau bebrapa program dan aktivitas komunikasi yang dilakukan.

Kepercayaan diri atau Kredibilitas yang dimiliki komunikator dimaksudkan kepada ornag yang memiliki tingkat dipercaya atau kepercayaan pada komunikian yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh. Contoh dalam sebuah kegiatan perkenalan atau sosialisasi aplikasi untuk bertujuan masyarakt dapat mengkontrol kewajiban pajak, Dinas komunikasi akan mengandeng developer sebagai komunikator dan juga Dinas Perpajakan untuk dapat bergabung dalam sosialisasi tersebut. Daya Tarik atau Attractive, disini yang dimaksud dengan daya Tarik yakni berupa penampilan, seperti pakaian, fisik, dan sikap yang dapat menyesuaikan diri saat memang diminta untuk mengisi acara atau program yang lainya. Contohnya dalam memperingati hari raya idul fitri dipilihlah Bupati sebagai model untuk menggunakan pakaian muslim yang nantinya akan dimuat diberbagai media seperti koran, web, Instagram, facebook dan lainya. Dan yang terakir yakni kekuatan atau Power atau mereka yang memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Seperti Bupati, tokoh agama, komunitas, Kepala Dinas dan lain lain.

Dalam tugasnya komunikator yang telah dipilih dari pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas untuk mengidentifikasi sasaan yang akan dituju dalam pesan tersebut. Dalam hal lain komunikator juga bertugas untuk melakukan perencangan pesan agar

nantinya pesan yang disampaikan dapat langsung mudah difahami oleh komunikan, komunikator juga memiliki tugas penting untuk menentukan sebuah metode dalam penyebaran pesan nantinya metode yang digunakan dapat memudahkan komunikator dalam melakuigunakan dapat memudahkan komunikator dalam melakukan tugasnya.

7. Perencanaan pesan dalam program E-government

Pesan merupakan sebuah informasi yang nanti disampaikan oleh seseorang dalam bentuk sebuah symbol yang memiliki persepsi dan dapat diterima dimasyarakat dalam kemajemukan makna. Pesan juga dapat diartikan hal yang disampaikan oleh komunikator dalam cara berkomunikasi Penyampaian pesan memilki du acara penyampaian yakni penyampaian pesan yakni pesan verbal adalah pesan yang disampaikan secara langsung dengan menggunkan bahasa, bahasa sendiri merupakan kumpulan dari berbagai macam kata – kata yang disatukan menjadi paragraph dan dijadisatukan lagi menjadi bahasa atau kalimat yang tentu memilki symbol dan arti. Cara yang kedua adalah penyampaian pesan secara non verbal yakni penyampaian bahasa yang menggunakan isyarat seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh dan lain sebagainya.

Dalam analisis penlitian, perencanaan pesan yang nantinya akan diberikan kepada sasaran komunikator sesuai dengan konsep teori yang diterapkan oleh peneliti. Dalam konsep teori tersebut, konsep perencanaan komunikasi pesan dilakakuan dengan menyusun pesan yang nantinya dapat dimengerti oleh komunikan, orang atau kelompok yang menjadi sasaran dari komunikator. Pesan memilki sifat dari pesan itu sendiri, pesan memiliki tiga sifat yakni pesan informatif merupakan pesan yang hanya berfokus untuk pemberitaan saja tanpa ada hal – hal yang lain seperti maksud dan tujuan lain dari penyampaian pesan itu sendiri. Sifat pesan yang selanjutnya yakni edukatif, dimana pesan ini menyajikan informasi pelajaran atau edukasi yang disajikan oleh komunikator sendiri. Sifat pesan yang selanjutnya yakni pesan persuasive, pesan diman informasi yang diberikan oleh komunikator dapat berupa ajakan atau pesan yang memilki pengaruh sikap terhadap khalayak.

Data yang didapat oleh peneliti menyatakan bahwa pesan yang disampaikan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terkhusus Dinas Komunukasi Dan Informatika adalah menggunakan pesan secara umum yakni verbal dan non verbal serta secara khusus menggunkan sifat pesan yang informative, edukatif, dan persuasive dalam menyampaikan pesan yang dimana untuk memperkenalkan pelaksanaan e-Government di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pesan yang akan disampaikan nantinya akan disebarkan melalui banyak media dan jaringan, terutama pesan yang mengajak atau menghimbau untuk mensukseskan E-government itu sendiri. Menggunakan pesan secara verbal dan non verbal juga dilakukan dalam pesan yang akan disampaikan berupa pesan informative, edukatif dan persuasive. Kabupaten Penajam Paser Utara memang menyadari bahwa pentingnya sebuah pean yang akan disampaikan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh Pemerintaha Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan bisa berjalan dengan baik pada saat pengimplementasiaanya nanti, setidaknya itu yang diharapkan oleh Bapak Siswanto sebagai Kepala Bidang Informasi komunikasi Publikasi dan Kehumasan.

Sejalan dengan data – data yang didapat oleh peneliti, konsep dalam merencanakan sebuah pesan berserta bagaimana pesan yang akan dipublis sejaln dengan teori yang ada. Dalam teori perlu adanya pesan Informatif, edukatif, dan persuasive akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. dari peneliti berpendapat agar pesan yang nantinya akan disampaikan bisa benar – benar tertuju pada sasaran yang mengkomsumsinya. Selain itu diharapkan pesan agar dapat mempengaruhi khalayak dan tidak Cuma mementingkan pesan yang aneh dan tidak jelas. Serta pesan agaknya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan tidak terkecuali para disabilitas seperti yang di ungkapkan oleh (Uchjana, 2007 : 22) yang mengatakan pesan dapat berupa symbol – symbol dalam hal ini penulis ingin menggaris bawahi pesan non verbal yakni “non verbal bisa juga dalam bentuk gerak, lukisan dan isyarat.

8. **Perencanaan saluran atau media yang akan digunakan dalam aktifitas komunikasi E-government**

Perencanaan mesia adalah sebuah aktivitas yang sangat penting dalam hal promosi serta kegiatan publikasi. Dan memang sering kali ditemukan sebuah aktifitas promosi atau publikasi yang kurang dan terkesan menghambur hamburkan anggaran serta tidak memiliki benefit yang diinginkan. Guna dari sebuah perencanaan media tidak lain tidak bukan untuk mengasilkan sebuah komunikasi secara baik dan menadapatkan perhatian secara besar dikhalayak atau masyarakat. Komunikasi dalam bentuk media massa, atau disaat ini dikenal sebagai komunikasi massa telah banyak didefinisikan secara akademis seperti yang dikatakan oleh Bittner dalam (Imran, 2012 : 32) menyatakan komunikasi massa dilakukan dengan media massa yang sangat besar. dalam artian komunikasi massa pada dasarnya, komunikasi dilakukan kepada organisasi yang besar dan mencakup pada komunikan yang besar atau luas. Pemilihan sebuah media massa juga merupakan hal yang sangat penting dalam menyalurkan pesan kepada masyarakat luas. Pemilihan sebuah media untuk meyalurkan pesan berpengaruh terhadap sebuah efektabilitas dan efesiensi waktu yang terdapat dimasyarakat. Perencanaan media berarti kita akan membicarakan tentang bagaimana media dapat berperan penting dalam pendistribusian pesan yang akan bermuara pada masyarakat. Tak hanya itu kita akan membicarakan seberapa sulit atau mudahnya penyampaian pesan melalui media.

Dalam analisis penelitian yang dilakukan di Kabupaten Penajam paser Utara, peneliti melihat tepatnya Pemerintah menggunakan sebuah media dalam penyampaian pesan. Kabupaten penajam paser utara sendiri merencanakan penyaluran pesan akan dilaksanakan atau disampaikan melalui banyak media contohnya web, Instagram, facebook, baliho, sepanduk dan media luar ruang lain hal ini dilakukan karena memperkirakan efektifitas media luar ruang yang semakin menarik dan murah. Selain itu Kabupaten Penajam Paser Utara juga menggunakan saluran personal, saluran personal ini biasnya dilakukan saat memang kondisi komunikator dan situasi tidak berada tempatnya saluran personal

ini berupa surat, email, fax, dan pos. pemerintah akan mengirimkan surat edaran biasanya diberikan kepada seluruh kepala desa untuk dapat mengetahuai sebuah pesan yang akan diketahui oleh masyarakat.

Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa pentingnya diera digitalisasi sekarang untuk memanfaatkan sebuah media dan saluran berbasis internet. Dalam media baru seperti sekarang memang menampilkan atau menyajikan banyak sekali platform untuk mempublikasikan suatu hal secara luas dan tidak terbatas waktu serta tempat hal ini berhubungan dengan program yang berjalan seperti E-government. Media elektronik menjadi salah satu idola bagi para lembaga untuk membuat sebuh citra dan juga hasil kerja mereka diketahui secara luas. Kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak lupa pada media yang memang memiliki suatu fungsi yang menanamkan keindahan jika ditempatkan secara tersetruktur seperti media luar ruang video tron, baliho, sepanduk dan lainya.

9. Perencanaan komunikan sebagai sebuah target program E-government

Pada saat melakukan sebuah komunikasi atau melakukan sebuah aktivitas mengelola dan menerima pesan komunikan merupakan actor dari sebuah proses komunikasi itu. Komunikasi memang diperlukanya seorang komunikator atau penyebar berita dan pesan namun perlu diingat bahwa ada komunikan yang akan menentukan sebuah keberhasilan suatu pesan tersebut. Komunikan adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan atau informasi dari komunikator melalui berbagai macam media dan saluran. Komunikan dapat dikatagorikan seperti hanya media atau saluran. Komunikan terdapat dua katagori yang dapat membedakan yakni komunikan yang aktif atau komunikan yang pasif. Komunikan pasif adalah komunikan yang memang hanya menerima atau merespond sebuah pesan dari satu arah dan tidak memberikan tanggapan atau feedback kepada seorang komunikator. Sedangakan komunikan aktif merupakan komunikan yang menerima pesan dan merespond pesan serta memberikan sebuah feedback terhadap suatu pesan yang disajikan oleh komunikator.

Dalam penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebuah perencanaan dalam menempatkan sasaran merupakan salah satu cara agar pesan yang disampaikan memang langsung tertuju pada pihak atau audiens yang merasa memiliki keterkaitan atau hal yang memang bersinggungan dengan pesan. Peerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memang memilki target sasaran yakni masyarakat umum dan juga aparatur sipil. Pemerintah Kabupaten Penajam juga memiliki kekhususan saat menyampaikan pesan untuk nantinya komunikan bisa langsung tertuju pada pesan tersebut. Pesan yang memiliki informasi juga dibuat terkhususkan sesuai dengan kreteria komunikan yang akan disajikan nanti.

Namun peneliti mendapati kesenjagan antara pesan yang ingin disampaikan dengan sasaran atau komunikan yang ingin dicapai dalam data yang didapat menunjukan bahwa Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara belum lebih sepesifik terhadap pesan yang akan disampaikan kepada khalayak dikarenakan Kabupaten Penajam masih belum mengklasifikasi usia dan pekerjaan para komunikan yang akan diberikan informasi tersebut membuat pesan yang disampaikan terkesan sangat umum dan belum bisa menjamah para sasaran seperti anak sekolah, remaja akhir, dan orang tua.

10. Perencanaan sebuah feedback dimasyrakat oleh program e-Government

Berbicara sebuah layanan berarti kita juga membicarakan adanya feedback. Adanya pesan yang ditulis atau disajikan lewat bermacam media memastikan adanya sebuah feedback. Feedback sendiri memiliki adalah sebuah tanggapan yang dilayangkan oleh komunikan atau khalayak kepada komunikator atau sumber pada sebuah pesan. Dalam feedbeck sendiri memuat berbagai macam pesan balik oleh komunikan atau khalayak, pesan tersebut dapat berupa tanggapan negative ataupun tanggapan yang positive. Feedbeck juga merupakan unsur yang dapat menilai sebuah komunikasi yang telah dilakukan. Feedback dapat berdampak sebuah program yang sedang dijalankan oleh lembaga pemerintah terlebih lagi jika program tersebut berkaitan dengan banyak pihak. Seperti yang

dikatakan oleh Harold Laswell dalam (Mulyana, 2007 : 69-71) menyatakan bahwa komunikasi dari sebuh pesan yang disalmpaikan oleh komunikator nantinya diharapkan memberikan sebuah efek atau feedbeck dari seorang komunikan

Dalam temuan data yang didapat oleh peneliti dari objek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara didapati adanya perencanaan pengelolan feedback yang dilaukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap suatu pesan yang disampaikan melalui komunikator mereka. Pesan atau informasi yang mereka sampaikan kepada seluruh masyarakat dan mendapati sebuah feedback dari masyarakat juga akan direspond dan ditanggapi dengan baik agar tidak terjadi masalah yang berlanjut dikemudian hari. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa dalam suatu pesan mereka akan mendapati sebuah efek dan feedback dimasrakat, sperti hukum alam yakni ada sebab aka nada akibat. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merencanakan sebuah pengelolan feedback seperti contoh, ketika pesan dipublikasikan dimedia massa seperti internet dengan bermacam – macam platform, Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara berusaha akan membalas sebuah tanggapan masyarakat melalui kolom komentar yang tersedia diplatfom tersebut atau bahkan mereka akan membuat sebuah pesan baru yang nantinya akan dipublikasikan melalui media massa internet itu sendiri sebagai balasan dari banyaknya feedback dimasyarakat terhadap suatu pesan yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Penajam paser Utara juga berusaha merespond dengan cara yang baik dan sopan agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan antara pihak oposisi dengan pihak masyarakat.

Dalam pembahasan ini peneliti merasa bahwa rencana pengelolan sebuah feedback yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat dikatakan tepat dalam menangulangi adanya feedback yang memang disatu sisi bisa menjadikan bahan evaluasi atau bahkan bisa membuat suatu program dapat dikatakan gagal. Peneliti menyarankan dalam sebuah perencanaan feedback terlebih lagi jika adanya feedback yang negative dalam menjalankan program, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih menekankan untuk masyarakat

dapat memahami pesan, dan untuk para tim dari Dinas Komunikasi Dan Informatika yang bertanggung jawab atas pesan diharapkan untuk dapat merespond secara cepat agar tidak terjadi masalah mengingat sebuah respond yang cepat tersebut akan berhubungan dengan kinerja para lembaga pemerintahan disaat ini terutama dimata masyarakat dinilai kurang dalam menanggapi adanya sebuah feedback.

3. ANALISIS SYSTEM KOMUNIKASI E-GOVERNMENT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3. Analisis bentuk system komunikasi e-Government Kabupaten Penejam Paser Utara

Bentuk pola komunikasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia pola diartikan sebahai sebuah system atau tatacara kerja. Dalam literature lain yang lebih modern dinyatakan oleh Katz dan Khan dalam (Mulyana, 2013 : 174) mengartikan

> "pola komunikasi sebagai keadaan atau urusan yang teratur mengindikasikan komunikasi yang dibangung antara anggota system tersbut dibatasi".

Pentingnya suatu komunikasi tidak berdasar pada suatu ubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, namun juga komunikasi berperan penting bagi individu yang memilki jabatan kepemimpinan dengan masyarakat disuatu lembaga institusi daerah. Teknik berkomunikasi yang menyebabkan itu menjadi lancar dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan bukan berdasarkan dengan keadaan ekomoni saja namun juga sangat tergantung pada pola komunikasi yang digunakan dalam organisasi atau lembaga guna menghunbungkan antara kemauan lembaga atau masyarakat yang saling terhubung.

Dalam penemuan data dari penelitian yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati pada system komunikasi yang

dilaksanakan dalam program e-Government menunjukan bahwa adanya pola komunikasi yang diterapkan. Kabupaten Penajam Paser Utara secara tegas menyatakan menggunkan system atau pola komunikasi terbuka dan tertutup dalam menyebarkan atau mendistribusikan pesan atau berkomunikasi secara masal antara pimpinan serta karyawan atau SKPD. Pola komunikasi terbuka yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup pesan yang sangat dapat segera diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat, serta pesan yang memang dipublikasikan diniatkan secara besar dan luas keseluruh daerah, dengan harapan semua masyarakat bisa memperoleh informasi tersebut secara langsung dan dapat memahaminya.

Contoh dari keterbukan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta dengan pola komunikasi yang memang dizaman sekarang mengharuskan adanya keterbukan informasi dan pesan memberikan bantuan terhadap masyarakat luas. Beberapa contoh yag dierikan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membangun pola komunikasi terbuka adalah ketika seseorang berinisial A dalam memngolal berita atau informasi lalu mengirimkan berita atau informasi itu sendiri kepada pihak B dan dalam bentuk teks terang, merupakan pola komunikasi terbuka yang dikembangan hingga saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan Program kerja e-government.

Komunikasi dalam bentuk lain pun juga digunakan dalam berkomunikasi didalam Pemeritahan kabupaten Penajam Paser Utara. Pola komunikasi tertutup merupakan system dari penerapan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan program kerja e-Governmnet. Pola komunikasi ini menutupi suatu pesan yang memang dirasa rahasia oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga sampai pada kepala lembaga tidak akan memberikan informasi yang rahasia tersbut kepada karyawan atau SKPD. Pola komunikasi ini diras penting mengingat bahwa ada memang informasi yang boleh dan harus diberitahukan atau dikonsumsi oleh masyarakat ada pula informasi yang sangat rahasia dan tidak boleh dipublikasi hal ini juga

yang membatasi antara keterbebasan informasi yang harus dilakukan dan kerahasian informasi yang harus dijaga.

Contoh dari pola komunikasi tertutup dalam Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membuat beberapa pesan tidak dapat banyak dikonsumsi berlebihan secara masal. Kabupaten Penajam Paser Utara juga memberikan contoh dari pola tertutup tersebut yakni ketika seorang berinisial A akan mengirimkan suatu berita atau informasi yang telah diolah sedemikian rupa dan pesan tersebut merupakan pesan yang sangat rahasia dalam pemberitaan maka seorang A akan mengirim pesan kesorang B akan mendapat sebuah jaminan kerahasian, kerahasian ini akan ditulis melalui suatu symbol secara tersetruktur hingga pihak yang lain tidak dapat membaca suatu informasi tersebut.

Secara keseluruhan dalam system komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara teori yang dinyatakan oleh Katz dan Khan dalam Deddy Mulyana 2013 secara tendensi sudah benar karena memang pola komunikasi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dilakukan secara horizontal dan vertical dalam masksud horizontal merupakan system atau pola komunikasi yang dilakukan sudah beruntut pada pemilik kewenangan kepada masyarakat. Secara vertical pemerintah sudah melakukan system atau pola komunikasi secara lembaga ke lembaga dengan melakukan teknik pola komunikasi yang tertutup. Hal ini memang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan serta urgensi yang ada.

Dalam data yang sama peneliti mendapati keterangan bahwa seluruh pegawai negri sipil yang berada diruanglingkup kantor dinas atau mereka yang bekerja untuk departemen – departemen yang ada dipemerintahan agar mengurus dan berpartisipasi dalam komunikasi terbuka salah satunya dengan mengurus komunikasi terbuka dalam bidang media massa berbasis internet seperti Web, dan media sosial yang lainnya. Serta teruntuk pegawai negeri sipil yang memiliki kulifikasi dalam mengatur pesan sandi agar dapat mempercayakan pesan tersebut dalam mengatur komunikasi yang tertutup.

4. Mejerial sumber daya manusia dalam system e-Government

Tindakan menejerial atau menejemen suatu hal merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari – hari mulai dari memenejerial jadwal, menejerial keuangan, menejerial waktu dan lain-lain. Dalam pembahasan ini peneliti akan membicarakan atau membahas tentang bagaimana disuatu system komunikasi dalam bidang program e-Government Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati adanya menejerial sumber daya manusia. Berkenaan dengan itu kita akan membahas bagaimana peran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menejerial suatu massa. Menejemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan MSDM merupakan praktik mengatur manusia atau sumberdaya yang dimiliki disuatu organisasi, lembaga, atau instansi. Beberapa definisi dari MSDM ini diantara lain yang ditulis oleh Schuler, Dowling, Smart dan Huber dalam (Priyono dan Marnis, 2008 : 112) mengatakan menejemen sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan MSDM merupakan sebuah pengakuan tentang bagaimana pentingnya tenaga kerja dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memberikan adanya kontribusi dalam mencapai sebuah tujuan

Sumber daya manusia juga memiliki fungsi yang penting dalam buku yang ditulis oleh (Priyono dan Marnis, 2008 : 124) menyatakan terdapat lima fungsi yakni, *pertama* fungsi perencanaan MSDM yang menjelaskan tentang perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi dalam jangka waktu yang terbatas maupun dengan jangaka waktu yang tidak di tentukan serta adanya analisis jabatan dalam suatu organisasi bertujuan menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. *Kedua* merupakan staffing yang merupakan perekrutmen calon dan pelamar pekerjaan serta pemilihan para calon atau pelamar yang dirasa dan dinilai dapat memenuhi syarat. *Ketiga* penilaian kerja merupakan aktifitas yang ditujukan oleh calon dan

peamar pekerjaan. *Keempat* perbaikan kualitas kerja merupakan kegitan strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas fisik atau non fisik dilingkungan pekerjaan. *Kelima* pencapaian efektifitas kerja dimana aktivitas ini merupakan mengakui, melakukan sebuah rasahormat, tawarmenawar, penelitian tentang semua kegiatan SDM.

Dalam temuan data yang dimiliki oleh peneliti tentang MSDM, terdapat banyak sekali bagaimana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan serangkaian aktifitas. Aktifitas tersebut yakni mengidentifikasi suatu aktifitas SDM dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana nantinya aktifitas tersebut dilakukan serta bagaimana cara manusia dan kondisi yang ada, untuk menetapkan atau memberikan tugas pada pegawai dalam melaksanakan komunikasi tersebut. Dalam hal ini Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan identifikasi aktifitas terhadap pegawai, hal ini ditujukan agar mereka nantinya bisa ditempatkan dalam tugas apapun yang diberikan dalam melakukan sebuah komunikasi didalam lembaga. Sangatlah penting bagai sebuah instansi atau lembaga untuk dapat mengidentifikasi karyawan yang memang dalam penempatanya tidak terjadi sebuah kesalahan yang mendasar. Seperti contoh ketika lembaga atau instansi tidak mengidentifikasi kemampuan seorang karyawan dan mereka membutuhkan tenaga karyawan dalam mengurus sebuah komunikasi massa, lalu lembaga atau instansi tersbut tidak fikir panjang dalam menetapkan karyawan tersebut yang memang tidak memilki dasar sebagai komunikator atau pelaksana komunikasi maka akan terjadi sutu hal yang negative dimana lembaga akan mendapatkan kegagalan yang sangat tinggi dalam menjalankan program komunikasi.

Dari data yang selanjutnya, diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bahasan pengelolaan sumber daya manusia didapati bahwa Pemerintah Kabuaten Penajam Paser Utara memberikan pendangpingan karyawan. Pendampingan karyawan disini dimakasudkan yakni memberikan pendampingan tenaga ahli dalam mengelola sebuah system komunikasi berbasis elektronik government. Pendampingan ini juga merupakan langkah awal dalam

memeberikan sebuah ilmu pengetahuan bagi pegawai Pemerintah. Dalam alasanya Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan tenaga ahli selain memberikan ilmu tambahan bagipegawai juga diharapkan dalam kerjasamanya nanti Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengharap agar Kabupaten tersbut dapat berkmebang dan berjalan secepat mungkin dalam mengejar ketertinggalan teknologi di Kabupaten yang ada di Indonesia. Mengapa peneliti menulis seperti itu karena dalam observasi yang dilakaukan terutama melihat sebuah program yang berbasiskan elektronik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dirasa sangta kurang dalam melakukan inovasi. Kita ambil contoh Kabupaten bogor dalam membangun program the most loveable city yang dimana juga menyangkut e-government serta menyinggung persolan alam dibandingkan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan program kerja masih tergolong rendah dalam menginovasi program. Dari sinilah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan pendampingan dari tenga ahli.

Dalam data lain yang menyangkut dengan sumber daya manusia. Data yang diambil dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang bagaimana SDM mampu memiliki ilmu pengetahuan dalam hal system komunikasi. Data yang didapat menjelaskan, tingkat pengetahuan merupakan factor utama bagai pegawai dalam hal pekerjaan (komunikasi). Seorang pegawai diharuskan dapat menyampaikan pesan dengan mudah serta mengerti dalam melakukan pendekatan apabila ia memiliki pengetahuan yang luas, setidaknya itu yang diungkapkan oleh Kepala Bidang, Bapak Masrani.

Beliau juga mengatakan hal yang sama ketika seorang komunikan haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar dapat menerima pesan yang disampaikan. Perlunya seorang pegawai untuk mendengar juga merupaan salah satu factor kelemahan pegawai dalam menginterpretasikan informasi secara baik. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menyadari bahwa tidak mudah dalam meningkatkan keilmuan para pegawai, Pemrintah secara sadar melihat bahwa suatu pesan dapat menjadi suatu persepsi yang berbeda-beda. Pemerintah juga menyampaikan factor lingkungan dapat mempengaruhi suatu pola

komunikasi internal dalam lembaga. Lingkungan yang kondusif dapat mengakibatkan komunikasi berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya lingkugan yang kurang mendukung dapat mengakibatkan pola komunikasi berlangsung secara tidak baik. Faktor lingkungan akan berdampak dengan factor emosi dan reaksi seseorag dalam suatu proses kejadian tertentu. Emosi ini terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Factor emosi tersbut bisa berbuah buruk dan menjadi hambatan dalam melakukan pola komunikasi secar internal lembaga. Dan yang terakhir dalam bagian ini adanya keterbatasan fisik, factor fisik dapat menyebabkan pola komunikasi terhambat. Peran pentin dari suatu indra merupakan hal yang dapat menunjang pola komunikasi yang baik. Hal ini juga disadari oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. terkadang berbagai banyak polemic didalam suatu instansi membuat lembaga tersebut susah dalam berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia yang memiliki edukasi atau tingkat keilmuan dalam suatu bidang terutama bidang komunikasi akan sangat membantu lembaga dalam menjalankan program serta perkembangan lembaga dalam melakukan program yang akan datang, pemahaman pegawai terhadap system komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memang kurang berkualitas namun, Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara sadar akan bagaimana teknologi dan kualifikasi keilmuan sumber daya manusia yang memang baik akan selaras terhadap system komunikasi yang baik juga.

Peneliti menganalisa bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta bagaimana pengelolan atau memenejemen sumber daya manusia tersebut memang banyak ditemukan kurangya sumber daya manusia yang mengerti tentang system komunikasi, dari sini kita bisa melihat bahwa dasar keilmuan yang dimiliki pegawai dalam pekerjaan dibidang lembaga terutama pegawai yang memegang peran penting dalam membangun system komunikasi harus memilki kualifikasi khusus. Peneliti menemui beberapa ketidak cockan antara konsep awal dengan temuan yang ada dilapangan, peneliti rasa bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

sudah tepat dalam melakukan menejerial sumber daya manusia dilihat dari konsep yng mengatakan bahwa perlunya adanya perencanaan sumber daya manusia, hal ini dilaukan dalam Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni melakukan pengidentifikasian serta pencocokan pegawai terhadap penempatan yang akan mereka lakukan.

Hal ini juga masuk dalam poin dua pada konsep awal yang mengatakan bahwa melakukan rekrutment atau staffing. Temuan yang lain yakni ketika konsep awal mengatakan bahwa meningkatkan kulitas kerja, hal ini juga telah dilakukan oleh Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan kelimuan yang dimiliki oleh pegawai lembaga tersbut. Program tersebut melibatkan ahli dalam bidang system komunikasi untuk memberikan edukasi terhadap pegawai yang dirasa memiliki tanggung jawab terhadap pentingnya system komunikasi tersebut. Namun ada satu yang tidak ditemukan dalam temuan data Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai serta dalam memebrikan pengahargaan terhadap pegawai yang memiliki prestasi. Hal ini memang terlihat sederhana namun dibaik kesederhanaanya tersebut tersmpin nilai nilai menghargai serta tantangan terhadap pegawai yang dimana memang seharusnya mereka agaknya harus diberikan tantangan serta pengahargaan bertujuan untuk meningkatkan kulitas kerja serta inovasi dikalangan pegawai.

5. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara.

Pesatnya perkembangan zaman yang berimbas pada kemajuan suatu teknologi serta informasi dalam berbagai bidang, termasuk perkembangan infrastruktur jaringan komunikasi yang dimana semakin hari sebuah informasi atau berita sangat cepat didapat serta tidak mengenal waktu. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan cara bagaimana suatu daerah dapat memperbaiki proses ekonomi dan lembaga demi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera. Menurut Setiadi, 2006 dalam jurnal (Warsilan dan Noor, 2015 : 359) menyatakan

> “infrastruktur merupakan pra-syarat bagi sector – sector lain untuk berkembang dan juga sarana serta merupakan cara untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya”.

Infrastruktur jaringan yang memang berpengaruh pada program kerja e-Governmnet Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus dibangun dengan baik. Pembangunan infrastruktur komunikasi diberbagai lingkungan kerja seperti dilembaga atau instansi menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah daerah dengan demikian kedepanya pembangunan infrastruktur komunikasi dapat memberikan dampak positif bagai para pegawai serta masyaaat luas pada umumnya.

Pada temuan data yang dimiliki oleh peneliti terhadap objek Perintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah didapati hasil pada pembangunan infrastruktur komunikasi. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun infrastruktur komunikasi pada lingkungan kantor dinas yakni telah dibangunnya jaringan FO atau yang dikenal dengan fiber optic, fiber optic sendiri merupakan jaringan kabal yang dapat menghubungkan satu computer dengan computer yang lainnya pada daerah yang telah di tentukan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan bahwa pada pembangunan infrastruktur ini terdapat kendala, yakni kurangnya anggaran belanja Perintah dalam membagun infrastruktur tersebut. Hal ini menyebabkan ketidak maksimalan terhadap infrastruktur tersebut dan berimbas pada kinerja pegawai yang pada saat ini dibutuhkan kerja yang cepat dan efisien. Hingga sekarang pembangunan infrastruktur jaringan FO tersebut belum ada perubahan yang berarti.

Selain pembangunan jaringan FO dilingkungan kantor dinas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga membangun infrastruktur bagi masyarakat. Pembangunan Wifi-cornner yang ditujukan untuk masyrakat juga telah dibangun, pembangunan infrastruktur masyarakat ini bertujuan agar para masyarakat dapat menikmati akses Wifi atau internet secara murah dan nyaman. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur ini menemui ketidak maksimalan penggunaan, pembangunan yang infrastruktur Wifi-cornner tersebut terletak

didepan kantor camat Penajam yang peneliti lihat secara observasi tempat tersebut sangat sepi dan jauh dari jangkauan anak – anak pelajar.

Melihat dari konsep awal bagaimana teori yang mengatakan infrastruktur merupakan syarat bagi masyarakat untuk berkembang, Permerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun infrastruktur tersebut. Pembangunan jaringan FO dilingkungan kantor dinas yang diperuntukan untuk memaksimalkan kerja para pegawai dalam program kerja Pemerintah yang bernama e-Governmnet, serta pembangunan infrastruktur Wifi-cornner untuk masyarakat umum dengan masyarakat bisa menikmati akses internet dengan murah merupakan pembangunan yang dirasa tepat. Peneliti merasa sudah tepat Pemerinth Penajam Paser Utara dalam membangun infrastruktur tersebut namun peneliti mendapati beberapa hal yang dirasa sangat kurang. Hal yang pertama pemaksimalan terhadap suatu infrastruktur yang ada didalam lingkungan kantor dinas merupakan hal yang sia–sia jika tidak dipergunakan, pasalnya dalam membangun infrastruktur komunikasi tersbut menggunkan anggaran yang didapat dari masyarakat serta nantinya pegawai tidak bisa semaksimal mungkin mengurus sesuatu yang berbau dengan teknologi komunikasi, hal ini juga akan berimbas pada program kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bernama e-Government.

Hal yang kedua yakni infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat, yakni infrastruktur Wifi-cornner yang berada didepan kantor kecamatan Penajam. Peneliti mendapati bahwa pembanguan infrastruktur tersebut menemui kurnagnya pengoptimalan fungsi. Membangun infrastruktur juga harus melihat target sasaran serta tempat atau lingkungan sekitar, peneliti merasa pembangunan Wifi-corrner tersebut kurang tepat jika dibangun dan ditempatkan didepan kantor kecamatan Penajam, peneliti dalam observasi meilihat bahwa lingkungan disekitar tidak mendukung karena salain dimalam hari yang kurang dengan lampu yang menyala tempat tersebut sangat sepi dan kurang peminatan. Dari situlah kurang pemaksilan terhadap infrastruktur komunikasi dimasyarakat. Bahkan dalam observasi peneliti yang baru didapati bahwa infrastruktur berupa bangunan Wifi-cornner tersebut

telah dibongkar karena adanya renovasi kantor kecamatan yang baru. Sangat disayangkan jika memang penggunaan infrastruktur komunikasi yang telah dibangun dibongkar kembali. Maka dari situlah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membangun infrastruktur pembangunan terlebih lagi infrastruktur komunikasi harus memandang jauh kedepan bagaimana nanti dimasa yang akan datang infrastruktur tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

6. Standarisasi system komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam progam kerja e-Government

Dalam bidang komunikasi yang berada pada suatu instansi atau lembaga daerah perlunya system komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental bagai kelangsungan komunikasi instansi dan lembaga tersbut. Pemanfaatan teknologi dan informasi di era sekarng ini menunjukan bahwa komunikasi serta teknogi dapat menyentuh semua bidang tersebut, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan informasi dapat menimbulkan hal yang positif dan menimbulkan hal yang negative. Hal positif yang didapat dari kemajuan teknologi dan informasi saat ini seperti, kita dapat mengakses internet dimana saja tanpa ada batasan waktu serta kita bisa melihat dunia luar hanya dengan menggunkan jaringan internet. Namun dari semua dampak positif tersebut terdapat dampak yang negative juga seperti, adanya sadap percakapan antara dua negara, adanya pembobolan kartu kredit mandiri, atau pencurian data diri yang semakin banyak didunia internet sekarang. Hal ini menyatakan system komunikasi juga dapat dilemahkan dengan adanya serangan serangan para hecker, dari sinilah perlunya standarisasi dalam suatu system jaringan komunikasi. Menurut (Richardus, Eko dan Indrajit, 2011 : 45) menyatakan

> "perangkat atau alat telekomunikasi yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk bertukar informasi harus mendapati jaminan kemanan dan tidak ada celah dalam kebocoran data

informasi yang dapat dimanfaatkan secara tidak baik oleh sebagian pihak yang lain".

Standarisasi ini juga merupakan penawar dari adanya tindak kejahatan yang ada didunia internet dan elektronik serta juga berfungsi sebagai alat yang bisa dikatakan kresibel atas adanya standarisasi system komunikasi.

Dalam penemuan data yang diperoleh dari peneliti terhadap objek inntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjelaskan bahwa terdapat standarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara dalam wawanaranya menyatakan bahwa terdapat standarisasi terhadap sitem komunikasi yang saat ini sedang digunakan sebagai unsur yang membantu suksesnya program kerja e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Standarisasi yang dimkasud merupakan standar yang diberikan Pemrintah Provinsi kepada seluruh daerah Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Jika ditanya mengenai standar yang berbasis internasional atau yang dikenal dengan Internasinal Organization for Standardization atau lebih akrab dengan panggilan ISO, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki standar tersebut dikarenakan tergolong baru dalam penerapan system komunikasi dengan berbasis elektronik government, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sadar bahwa standarisasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam perjalanan kedepan Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara beharap dapat menstrandarisasi system komunikasi tersebut dengan berlandaskan hukum yang sah.

7. Kerjasama dengan pihak luar dalam memenejerial system komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Suatu instansi atau lembaga akan berusaha keras dalam menjalin hubungan yang baik dengan khalayak luas atau publik, public sendiri bisa dibagi dengan public internal dan public eksternal atau biasa yang biasa kita dengar dengan sebutan stakeholder. Public internal juga bisa yang kita katakana dengan keluarga pada suatu lembaga atau instansi merupakan mereka yang bekerja seperti karyawan, keluarga karyawan, dan insvestor. Bagimana dengan public eksternal,

public eksternal merupakan mereka yang miliki status atas nama masyarakat, pemerintah, media, pelanggan dan public eksternal lainnya. Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berjalan sendiri, melainkan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara membutuhkan pihak luar atau stakeholder dalam memenejemen system komunikasi dengan berbasis elektronik. Hertifah, 2003 dalam jurnal administrasi public berjudul Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (Mahfud, Haryono & Anggreani, No. 12, 2010, hal 2071) menyatakan

> "stakeholder merupakan suatu individu atau kelompok baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat ataupun dipengaruhi dengan hal positif dan negatif oleh suatu kegiatan pembangunan".

Penemuan data yang didapat dari Permerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini keterlibatan stakeholder yang membantu memenejemen sistem komunikasi dilingkungan Penajam Paser Utara. Hal yang didapati yakni Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika, sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam memenejemen system komunikasi pada lingkungan kantor dinas. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki keterkaitan antar instansi secara baik itu vertical dan horizontal. Vertical disini dijalaskan sebagai lebaga yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Sedangkan horizontal disini dimaksudkan dengan lembaga kantor organisasi perangkat daerah yang masih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Peneliti melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika sudah tepat dalam melakukan kerjasama oleh pihak luar dalam membantu melakukan pekerjaan memenejemen system komunikasi yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dilakukannya kerja sama ini merupakan bentuk dari perhatian khusus Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam memenejerial system komunikasi yang tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang keberlangsunganya program kerja e-Government. Diharapkan kepada

stakeholder agar menjalankan fungsinya dengan sebaik baiknya. Mengapa begitu? dalam memenejemen suatu system komunikasi banyak sekali unsur – unsur yang harus diperhatikan sperti SDM, Infrastruktur, dan standarisasi hal ini tidak lah mudah bagai suatu organisasi tunggal dalam membackup semua hal tersebut, terlebih lagi jika dalam melakukan standarisasi atau pemeriksaan oleh lembaga yang lebih tinggi terdapat stakeholder yang mampu membantu menjelaskan serta ahli dalam bidang tersebut. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk lebih banyak dalam melakukan hubungan kerjasama terhadap stakeholder swasta. Mengapa swasta, karena memang kita tahu bahwa organisasi swasta memilki standar yang tinggi dalam melakukan kerja, hal ini akan berpengaruh terhadap banyak unsur yang sejalan dengan program kerja e-Government Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI E-GOVERNMENT

1. Penerapan komunikator bersama program e-Government

Komunikator merupakan sumber dari adanya informasi yang tersebar dikhalayak luas. Komunikator juga memiliki peran yang penting dalm membangun kepercayaan masyarakat atau komunikan terhadap suatu hal yang dirasa memiliki ketrkaitan dengan komunikator. Pemilihan komunikator merupakan factor penentu keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada komunikan atau masyarakat. Hal ini dikarenkan komunikator menjadi satu sorotan komunikan terhadap beberapa pesan yang ia sampaikan. Diawal pembahasan pada unsur perencanaan komunikator didapati beberapa kulifikasi yang harus dimiliki oleh komunikator. Pada buku (Cangara, 2013: 22) menyakatan bahwa sebagai sebuah komunikator atau orang yang menjadi sumber isi pesan tersebut, seseorang atau kelompok haruslah memiliki 3 syarat utama dalam kualifikasi sebagai seorang komunikator, yang pertama seseorang atau kelompok harus memiliki kepercayaan diri atau (Kredibilitas), yang kedua seseorang atau kelompok harus memiliki daya tarik kuat (Attractive) dan yang ketiga seseorang atau kelompok harus memilki (power) atau kekuatan.

Peneliti mendapati implementasi dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan komunikator. Dalam implementasi pemerintah sadar akan pentingnya komunikator yang berimbas pada lembaga itu sendiri. Dibuktikan pada berita yang dimuat dari (https://beritapenajam.net/permuda-pelayanan-diskominfo-kebangkan-silayan-adu/ diakses pada tanggal 2 agustus 2018) bagaimana media tersebut memberitakan bahwa Pemerintah membuat suatu program baru yakni pelayanan informasi yang diberi nama Silayan Adu. Dalam pemeberitaan ini Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai sumber dari berita tersebut yang dimana beliau memiliki beberapa kreteria dalam menjadi komunikator yang telah tertulis dikonsep awal. Dalam analisis Kepala DISKOMNFO, Bapak Budi Santoso memiliki kredibilitas, hal ini dikarenakan beliau yang menjabat sebagai Kepala DISKOMNFO Kabupaten Penajam Paser Utara. Beliau juga memiliki daya tarik, sebagai Kepala DISKOMINFO beliau sangat dihargai sebagai pimpinan didalm kantor. Beliau juga memiliki power, hal ini juga berkenaan dengan dtatus beliau yang memang dapat langsung berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, dan juga para petinggi Pemrintah Kabupaten tersebut.

Gambar: 4.1 Kepala DISKOMINFO menajadi komunikator dalam berita pelayaan Silayan Adu

Sumber : (http://beritapenajam.net, diakses pada tanggal 2 agustus 2018)

Peneliti merasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah baik dalam melakukan pemilihan komunikator, dengan mimilih sesuai dengan klasifikasi. Peeliti juga melihat dalam pemilihan komunikator tidak hanya akan dipilih sumber berdasarkan status jabatanya, melainkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat memilih komunikator sperti pegawai yang memang memiliki keerkaitan dalam suatu informasi yang akan dibahas dalam suatu pemberitaan. Selain pegawai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga akan memilih sumber seperti stakeholder terkait dalam memberikan informasi yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat dan komunikan. Peneliti merasa hal ini sudah dilakukan dengan baik dengan bagaimana Pemerintah memperhatikan kualifikasi terhadap pemilihan komunikator. Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menyadari bahwa dalam menentukan komunikator tidak juga berpatokan atau komunikator tersebut harus memiliki tiga unsur kualifikasi sebagai komunikator, jika komunikator yang dipilih hanya memiliki satu kualifikasi saja juga tidak mengapa bila individu tersbut dijadikan komunikator.

2. Penulisan pesan serta kualifikasi pesan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pesan merupakan informasi yang dapat menjadikan suatu komunikan dapat berekasi atau memberikan respon terhadap suatu permasalahan dan juga isu. Pesan juga merupakan informasi yang dapat mempengaruhi komunikan tertentu. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa pesan merupakan unsur terpenting dari sebuah komunikasi antara lembaga kepada masyarakat. Pemilihan pesan juga merupakan hal yang sangat penting dilingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pesan juga memiliki kualifikasi sebagimana pesan juga seperti komuikator. Mengapa pesan harus memenuhi kualifikasi, dikarenakan pesan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat nanti dapat menjadi informasi yang dapat mudah diserap dan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Penulisan pesan tidak dapat dilakukan sembarangan dalam hal ini pesan juga hharus melihat bagaimana masyarakat serta konten dari isi informasi tersebut

yang nantinya diharap oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat tertuju langsung dan dapat memberikan hal yang positif dari pesan tersebut. Dari konsep awal yang ditulis oleh (Uchjana, 2007 : 22) yang menyatakan

> "pesan dapat berupa symbol – symbol dalam hal ini penulis ingin menggaris bawahi pesan non verbal yakni non verbal bisa juga dalam bentuk gerak, lukisan dan isyarat".

Pesan sendiri memiliki kualifikasi atau sifat, pesan dapat dibagi menjadi tiga sifat yakni pesan yang mengandung unsur edukatif, persuasive, dan informative, pesan inilah yang dapat mendapatkan respond dari masyarakat.

Dalam penemuan data yang diambil dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati bahwa pesan yang akan dipublikasikan memiliki unsur kualifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa pesan yang bersifat informative tersebut ditujukan pada khalayak aagr membangun wawasan yang luas. Contohnya merupakan masih kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan pemda, nantinya secara singkat pesan akan ditulis dengan cara penyampaian di masyarakat yang moderen seperti sekarang, detidaknya itu yang dikatakn oleh Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan TIK Dan Pengembangan e-Government. Pesan yang kedua yang memilki sifat persuasive atau pesan yang disifat ajakan, bertujuan untuk merubaha pandangan dan pendapat khalayak. Sebagai contoh informasi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta sangsinya. Dan yang terakhir adalah pesan yang bersifat edukatif, pesan edukatif disini bertujuan agar masyarakat bisa mendapat ilmu yang luas dari sebuah informasi yang dipublikasikan. Contoh dari pesna edukatif tersebut yakni pesan yang membahas tentang zat-zat yang ada didalam narkoba serta akibatnya. Pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara biasanya ditugaskan oleh DISKOMINFO yang terdapt di lingkungan Pemerintahan.

Gambar: 4.2 contoh pesan ajakan terhadap berita hoax

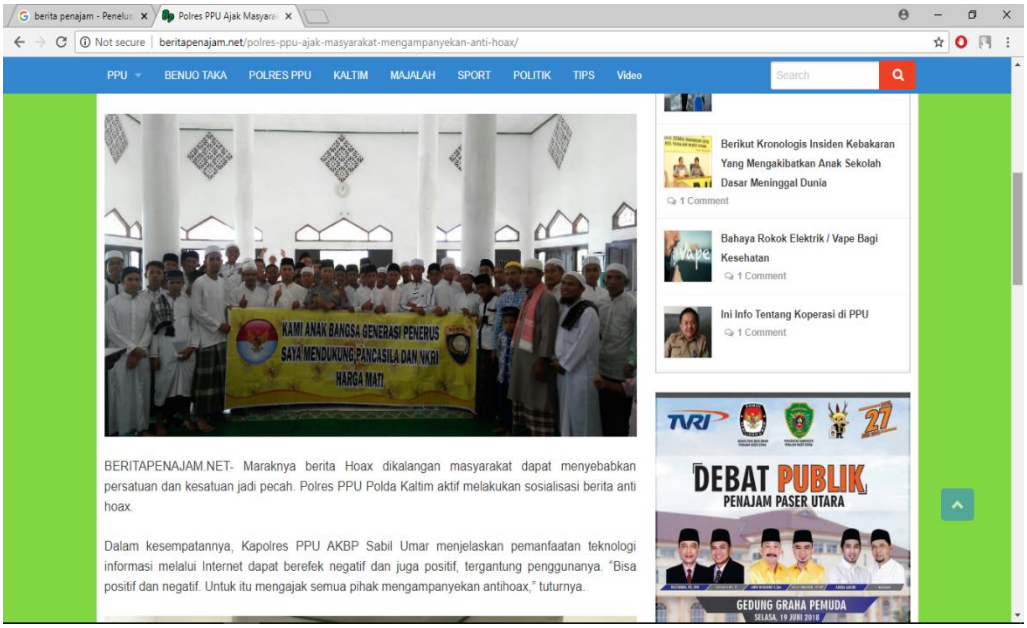

Sumber : (http://beritapenajam.net, diakses pada tanggal 2 agustus 2018)

Peneliti melihat bagaimana pesan yang dikelola serta dipublikasikan sudah baik, yang berarti pesan tersebut sudah memiliki sifat – sifat dasar dari suatu pesan seperti yang ada dikonsep awal. Bagaimana pesan memiliki tiga sifat yang memang secara umum harus dimiliki dari pesan tersbut, agar pesan yang disampaikan dapat tertuju dan juga dimaknai secara baik oleh komunikan atau masyarakat. Selain itu sebagai satu kesatuan DISKOMINFO sebagai kantor atau lembaga yang bertanggung jawab atas pesan yang disampaikan terkait Pemerintah harus memiliki SDM yang sangat mengerti tentang bagaimana siklus pesan yang akan terjadi dimasyarakat. Peniliti juga berpesan untuk DISKOMFO agar dapat mengelola pesan atau informasi secara professional dikarenakan, masyarakat modern sekarang sudah mengerti bagaimana sebuah institusi memberikan berita terebih lagi dizaman sekarang informasi dapat diakses dengan cara apa saja dan lewat media apa saja.

3. Pemilihan media dalam implementasi e-Government

Media dalam komunikasi merupakan saran yang mendistribusikan pesan kepada khalayak luas. media juga bisa diartikan sebgai saluran dari suatu informasi dan pesan. Media sendiri memiliki banyak tipe dan pilihan diantaranya

media cetak, media elektronik, dan serta adanya media baru atau internet. Media bisa berupa apa saja, media cetak terdapat banyak sekali platform yang ada didalamnya serperti surat, koran, spanduk, baliho dan semacamnya media ini sudah ada pada saat masa perang dunia pertama jadi media cetak bisa dikatakan media tertua yang masih ada hingga saat ini. Sedangkan media massa elektronik seperti televisi, dan radio merupakan media yang bisa dikatakan sudah berkembang sangat jauh meninggalkan media cetak. Dan yang terakhir adalah media baru atau yang dikenal dengan internet, media baru ini merupakan media yang sangat berkembang sangat cepat dalam bidang teknologi, banyak sekali platform – platform yang memfasilitasi sebuah pesan. seperti yang dikatakan oleh Bittner dalam (Imran, 2012 : 32) menyatakan "komunikasi massa dilakukan dengan media massa yang sangat besar"

Dalam data yang diperoleh peneliti dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan hasil dan emenyatakan bahwa Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam implementasinya menggunakan berbagai macam media seperti media baru yakni internet Pemerintah Kabuapten Penajam Paser Utara menggunakan platform Web, Instagram dan Facebook untuk menarik para anak muda milenial yang dizaman sekarang aktif dalam menggunakan media sosial. Untuk urusan media cetak atau media luar ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara menggunakan media seperti baliho, spanduk, dan vidiotron bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tersebar keseluruh pelosok daerah yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah daerah juga melakukan kerja sama dengan media massa atau pihak swasta dalam mendistribusikan pesan dan berjalan secara dinamis dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki alasan tersendiri mangapa Pemerintah menggunakan media tersebut berserta bentuk dari media tersebut mereka mangatakan bahwa saluran tersebut saluran tersebut di anggap sangat efektif dalam menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak luas. Serta dalam jaman yang modern seperti sekarang peran saluran non personal sangatlah penting.

Analisis peneliti menyataka bahwa tindakan pemilihan media sudah berjalan dengan baik dan benar, melihat dari banyaknya media yang menjadi bahan untuk menyampaikan pesan. Media yang digukan juga tergolong murah dan terjangkau terlebih lagi pemanfaatan internet di era digitalisasi selaknya digunakan dalam membantu proses program kerja e-Government. Hal ini tidak bertolak belakang pada konsep awal dikarenakan memang dalam menyampaikan suatu pesan hal yang wajib ada adalah adanya media yang digunakan. Peneliti menyarankan dalam perjalanan kedepan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus lebih memanfaatkan internet secara keseluruhan. Maksud peneliti yakni dalam media baru seperti internet banyak sekali platform yang akan banyak menjadi tren kedepan.

4. Komunikan dan implementasinya

Komunikan merupakan masyarakat yang menerima dari sebuah pesan yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok. Komunikan juga merupakan individu atau kelompok yang menerima serta akan memberikan suatu respond dalam dunia komunikasi respond tersebut dinamakan feedback. komunikan dapat dalam unsur ini bisa dibedakan menjadi dua bagian yakni komunikan yang memberikan peran aktif dan komunikan pasif. Komunikan aktif disini merupakan individu atau kelompok yang memang selalu memberikan tanggapan terhadap suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan komunikan pasih adalah individu atau kelompok yang memiliki peran kurang dalam merespond atau memberikan feedback biasa komunikan pasif cenderung melihat dan membaca saja tanpa memberikan tanggapan kepada komunikator yang memberikan suatu isi pesan.

Dalam data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara didapati bahwa konsep dan komunikan yang telah diterpakan menjadi satu sasaran, Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri berkaitan dengan program kerja e-Government yakni memberikan informasi kepada sebagian masyarakat yang dirasa memang membutuhkan informasi tersebut, sama halnya

jika informasi yang akan dipublikasikan kepada kelompok tertentu maka kelompok tertentu itulah yang akan menerima pesan dan informasi tersebut.

Analisis penelitian terhadap komunikan memang sangat membutuhkan waktu pasalnya dilihat dari konsep awal yang megatakan bahwa adanya komunikan pasif dan aktif merupakan hal yang menjadi pekerjaan rumah kita semua terutama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan program kerja. Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara seharusnya menjadikan komunikan yang pasif menjadi aktif agar bertujuan dalam melakukan program selanjutnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak didapati kendala dalam masalah yang ada dimasyarakat. Contoh ketika lembag ingin membangun infrastruktur komunikasi yang terletak dilingkungan warga maka lembaga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, jika dalam sosialisasi tersebut komunikan hanya bersifat pasif, setelah akan memulai pekerjaan pembanguanan infrastruktur masyarakat protes terhadap adanya masalah yang ada, padahal diawal sudah diadakanya sosialisasi untuk warga. Hal seperti inilah yang ditakutkan oleh peneliti terhadap pemilihan sasaran terhadap pesan yang akan disampaikan. Akan lebih baik jika komunikan diberikan pengelompokan dari pengelompokan usia, gender, status pekerjaan dan lain sebagainya.

5. Implementasi pengelolan feedback masyarakat terhadap program e-Government

Respon atau feedback yang dikeluarkan oleh masyarakat sejatinya merupakan tanggapan langsung dari masyarakat terhadap apa yang didapati dalam suatu pesan. Feedbeck sendiri merupakan balasan pesan dari komunikan dari sutu pesan yang disampaikan oleh komunikator. Feedback juga memiliki kualifikasi yakni feedback dapat berupa respond positif atau respond yang negative. Dalam setiap program kerja terutama program kerja pemerintah yang dilakukan pasti didapati feedback. Harold Laswell dalam (Mulyana, 2007 : 69-71) menyatakan bahwa komunikasi dari sebuh pesan yang disalmpaikan oleh komunikator nantinya diharapkan memberikan sebuah efek atau feedbeck dari seorang komunikan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai komunikator memang harus siap dalam merespond feedback yang diberikan oleh masyarakat agar bertujuan dapat memberikan solusi atau pengertian kepada masyarakat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Gambar: 4.3 feedback terhadap pesan diinstagram

Sumber : Instagram @Penajam_terkini, diakses pada tanggal 15 agustus 2018

Dalam penemuan data yang dilakukan peneliti di Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati bahwa komunikan memang baik dalam melakukan pemantauan terhadap setiap program kerja, serta masyarakat juga merespon dengan adanya program tersbut. Respond yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sagat beragam, namun pada inti dari respond tersbut merupakan respond yang positif dari komunikan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga manyadari bahwa perlunya pengelolan feedback yang harus dilakukan. Dalam implementasinya feedback akan dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika namun secara khusus jika feedback yang ditemukan adalah menuju pada SKPD tertentu maka feedback tersebut akan disampaikan kepada SKPD tersebut.

Peneliti merasa tanggapan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah cukup baik, dapat dilihat pada gambar 4.3 berkaitan berita tentang penerimaan CPNS tahun 2018 admin akun Instagram @penajam_terkini memabalas komentar para komunikan dengan cepat. Namun terdapat beberpa hal yang kurang bagi peneliti ketika mengunjungi Web Pemerintah dan membaca berita yang ada, namun terlihat dari kolom komentar tidak didapati feedback apapun terhadap pesan yang diberitakan dalam platform tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kurang feedback yang diberikan masyarakat dalam platform tersebut. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memaksimalkan media serta bagaimana cara mencari perhatian masyarakat dengan adanya indikasi feedback yang diberikan diplatfom tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai “strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan perencanaan program kerja e-Government” dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan strategi komunikasi dalam hal ini menyangkut dengan program kerja e-Government dengan mengklasifikasi usur komunikasi seperti kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, system komunikasi, dan implementasi.

e) Kebijakan komunikasi

Dalam melakukan sebuah strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu. dalam membuat perencanaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempertimbangkan kebijakan – kebijakan dalam merencanakan program tersebut. Kebijakan yang ditaati dalam merancang sebuah program dibutuhkan karena mengingat adanya batasan – batasan yang harus dipenuhi. Kebijkan tersebut berawal dari Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 serta Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001. Peraturan tersebut langsung ditanggapi dengan lahirnya Peraturan Bupati No 65 Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan dan mengimplementasikan dari kebijakan – kebijakan tersebut dengan berlandaskan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan program yang diutus oleh peraturan yang menyatakan pemerintah mewajibkan menggunakan sistem e-Government atau kantor pemerintah yang sudah menggunakan sistem elektronik.

f) Perencanaan Komunikasi

Dikeluarkannya suatu kebijakan komunikasi melalui banyak peraturan, maka ditetapkanlah unsur – unsur komunikasi sebagai perencanaan komunikasi. Dalam melakukan perencanaan komunikasi terdapat beberapa unsur – unsur yang dapat dijadikan klasifikasi sebuah perencanaan diantaranya, perencanaan komunikator, perencanaan pesan, perencanaan media, perencanaan komunikan dan perencanaan feedback. Bagian pertama yakni perencanaan komunikator. Dalam pemeilihan komunikator Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kualifikasi tersendiri yakni komunikator harus memiliki Kredibilitas, Attractive, dan Power. Kualifikasi ini yang dapat seseorang di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi komunikator. Bagian kedua yakni pesan, perencanaan pesan yang digunakan dalam melakukan aktivitas komunikasi juga memiliki kualifikasi pesan. Seperti halnya komunikator pesan juga harus mengandung unsur yakni Informatif, edukatif, persuasive.

Dalam perencanaan pesan ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kualifikasi harus dilakukan menyangkut bahwa terdapat banyak berita yang harus dipilah dan dipilih oleh Pemerintah. Pesan verbal dan non-verbal dalam penyampaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Penajam Paser Utara juga digunakan. Bagian ketiga perencnaan media atau saluran, perencanaan media dan saluran ini merupakan unsur yang melandasi keberhasilan suatu pesan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perencanaan media seperti media baru yakni internet berbagai platform yang digunakan mulai dari situs Web, jejaring sosial facebook, Instagram dan email merupakan media yang berada pada media baru, sedangkan media luar ruang seperti baliho, video tron, dan spanduk merupakan media yang digunakan. Ada juga media yang digunakan sebagai pesan langsung yakni media tulis seperti surat. Bagian keempat perencanaan komunikan, perencanaan komunikan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni masyarakat umum dan aparatur sipil. Bagian kelima perencanaan feedback, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perencanaan feedback dengan merespond secepat mungkin dan memperlakukan dengan baik.

g) Sistem komunikasi

Dalam penerapan sistem komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam paser Utara memiliki bentuk atau pola komunikasi yakni terbuka dan tertutup yang digunakan hingga saat ini. Kemudian dalam menejemen sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi aktifitas pegawai, pendampinga tenaga ahli untuk pegawai, dan peningatan pengetahuan bagi pegawai. Sistem komunikasi juga menyangkut infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah membangun jaringn kabel FO atau fiber optic serta Wi-fi corner untuk masyarakat. Menyangkut masalah standarisasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menstandarisasi sistem komunikasi namun belum bertaraf internasional. Dan kerjasama stakeholder dalam membangun sistem komunikasi juga sudah dilakukan.

h) Implementasi strategi komunikasi

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengimplementasikan perencanaan dalam program e-Government juga sudah dilakukan. Pertama implemntasi komunikator dalam bahasan sebelumnya kualifikasi komunikator yang harus ditemukan dalam setiap individu yang menjadi sumber sebuah pesan. Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan komunikator seperti Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika yang menjadi komunikator serta adanya tokoh masyarakat seperti polisi serta individu yang terkait dalam suatu informasi yang ingin disampaikan.

Kedua pesan yang dikirimkan juga sudah dilakuakan sesuai dengan kulaifikasi yakni edukatif, persuasive dan informative salah satu contohnya yakni penyampaian pesan anti berita hoax yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Ketiga media dan saluran yang digunakan merupakan media yang memang pada saat ini sedang digunakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya yakni internet. Didalam internet tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan berbagai macam platform yakni situs Web, Instagram, facebook dan email. Sedangkan media luar ruang yang digunakan biasanya baliho dan sepanduk untuk video tron pemerintah masih belum memanfaatkan dengan baik. Keemapat komunikan dalam kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan informasi secara umum kepada masyarakat luas. Dan belum tertuju atau membentuk sebuah kualifikasi umur, gender, pekerjaan dalam membuat pesan. Kelima feedback, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memeberikan feedback terhadap komunikan dengan cepat, baik dan sopan.

2. Keterbatasan penelitian

Sehubungan degan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang peneliti alami dalam menyusun penelitian ini. Keterbatasan yang pertama yakni dalam melakukan penelitian ini peneliti kesulitan terhadap lambatnya pegawai dalam memberikn sebuah dokumentasi yang diinginkan peneliti. Kedua data tentang pengguna situs website penajamkab.go.id masih belum dilakukan membuat keterbatasaan peneliti dalam melakukan seberapa sering masyarakat Penajam mengunjungi situs pemerintah tersebut. Ketiga keterbatasan literature obejek Kabupaten Penajam Paser Utara juga merupakan salah satu kendala yang dialami.

3. Saran

Saran dari peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih memanfaatkan segala sesuatu yang dimiliki serta membuat inovasi program kerja yang memang dirasakan oleh masyarakat. Serta dalam mendokumentasikan sebuah kegiatan diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus lebih sering agar dalam program kerja e-Government terdapat sub program kerja yang lebih banyak dan baik lagi. Untuk komunikasi dimedia sosial Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan agar dapat menarik komunikan untuk mengunjungi situs yang dipergunakan.

Saran peneliti terhadap peneliti selanjutnya dengan mengambil tema perencanaan komunikasi, agar lebih memperdalam pada bagian perencanaan media secara khusus dilingkungan Pemrintah kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu dalam pengambilan data dilapangan sebaiknya harus menjaga komunikasi kepada SKPD yang akan diminta untuk memberikan data.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

AG, Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi. (2008). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*.Yogyakarta

Ardianto, Elvinaro. (2009). *Public Relations Praktis*. Edisi pertama. Jakarta: Widya Padjajaran.

Bagong, Dwi Narwoko, J. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.

Cangara, Hafied. (2013). *Perencanaan Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Cangara, Hafied. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital).* Yogyakarta: Andi.

Indrajit, Richardus Eko. (2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.

Indrajit, Richardus Eko. (2011). *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offest.

Jogiyanto, HM. (2008). *Sistem Teknologi Informasi*.Yogyakarta: Andi Offset

Mintzberg, Henry. (2007). *Tracking Strategies: Toward a General Theory*. Oxford Univercity Press Inc. New York.

Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2014). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Prasojo Diat Lantip, Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.

Priyono dan Marnis. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo: Zifatama Publisher

Rangkuti, Freddy. (2009). *Strategi Promosi Yang Kreatif*. Edisi pertama, Cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Rogers, Everett M., D. Lawrence Kincaid. (1981). *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press

Seifert, J.W, dan Bonham, G.M. (2003). *The Transformative Potential of e-Government in Tradisional Democracies*. Lomonosov Moscow State University.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.

Soeratno, (1995). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Solihin, Ismail. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga

Sudarto, (1995). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Adrinal dan Subagjo, Bambang. (2012). *Panduan Praktis Menyusun Standard OperatingbProcedures (SOP)*. Yogyakarta: Total Media.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan &Aplikasinya*. Jakarta: Rineka.

Wilcox dan Cameron. (2006). *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Wheelen,T.L., & Hunger,D.J. (2004). *Strategic Management and Bussines Policy*, Ed 9. United States: Prentice Hall

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta .Caps.

Yong, James SL. (2003). *e-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century*. Times Editions: Singapore.

Referensi dari jurnal

Astutin, Sari. *Pengaruh Firm Size, Growth, Profitability, Business Risk Dan Tangible Asset, Terhadap Financial Leverage Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI"*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol.11, No.04, November 2009: 345-370.

Aprianty, Diah Rachma. *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, Samarinda Journal Ilmu Pemerintahan, Vol 4, Nomor 4, 2016: 1589-1602.

Aprianty, Diah Rachma. *Penerapan Kebijakan e-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*: Samarinda, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1589-1602

Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web,* Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, 2010, ISSN 1414-9999.

Mutia Dewi, dan M. Masri Hadiwijaya. 2016, *Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera)*, Jurnal komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN:2548-7647 Volume 10, Nomor 2, april 2016

Nur, Emilsyah. *Penerapan e-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu, Makasar*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 18 No. 3, Desember 2014: 265-280.

Oktavya, Aditya Ayu. *Penerapan (Electronic Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*. Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan.Vol 3, Nomor 3, 2015: 1433-1447.

Warsilan dan Noor, Akhmad. Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. Jurnal Vol 31, No 2. 2015

Tesis dan Skripsi

Pratiwi, Adelisa. (2012). Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran Dalam Mengkomunikasikan Peraturan Dan Kebijakan Proses Perizinan Penyiaran (Studi Evaluasi Kementrian Komunikasi dan Informatika). Tesis. Fisip UI

Ansaruddin, Imran Rosyadi. (2012). Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Bagian Frontliner PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Makassar Kartini & Cabang Makassar Slamet Riyadi. Skripsi. Universitas Hasanuddin

Galuh Sekar Tanjung Putri. (2016), Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah Kota Tegal Dalam Pengelolaan Informasi Publik Di Kota Tegal, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Sitokdana, Melkior N. N. (2015). Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Pascasarjana Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Referensi lain

www.bareksa.com Di akses pada tanggal 6 april 2017, pukul 14.32.

www.statistik.kominfo.go.id Di akses pada tanggal 6 april 2017, pukul 15.11.

www.kominfo.kotabogor.go.id Di akses pada tanggal 6 april 2017, pukul 12.14. Penerapan Teknologi Informasi Untuk Mendukung E-Government Pemerintah Kota Bogor,

www.jdih.kominfo.go.id Di akses pada tanggal 29 mei 2017, pukul 16.33. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

www.kominfo.go.id Di akses pada tanggal 24 septemer 2017 pukul 20.08.

www.kemendagri.go.id Di akses pada tanggal 15 juni 2018 pukul 14.25.

www.jdih.kominfo.go.id Diakases pada tanggal 13 juni 2018 pukul 15.13.

www.hukumonline.com Diakses pada tanggal 13 juni 2018 pukul 16.00

www.hstatistik.kominfo.go.id DIakses pada tanggal 14 juni 2018 pukul 20.21

www.lecturer.ukdw.ac.id Diakses pada tanggal 15 juni 2018 pukul 08.13

http://documents.worldbank.org Diakses pada tanggal 27 september 2018 pukul 12.01

LAMPIRAN

RANCANGAN DARAF WAWANCARA

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nim :14321144

Judul : Strategi Komunikasi pemerintah Kabupaten Penajam Terhadap Program kerja E-goverment

Draf Wawancara

Kebijakan Komunikasi.

a. Apakah kebijakan pemerintah tentang Egov sudah berjalan ?

b. Apa tujuan dalam kebijakan ?

c. Apa hambatan yang dihadapai dalam merealisasikan kebijakan tersebut ?

d. Apakah semua pegawai sudah mengerti tentang kebijakan ini ?

e. Apa saja langkah – langkah dalam merealisasikan program ini ?

f. Jika sudah ter-realisasi maka apa konsep yang di gunakan dalam program Egov ?

g. Apakah sudah ada sosialisasi program ke masyarakat/pegawai ?

h. Apakah ada SOP yang diberikan dari pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan tersebut ?

i. Jika ada SOP tersebut, apa sajakah yang terdapat dalam SOP tersebut secara keseluruhan ?

j. Lalu pencapaian apa yang sudah didapat dari kebijakan tersbut ?

k. Apakah sudah ada tahap evaluasi setelah kebijakan tersebut di lakukan ?
l. Berapa lama kah kebijakan ini di kerjakan ?
m. Dalam kebijakan tersbut siapa yang menjadi target sasaran ?
n. Apakah terdapat riset terlebih dahulu dalam kebijakan tersebut ?

Sistem komunikasi.

1) Apakah saja bentuk system komunikasi yang digunakan ?
2) Siapa yang mengurus sistem komunikasi tersebut ?
3) Apakah ada tolak ukur dari sistem tersebut ?
4) Adakah mejerial yang mengelola SDM tersebut ?
5) Jika ada, apakah langkah – langkah dalam memenejemen SDM tersebut ?
6) Lalu apa yang harus di kuasi SDM dalam memahami sistem komunikasi tersebut ?
7) Apakah dalam memberikan penjelasan dalam sistem komunikasi pihak pemkot memberikan instruktur dalam menjelaskan sistem komunikasi egov tersebut ?
8) Apakah SDM internal memiliki pengaruh yang ?
9) Lalu seberapa kesadaran dari SDM itu sendiri ?
10) Apakah SDM di kalangan pemerintah sudah memahami sistem komunikasi tersebut ?
11) Apakah sudah memenuhi ISO dari sistem komunikasi tersebut ?
12) Jika ada, apa yang membuat sistem komunikasi tersebut memenuhi ISO ?
13) Di lihat dari segi SDM, apa sajakah factor yang melandasi suksesnya sitem tersebut?
14) Apakah dalam sitem ini terdapat stakeholder yang terkait ?
15) Apakah ada tahap evaluasi dari sitem tersebut ?

Perencanaan E-government.

A. Apa yang ingin di capai dari perencanaan tersebut ?

B. Apa tujuan dari perencanaan tersebut ?

C. Jika ada , mengunakan cara apa dalam mencapai tujuan ?

D. Siapa yang menjadi target dari perencanaan tersebut ?

E. Apa yang ingin dicapai dari perencanaan tersebut ?

F. Apakah sudah tercapai ?

G. Lalu apa hasil yang sudah di capai ?

H. Apa yang menjadi kunci sukses dari perencanaan tersebut ?

I. Apa pesan yang ingin disampaikan dari perencanaan tersebut ?

J. Siapa yang menyampaikan pesan tersbut ?

K. Kapan waktu yang tepat dalam menyampaikan pesan tersebut ?

L. Apakah ada evaluasi dari perencanaan tersebut ?

Strategi komunikasi.

1. Konsep apa yang anda terapkan dalam menetapkan sasaran ?
2. Siapa yang menjadi komunikator ?
3. Apakah komunikator memiliki kredibilitas tinggi ?
4. Apa saja tugas dari komunikator dalam hal ini ?
5. Bagaimana pengelolaan isi pesan itu disampaikan ?
6. Apa saja isi didalam pesan yang ingin di sampaikan ?
7. Bentuk dari pesan yang di sampaikan ?
8. Lalu strategi apa yang dilakukan dalam menyampaikan pesan tersebut ?
9. Jenis saluran apa saja yang digunakan dalam penerapan tersebut ?
10. Apa saja bentuk saluran tersebut ?
11. Mengapa memilih saluran tersebut ?
12. Hal apa yang didapat dari audies tersebut ?
13. Apakah terdapat feedback dari audiens ?
14. Bagaimana respond dari audiens ?
15. Bagimana cara pengelolaan feedback yang masuk dari audiens ?
16. Apakah ada evaluasi dari stratgi ini ?

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nim :14321144

Sumber : Bapak Budi Santoso

Tanggal : 29 juli 2018 / Pukul 08.00 – 09.00

Keterangan : P = Mahasiswa , A = Sumber

TRANSKIP WAWANCARA

Kebijakan Komunikasi.

A. P = Apakah kebijakan pemerintah tentang Egov sudah berjalan ?

A = "Allhamdulillah dalam urusan kebijakan, kami telah melakukan atau dengan kata lain sudah dan sedang berjalan, sampai kebijakan ini ditetapkan dari pemerintah pusat maka kami akan terus

melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan tersebut, harapannya masyarakat nanti bisa berpartisipasi dan terkusus oleh pegawai Pemerintah Kabupaten bisa memahami dan memanfatkanya dengan baik sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2003 No 3 dan Peraturan Gubernur Kaltim No 10 tahun 2014 tersebut" (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

B. P = Apa tujuan dalam kebijakan ?

A = "Banyak sekali tujuan yang diberikan oleh adanya kebijakan tersebut dari segi kebijakan E-Gov sendiri jelas tujuannya dalah mempermudah birokrasi yang sudah lama dengancara yang lebih baru dari situlah cara lain dari mencegah tindak kasus korupsi yang sedang marak dikalangan lembaga pemerintah. Kedua membantu keterbuakan informasi yang sedang berjalan dikalangan

A = Kalo dilihat dari tujuannya sendiri itu banyak yah mas , kalo dari segi kevijakan e gov sendiri yang pertama jelas memepermudah birokrasi yang sudah lama dengan cara yang baru nah dari situ juga juga menegah kasus – kasus atau tindakan korupsi yang sedang marak dikalangan lembaga pemerintah yah mas , kedua membantu keterbukaan informasi yang sedang berkembang di kalangan masyarakat dan juga SKPD , dari situlah kepercayaan masyarakat akan kerja kami dapat dilihat, yang kedua Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan

dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

C. P = Apa hambatan yang dihadapai dalam merealisasikan kebijakan tersebut ?

A = “Hambatan yang dihadapi , kami disini kesulitan akan sumber daya manusia yang mengerti tentang e-gov sendiri lalu juga kurangnya fasilitas yang menunjang untuk membentu pelaksanaan serta yang penting anggaran yang kurang untuk merealisasikan program dari kebijakan tersebut”

D. P = Apakah semua pegawai sudah mengerti tentang kebijakan ini ?

A = “Apakah semua faham tentang kebijakan, kalo di bilang begitu belom bisa mas karena mereka yang bekerja di pemerintahan atau SKPD 80 % masih belum mengerti benar, dan masih banyak pegawai yang kurang memhami teknologi yang disajikan oleh program E-gov, dengan demikian artinya mereka hanya mengerti secara umum tentang apa itu E-gov, kalo yang mengerti benar mungkin sedikit mas , yah itu tadi yang saya katakana keterbatasan SDM” (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

E. P = Apakah sudah ada sosialisasi program ke masyarakat/pegawai ?

A = “Sosialisasi kami sudah lakukan, kami juga mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat untuk dapat diterima secara baik dan tidak terkesan sangat mendadak, sering juga kami melakukan kajian kajian terhadap program yang berlangsung, untuk sosialisasi

di masyrakat kami sudah pernah melakukannya. seperti sosialisasi terhadap kesehatan melalui web yang pernah kami lakukan, kalo untuk SKPD sendiri kami telah melakukan sosialisasi tentang cara menggunakan web untuk mengecek, melihat anggaran, dan juga cara mengecek atau membayar pajak. Selain itu juga kami juga sampaikan kepada semua SKPD untuk membiasakan diri dalam menggunakan e-Gov. (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

F. P = Apakah ada SOP yang diberikan dari pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan tersebut ?

A = "SOP adalah standar oprasonal prosedur yang dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini proses dimualinya pembuatan kebijakan sampai dengan penerapanya. SOP yang dimaksud adalah pelaksanaan penerapan kebijakan E-Government dipemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tentu dalam hal ini kami telah melakukan kegiatan dalam menyusun sebuah kebijakan sesuai dengan SOP tersebut dikarnakan dari SOP itulah kami memiliki panduan dalam melakukan pekerjaan kami". (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

G. P = Jika ada SOP tersebut, apa sajakah yang terdapat dalam SOP tersebut secara keseluruhan ?

A = "Kami telah melakukan langkah – langkah yang diberikan atau bisa juga dibilang dengan menaati SOP yang terdapat pada Peratuaran Mentri Komunikasi Dan Informatika No 8 tahun 2010 pada bab V pasal 14 ayat 3 tersebut, didalam SOP tersebut terdapat beberapa langkah – langkah yang harus ditaati tahapan tersebut adalah bimbingan teknis, pengembangan model, penyelengaraan jaringan komunikasi, sarana dan prasarana, workshop, sarasehan,

forum, penyedian bahan – bahan informasi, simulasi aktivitas, kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala, dan juga studi banding". (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

H. P = Apakah sudah ada tahap evaluasi setelah kebijakan tersebut di lakukan ?

A = "Tentunya disetiap kebijakan yang kami buat akan selalu ada evaluasi untuk mengetahuai apakah sudah baik berjalan atau belum, sebagai contoh ketika disuatu fenomena A terjadi maka konsep dari kebijakan di kota B tidak bisa di gunakan karena berbeda pendekatan serta pola fikirnya, kalo pun bisa hasil yang di dapat akan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran, setelah itu akan dikaji ulang untuk mendapatkan program yang baik di suatu wilayah" (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

I. P = Apakah terdapat riset terlebih dahulu dalam kebijakan tersebut ?

A = "Apakah ada riset, tentu dari semua kebijakan semuanya memiliki riset kami juga melakukan riset bersama praktisi serta badan riset daerah yang ada di pemerintahan ini untuk membantu program kerja, riset tersebut dapat menunjukan hasil data yang diinginkan oleh pemerintahan tentang fenomena apa yang sedang terjadi dimasyarakat dan SKPD serta menjawab dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Budi santoso, wawancara, 29 juli 2018)

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nim :14321144

Sumber : Bapak Siswanto

Tanggal : 29 juli 2018 / Pukul 09.00 – 10.00

Keterangan : P = Mahasiswa , A = Sumber

TRANSKIP WAWANCARA

Perencanaan E-government Kabupaten Penajam Paser Utara

A. P = Siapa yang menyampaikan pesan tersbut ?

A = "Sebenarnya di Kabupaten Penajam untuk menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat bisa dilakukan oleh semua kalangan namun lebih baik jika dalam penyampaian pesan tersebut di lakukan oleh kantor atau Dinas Pemerintahan

yang memiliki organisasi khusus yang mengelola TIK. Serta memiliki wewenang yang cukup atau berada dilevel eselon II". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

A = "Ya kalau di Penajam sendiri komunikator itu bertugas untuk mengidentifikasi sasaran yang dituju terus menentukan tujuan komunikasi lalu merancang dan menyusun pesan, menentukan metode, memilih saluran komunikasi dan mengukur hasil penyampaian pesan tersebut hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan Dalam strategi komunikasi". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

B. P = Apa pesan yang ingin disampaikan dari perencanaan tersebut ?

A = "Dalam Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, kami menyampaikan dalam perencanaan tersebut ingin berpesan untuk membentuk perencanaan pelaksanaan dan pengembangan e-Government dibutuhkan dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan agar tata kelola e-Government dapat berjalan dengan baik dan semestinya dengan kata lain kami akan memberikan informasi – informasi dengan menggunakan berbagai media dan jaringan". (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

A = "Kabupaten Penajam sendiri menggunakan model pesan atau komunikasi dengan menggunkan komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi verbal biasanya dilakukan ketika adanya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti sosialisasi e-Gov, komunikasi yang kami gunakan dengan menggunkan komunikasi

verbal. Komunikasi non verbal biasnya dilakukan dengan memanfatkan media massa atau media luar ruang seperti koran, website, serta jejaring social yang dapat digunakan oleh Apratur daerah dan masyarakat, kami juga menggunakan penyampaian pesan secara informative, edukatif, dan persuasive untuk menjangkau pesan sampai dimasyarakat" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

A = "contoh dari pesan edukatif yang kiranya nanti kami akan sampaikan yakni mengenai siswa dan siswi atau putra putri daerah yang membanggakan Kabupaten Penajam, pesan informative biasanya kami akan memberikan pesan semisal kegiatan pemerintah yang teah dilaksanakan, lalu pesan persuasive biasanya kami menyampaikan semisal gerakan anti narkoba, pemilu dan semacamnya" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

C. P = Saluran apa yang digunakan ?

A = "Jenis saluran dan bentuk saluran yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam memaksimalkan cara sendiri yakni saluran-saluran yang sudah ada kami gunakan. seperti saluran personal, saluran ini menyampaikan pesan dengan kontak secara langsung melalui tatap muka, bentuk dari saluran tersebut adalah seperti telepon, chatting, surat, pos, fax, email dan lain-lain. Saluran berikutnya merupakan saluran non personal yaitu menyampaikan pesan tanpa kontak langsung. Saluran ini biasanya berbentuk media massa, media sosial, media luar ruang, baliho, sepanduk, video Tron, website dan lain-lain" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

D. P = Siapa yang menjadi sasaran dari pesan - pesan atau informasi tersebut ?

A = "Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan target perencanaan yakni pemerintah daerah berserta kantor dan lembaga yang ada di bawahnya yang akan diimplementasikan kepada masyarakat umum tidak terkecuali SKPD atau aparatur pemerintah" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

E. P = Apa yang didapat dari efek pesan yang telah disampaikan atau feedback seperti apa yang telah didapat oleh pemerintah ?

A = "kami tau dan sadar efek dan feedback dari suatu pesan, makanya dari setiap pesan yang akan dipublikasikan akan melalui tahap pengecekan. Lalu dalam mengelola efek kami akan memberikan pesan yang kiranya memajukan suatu daerah itu sendiri. Kalo dalam feedback kami akan berusaha memberikan pelayanan yang baik dan cepat serta dalam segi pelayanan kami akan siap membalas merespond komentar atau hal yang akan dilakukan oleh masyarakat, seperti contoh kami akan membalas komen masyarakat melalui media massa Instagram, Facebook, kolom komen Web dan lainnya" (Siswanto, Wawancara, 29 juli 2018)

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nim :14321144

Sumber : Bapak Masrani

Tanggal : 29 juli 2018 / Pukul 10.00 – 11.00

Keterangan : P = Mahasiswa , A = Sumber

TRANSKIP WAWANCARA

Sistem komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara

a. P = Apakah saja bentuk system komunikasi yang digunakan ?

A = "Komunikasi terbuka pada sistem komunikasi ini (tidak rahasisa), peluang pihak lawan untuk memperoleh berita/informasi yang dikomunikasikan lebih besar, dan pendengar yang berhasil memperoleh informasi tersebut dapat langsung memahami. Contoh

dari komunikasi terbuka, misalkan seseorang A mengirim berita atau informasi kepada B dalam bentuk teks terang. Apabila ada penyadapan dari luar penyadap langsung memperoleh informasi tersebut. Komunikasi tertutup berita atau informasi sebagai objek transmisi harus ada perlindungan, contoh individua A akan mengirimkan berita rahasia kepada B , maka dalam memnjamin kerahasisan tersbut diperlukanya Teknik enkripsi sedemikian rupa agar pihak lain tidak bisa membaca informasi tersebut" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

b. P = Siapa yang mengurus sistem komunikasi tersebut ?

A = "Seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non Aparatur Sipil Negara untuk mengurus bentuk komunikasi terbuka salah satu bentuk keterbukaan itu adalah adanya Web, dan situs jejaring social yang di kelola oleh Pemerintah Penajam , sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi tersendiri dalam mengatur sandi diberikan kepercayaan untuk mengatur komunikasi tertutup" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

c. P = Jika ada, apakah langkah – langkah dalam memenejemen SDM tersebut ?

A = "langkah – langkah kami dalam melakukan menejerial sumber daya manusia itu di antaranya ada identifikasi aktifitas yang akan diadakan hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nantinya aktifitas yang dilakukan dan bagimana cara melakukanya lalu ada pengelompokan aktifitas sesuai sumber daya manusia dan kondisi

yang ada lalu ada penugasan terhadap pegawai dalam melaksanakan komunikasi tersebut dan yang terakhir ada koordinasi antar pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

d. P = Lalu apa yang harus di kuasi SDM dalam memahami sistem komunikasi tersebut ?

A = "Pengetahuan, tingkat pengetahuan seorang pegawai menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seorang pegawai dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, akan lebih muda memiliki kata - kata (diksi) untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non verbal kepada penyadap/pendengar. Hal ini berlaku juga untuk seorang penyadap/pendengar. Kurang pendengaran dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan pegawai dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan lalu ada faktor persepsi yang merupakan suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang di olah menjadi sebuah pandangan. Nah pembentukan persepsi ini terjadi pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses pemahaman manusia dapat menjadi suatu stimulus dan dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pendapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk berkomunikasi. Adanya peran dan hubungan merupakan dan memiliki pengaruh dari sebuah proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan mimpi carakan termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Seorang pegawai yang belum menjalin hubungan dekat dengan pendengar maka akan terjadi komunikasi secara formal. Unsur lingkungan

atau faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap interaksi dalam berkomunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Faktor emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. faktor emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri bahkan emosi dapat menjadi hambatan. Yang terakhir adanya faktor kondisi fisik yang mempunyai peran penting berkomunikasi. semua indra memiliki fungsi - fungsi yang digunakan dalam kelangsungan berkomunikasi" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

e. P = Apakah SDM di kalangan pemerintah sudah memahami sistem komunikasi tersebut ?

A = "Pemahaman sumber daya manusia tentang sistem komunikasi serta teknologi yang berkembang dan yang digunakan saat ini serta kualifikasi keilmuan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem komunikasi tersebut dan didukung penuh dari pemimpin atau atasan dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan sistem komunikasi tersebut nantinya selaras dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dengan kebutuhan dalam sistem komunikasi tersebut serta kesadaran sumber daya manusia untuk menggunakan sistem komunikasi berbasis Elektronik Government" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

f. P = Apakah terdapat pendampingan SDM dalam membimbing mereka dan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang sistem komunikasi e-Government ?

A = "Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara juga memberikan pendampingan tenaga ahli dalam alasan sistem komunikasi elektronik government guna pembangunan sistem komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

g. P = Apakah terdapat infrastruktur yang dibangaun dalam menunjang kesuksan program e-Government ?

h.

A = “pembanguanan infrastuktur kami sudah lakukan yakni membangun jaringan FO atau fiber optic untuk menyambungkan semua perangkat computer menjadi sati jarigan di Pemerintahan, namun pemakaian jaringan FO tersebut belum dilaukan secara makasimal oleh pegawai, salah satu foktor tidak maksimalnya tersebut yakni keterbatasan anggaran belanja dalam membangun infrastruktur tersebut” (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

A = “pembangunan infrastruktur dimasrakat juga kami telah lakukan yakni pembangunan Wi-fi Cornner yang ada didpan kantor camat penajam, infrastruktur ini bertujuan untuk membantu para adik – adik yang sedang sekolah dalam mencari tugas sekolah mereka namun hal ini belum juga maksimal” (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

i. P = Apakah sudah memenuhi ISO dari sistem komunikasi tersebut ?

A = "Di Kabupaten Penajam Paser Utara sistem komunikasi yang digunakan masih belum memenuhi standar iso dikarenakan tergolong baru dalam penerapan sistem komunikasi berbasis elektronik government mungkin kedepanya Pemerintah Kabupaten

Penajam akan menstandarisasi sistem tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

j. P = Apakah dalam sitem ini terdapat stakeholder yang terkait ?

A = "Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sistem ini memiliki keterkaitan antar instansi baik itu instansi vertikal maupun horizontal maksud dari instansi vertikal adalah instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan instansi pusat seperti Kementerian/Lembaga. Yang dimaksud dengan instansi horizontal adalah kantor organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara" (Masrani, Wawancara, 29 juli 2018)

Nama : Bintang Yusuf Wijaya

Nim :14321144

Sumber : Bapak Andri Febriyadi

Tanggal : 29 juli 2018 / Pukul 13.00 – 14.00

Keterangan : P = Mahasiswa , A = Sumber

TRANSKIP WAWANCARA

Strategi komunikasi.

E. P = Siapa yang menjadi komunikator ? Apakah komunikator memiliki kredibilitas tinggi ?

A = "dalam menerapkan strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Penajam menyadari bahwa pentingnya komunikator terhadap suatu

pesan yang diberikan kepada lembaga yang nantinya akan diterima di masyarakat atau yang diterima oleh pegawai dinas dan lain sebagainya, di sini yang menjadi komunikator adalah pegawai dinas komunikasi dan Informatika baik secara langsung maupun dapat bekerjasama dengan SKPD lain atau pihak lainnya seperti stakeholder yang terkait. Kami juga memilih komunikator sesuai dengan kriteria serta pesan apa yang akan disampaikan".

A = “contoh dalam hal yang sebenarnya ketika kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan program baru dari program kerja Pemrintah yakni adanya Pelayanan Silayan Adu, beliau memberikan bagaiamana pelayanan itu akan dilaksanakan dan bagaimana teknis dalam penggunaanya” (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

A = "Kami juga menyadari bahwa komunikator harus memiliki kredibilitas yang tinggi walaupun begitu tentu saja komunikator juga memiliki keterbatasan" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

F. P = Bagaimana pengelolaan isi pesan itu disampaikan ?

A = "kalau di Penajam sendiri penerapan pesan tersebut ada melakukan dua cara, cara pertama itu pesan informatif pesan informatif merupakan pesan yang banyak ditujukan kepada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat sederhana, jelas dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit. Contohnya merupakan masih kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan pemda, nantinya secara singkat pesan akan ditulis dengan cara penyampaian di masyarakat yang modern seperti sekarang. Model yang kedua adalah pengelolaan pesan

bersifat persuasif model ini bertujuan untuk merubah pendapat, persepsi dan sikap khalayak. Prosesnya bersifat persuasif dan yang diinginkan dalam model ini adalah setelah pesan disampaikan maka akan terjadi perubahan pendapat persepsi ataupun sikap, sebagai contoh informasi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta sangsinya. Adanya informasi ini diharapkan terjadi perubahan perilaku ketidakpedulian masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih peduli dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pesan yang edukatif bertujuan untuk masyarakat mimiliki tingakat keilmuan. Contoh pesan yang mengandung akibat dari penggunaan narkoba" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

G. P = Apa saja isi didalam pesan yang ingin di sampaikan ?

A = "kalau isi Pesan yang disampaikan oleh pemerintah penajam Paser Utara penyampaian pesan itu ditugaskan dan melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika biasanya isi pesan itu sebuah kebijakan pemerintah atau hasil kebijakan pemerintah dan kegiatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta menyajikan sebuah hasil yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

H. P = Jenis saluran apa saja yang digunakan dalam penerapan tersebut ?

A = "Kabupaten Penajam Paser Utara selama ini menggunakan strategi yang sedang atau yang telah dilakukan dengan menyampaikan pesan yaitu dengan menyampaikan pesan secara langsung, melalui pertemuan-pertemuan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet atau media sosial, menggunakan

media luar ruang, seperti baliho spanduk dan videotron, atau melakukan kerjasama dengan media massa strategi ini telah dilakukan secara dinamis dari tahun ke tahun makan media apa saja yang dapat digunakan. Adapun strategi lain yang dilakukan dengan menyampaikan pesan tersebut adalah dengan mengemas pesan secara secara baik dan menarik" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

I. P = Mengapa memilih saluran tersebut ?

A = "Kenapa kami memilih saluran komunikasi dan juga bentuk dari saluran tersebut. Karna saluran tersebut di anggap sangat efektif dalam menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak luas. Serta dalam jaman yang modern seperti sekarang peran saluran non personal sangatlah penting" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

J. P = Siapa yang menjadi target pesan ?

A = "konsep yang diterapkan dalam menetapkan sasaran di Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan strategi komunikasi yang pertama menentukan sasaran konsep yang diterapkan itu adalah tujuan dari komunikasi itu sendiri, misal komunikasi yang dibangun sebagai informasi bagi seluruh masyarakat, maka sasarannya adalah untuk rakyat tersebut, akan tetapi bila informasi hanya untuk kalangan atau kelompok tertentu maka kelompok tersebut merupakan sasaran dari itu sendiri" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

K. P = Apakah terdapat feedback dari audiens ?

A = "Ya kalau di Penajam sendiri untuk audiens sangat baik dalam melakukan pemantauan terhadap apapun program kerja yang dilakukan oleh jajaran jajaran pemerintah kabupaten Penajam

Paser Utara hal ini juga dilakukan oleh audiens yang banyaknya merespon dan memberikan pesan yang cukup beragam namun pada intinya respon yang kami peroleh merupakan respon positif dari audiens" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)

L. P = Bagimana cara pengelolaan feedback yang masuk dari audiens ?

A = "Pengelolaan feedback kami memiliki beberapa cara untuk mengelolanya yang jelas setiap feedback akan dipilih berdasarkan kategorinya, apabila feedback merupakan wewenang dinas komunikasi dan Informatika dan dapat direspon maka akan direspon langsung oleh dinas komunikasi dan Informatika, apabila feedback berkaitan dengan wewenang dari SKPD lain maka akan disampaikan kepada SKPD yang berwenang. Begitu pula feedback berkaitan dengan kebijakan daerah akan disampaikan kepada atasan seperti bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah" (Andri Febriyadi, wawancara, 29 juli 2018)